

SKRIPSI

**PENGARUH INFLASI, INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA TINGKAT PENGANGGURAN, KETIMPANGAN
PENDAPATAN TERHADAP KEMISKINAN
DI INDONESIA**



Disusun Oleh:

**NURHALIZA
NIM: 220604082**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurhaliza
NIM : 220604082
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 03 Mei 2026

Yang Menyatakan,



Nurhaliza

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia

Disusun oleh:

Nurhaliza

NIM : 220604082

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Univesitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Idaryani, SE., M.Si

NIP:197505052025212011

Pembimbing II

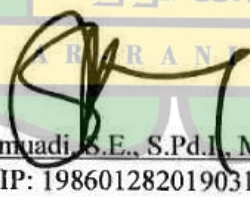


Nanda Nur Sofyana, S.E., M. App. Ec., M. Si

NIP : 199304222025052005

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi



Ismuadi, S.E., S.Pd.I., M.Si

NIP: 198601282019031005

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia

Nurhaliza
NIM: 220604082

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 07 Mei 2026 M
08 Dzulqa'idah 1447

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Dr. Maryani, S.E., M.Si
NIP. 197505052025212011

Sekretaris

Nanda Nur Sofyana, S.E., M.App.E.C., M.Si
NIP. 199304222025052005

Penguji I

Dr. Maimun, S.E., Ak., M.Si
NIP: 197009171997031002

Penguji II

Rachmi Meutia, M.Sc
NIP: 198803192019032013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Prof. Dr. Hafas Furqani, M.E
NIP. 198006252009011009



KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Nurhaliza
NIM : 220604082
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmui Ekonomi
E-mail : 220604082@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

Yang berjudul:

Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 03 Mei 2026 M

Mengetahui

Penulis

Nurhaliza
220604082

Pembimbing I

Dr. Idaryani, S.E., M.Si
NIP.197505052025212011

Pembimbing II

Nanda Nur Sofyana, S.E., M.App. Ec., M. Si
NIP. 199304222025052005

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana limpahan rahmat, nikmat-Nya dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia” ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan beriring salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi contoh dan sumber inspirasi yang teladan terbaik untuk umat manusia. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Perjalanan Panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini, walaupun terkadang terdapat hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya. Namun berkat kehendak Allah SWT tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, ketulusan dan keikhlasan, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani M.Ec Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Ismuadi, S.E., S.Pd.I, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi UIN Ar-Raniry dan Uliya Azra, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi.
3. Hafizh Maulana SP., S.HI., ME Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Idaryani, SE.,MSi selaku Pembimbing I dan Nanda Nur Sofyana, S.E.,M. App. Ec., M.Si selaku Pembimbing II yang selalu senantiasa memberikan dukungan, meluangkan waktu untuk mengarahkan dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Hafas Furqani M.Ec selaku dosen Penasehat Akademik (PA) serta seluruh Dosen beserta staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, khususnya program studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, serta waswasan yang luas kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam kelancaran pengurusan administrasi akademik selama masa perkuliahan.
8. Teristimewa, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Alm ayah dan ibunda tercinta,yang telah menjadi sosok ibu sekaligus ayah

sehingga anak perempuannya dapat melanjutkan perguruan tinggi..Meskipun mama harus berjuang sendiri tapi kasih sayang, materi yang diberikan tidak pernah kurang.Terimakasih ya ma,atas doa, nasihat, semangat, kekuatan yang tidak pernah putus mama berikan kepada liza. Terimakasih kepada Kak Adah, Kak Ala, Bg Ijol, Aulia,Bg Yuti dan Bg Putra yang telah memberikan support dan doa sehingga penulis sampai di tahap ini.Terimakasih kepada Andong dan seluruh keluarga besar yang selalu menjadi motivasi penulis agar bisa sama seperti mereka. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda atas kebaikan dan keikhlasan dalam membantu penulis.

9. Kepada sahabat saya dina, lara, uun, may yang selalu menemani di perantauan.Kita datang dari setiap kota yang berbeda,sehingga takdir mempertemukan kita di kota yang sama. Allah telah memberikan kita kesempatan menjadi keluarga diperantauan ini. Meskipun suatu saat kita akan dipisahkan karena kita harus mencapai cita-cita yang diinginkan. Namun kalian tetap ada dihati penulis,kalian sebagai saksi penulis sampai dititik ini. Kalian tidak pernah meninggalkan penulis disaat penulis berada dititik terendahnya. Terimakasih telah merangkul, menjadi tempat cerita, membantu,menjadi support dan menjadi rumah untuk penulis pulang disaat penulis lelah.

10. Kepada teman saya Wirda, Dwi dan Buyu terimakasih telah banyak mengajarkan bagaimana artinya persaudaraan. Kepada Cut Anisa Anatasya dan Zulmi Andika sebagai sahabat dari SMA terimakasih telah menjadi keluarga sampai sekarang yang selalu membantu penulis dalam kesulitan apapun. Terimakasih kepada Ahmad teman seperjuangan program studi ilmu ekonomi yang telah bersedia bertukar pikiran dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. And lastly, for myself. Terimakasih untuk perjuangan selama ini. Di saat lelah,takut dan rasa ingin menyerah itu datang kamu tetap memilih bangkit dan terus berjuang. Karena sesuatu yang sudah dimulai harus diselesaikan.Kini kamu mampu membuktikannya bahwa gelar sarjana telah kamu dapatkan.

Akhir kata penulis sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi hingga selesainya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka dari itu sangat diharapkan jika adanya kritik dan saran yang dapat membangun dari pihak manapun untuk kesempurnaan dari hasil skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk para pembaca dan pihak-pihak lainnya yang membutuhkannya.

Banda Aceh, 07 Mei 2026
Penulis,

Nurhaliza

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vocal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vocal Tunggal

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

3. Maddah

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*
 رَامَى = *ramā* - R A N I R Y
 قِيلَ = *qīla*
 يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

الأطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M.Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Nurhaliza
NIM : 220604082
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/
Ilmu Ekonomi
Judul : Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan
Manusia, Tingkat Pengangguran dan
Ketimpangan Pendapatan.
Tanggal Sidang : 07 Mei 2026
Pembimbing I : Dr. Idaryani, SE, M.Si
Pembimbing II : Nanda Nur Sofyana, S.E., M.App.Ec., M.Si

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, kondisi pasar tenaga kerja, serta distribusi pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran, dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015-2024. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel menggunakan Fixed Effect model sebagai model yang terpilih. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa inflasi secara parsial berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Kemudian indeks pembangunan manusia dan ketimpangan pendapatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Dan tingkat pengangguran secara parsial tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Namun secara simultan diperoleh hasil bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kata Kunci: Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, Kemiskinan.

DAFTAR ISI

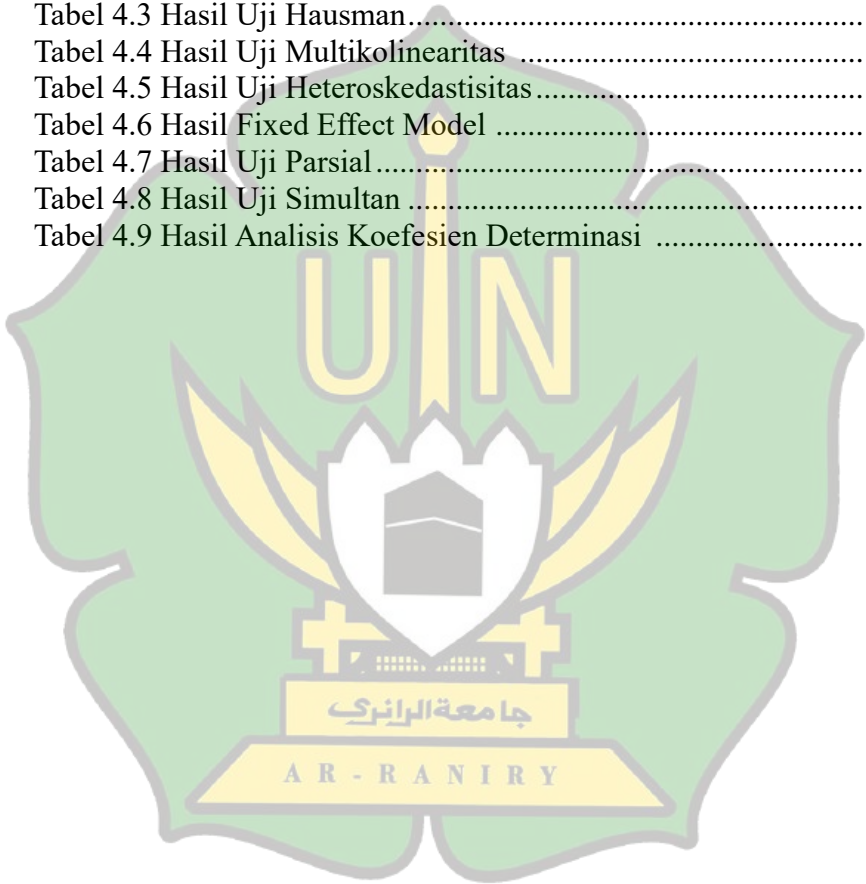
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	26
1.3 Tujuan Masalah	26
1.4 Manfaat Penelitian.....	27
BAB II LANDASAN TEORI.....	31
2.1 Kemiskinan.....	31
2.1.1 Pengertian Kemsiskinan	31
2.1.2 Teori Kemiskinan.....	33
2.1.3 Jenis-Jenis Kemiskinan.....	34
2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan	35
2.1.5 Indikator Kemiskinan	36
2.2 Inflasi.....	37
2.2.1 Definisi Inflasi	37
2.2.2 Teori Inflasi.....	38
2.2.3 Jenis Inflasi	39
2.2.4 Indikator Inflasi	41
2.3 Indeks Pembangunan Manusia(IPM)	42
2.3.1 Definisi Indeks Pembangunan Manusia	42
2.3.2 Teori Indeks Pembangunan Manusia	43
2.3.3 Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia	45
2.3.4 Prinsip-Prinsip Indeks Pembangunan Manusia	46
2.3.5 Indikator Indeks Pembangunan Manusia.....	47
2.4 pengangguran.....	49

2.4.1 Teori Pengangguran	49
2.4.2 Jenis-Jenis Pengangguran	50
2.4.3 Faktor-faktor penyebab pengangguran	52
2.4.4 Indikator Pengangguran.....	53
2.5 Ketimpangan Pendapatan	54
2.5.1 Pengertian Ketimpangan Pendapatan	54
2.5.2 Teori Ketimpangan Pendapatan	55
2.5.3 Indikator Ketimpangan Pendapatan.....	55
2.6 Hubungan Antar Variabel	57
2.6.1 Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia	58
2.6.2 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia.....	59
2.6.3 Hubungan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.....	60
2.6.4 Hubungan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.....	61
2.7 Penelitian Terdahulu	63
2.8 Kerangka Berfikir	68
2.9 Hipotesis Penelitian	70
BAB III METODE PENELITIAN	72
3.1 Jenis Penelitian	72
3.2 Jenis dan Sumber Data	73
3.3 Variabel Penelitian.....	74
3.3.1 Variabel Terikat(Dependen)	74
3.3.2 Variabel Bebas (Independen).....	74
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	75
3.5 Teknik Analisis Data	76
3.4.1 Common Effect Model (CEM).....	79
3.4.2 Fixed Effect Model (FEM)	80
3.4.3 Random Effect Model (REM)	80
3.6 Uji Asumsi Klasik.....	82
3.6.1 Uji multikolinearitas	82
3.6.3 Uji Heteroskedasitas	83
3.7 Pengujian Hipotesis	83
3.7.1 Uji t (Parsial).....	83
3.7.2 Uji F (Simultan).....	84

3.7.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	85
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	86
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	86
4.1.1 Peta Provinsi di Indonesia	86
4.2 Analisis Deskripsi	87
4.2.2 Kemiskinan	89
4.2.3 Inflasi	91
4.2.4 Indeks Pembangunan Manusia	92
4.2.5 Tingkat Pengangguran	94
4.2.6 Ketimpangan Pendapatan	95
4.3 Estimasi Regresi Data Panel.....	97
4.3.1 Hasil Uji Chow	97
4.3.2 Hasil Uji Hausman.....	98
4.4 Pengujian Asumsi Klasik.....	99
4.4.1 Hasil Uji Multikolinearitas	99
4.4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	100
4.5. Regresi Data Panel (FEM).....	100
4.6 Pengujian Hipotesis	103
4.6.1 Hasil Uji Parsial.....	103
4.6.2 Hasil Uji Simultan	104
4.6.3 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	105
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian.....	105
4.7.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia .	106
4.7.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan	107
4.7.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan di Indonesia.....	109
BAB V PENUTUP.....	113
5.1 Kesimpulan.....	113
5.2 Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	124

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya.....	36
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	42
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	49
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow	56
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman.....	56
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	57
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	58
Tabel 4.6 Hasil Fixed Effect Model	59
Tabel 4.7 Hasil Uji Parsial.....	60
Tabel 4.8 Hasil Uji Simultan	60
Tabel 4.9 Hasil Analisis Koefesien Determinasi	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kemiskinan di Indonesia (Persen).....	3
Gambar 1. 2 Inflasi di Indonesia (Persen)	6
Gambar 1. 3 Indeks Pembangunan manusia Di Indonesia (Skor) ..	11
Gambar 1. 4 Tingkat Pengangguran di Indonesia (Persen)	15
Gambar 1. 5 Ketimpangan Pendapatan (Rasio)	Er
ror! Bookmark not defined.	
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	39
Gambar 2. 1	69
Gambar 4. 1 Peta Provinsi di Indonesia	41
Gambar 4.2 Presentase Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2024	51
Gambar 4.3 Presentase Inflasi di Indonesia Tahun 2015-2024	52
Gambar 4.4 Presentase Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2015-2024	53
Gambar 4.5 Presentase Tingkat Pengangguran Tahun 2015-2024	54
Gambar 4.6 Presentase Ketimpangan Pendapatan Tahun 2015-2024	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Inflasi Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Ketimpangan Pendapatan Tahun 2015-2024.....	86
Lampiran 2 : Data Kemiskinan Inflasi Indeks Pembangunan Manusia (Yang Sudah Di Ln) Tingkat Pembangunan Terbuka Dan Ketimpangan Pendapatan.....	87
Lampiran 3: Output Hasil Uji Common Effect Model.....	88
Lampiran 4: Output Hasil Uji Fixed Effect Model.....	89
Lampiran 5: Output Hasil Uji Random Effect Model	90
Lampiran 6: Output Hasil Uji Chow	91
Lampiran 7: Output Hasil Uji Hausman.....	92
Lampiran 8: Output Hasil Uji Multikolinearitas	93
Lampiran 9: Output Hasil Uji Heteroskedastisitas	94





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah global yang sedang dihadapi oleh berbagai negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Kemiskinan ditandai dengan ketidakmampuan individu atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Permasalahan kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, serta kesempatan kerja Menurut (Word Bank, 2024) Indonesia menempati peringkat keempat di antara 193 negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di dunia, di mana sekitar 60,3 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Dalam perhitungan tersebut, Bank Dunia mengelompokkan Indonesia sebagai negara dengan kategori ekonomi menengah ke atas (*upper middle income country*).

Kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 24,06 juta penduduk miskin atau 8,57 persen dari total populasi dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 281,6 juta jiwa (BPS,2024). Badan Pusat Statistik menetapkan bahwa seseorang dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah Rp595.242, yang mencerminkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik

kebutuhan makanan maupun non-makanan. Pengukuran kemiskinan berdasarkan pendekatan pengeluaran ini dinilai lebih mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara riil, terutama di negara berkembang dengan dominasi pekerja sektor informal. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun terakhir 2024 menunjukkan penurunan menjadi 8,57% dibandingkan 2023 sebesar 9,36% secara nasional. Namun terjadi disparitas yang cukup signifikan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada September 2024 persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mencapai sekitar 11,34 persen sekitar 13,01 juta orang, sedangkan di daerah perkotaan hanya sekitar 6,66 persen sekitar 11,05 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di wilayah perdesaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan di wilayah perkotaan, hal ini disebabkan daerah perdesaan umumnya melakukan produktivitas hanya melalui pertanian. Berikut grafik provinsi tingkat kemiskinan tertinggi ditahun terakhir 2024.

Gambar 5. 1
Kemiskinan di Indonesia (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan grafik tersebut data Provinsi Tingkat Kemiskinan Tertinggi 2024, tingkat kemiskinan tertinggi tercatat di Papua Pegunungan sebesar 29,66% dan Papua Tengah sebesar 27,6%, yang menunjukkan bahwa hampir sepertiga penduduk di wilayah tersebut hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, medan geografis yang sulit, rendahnya akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta minimnya lapangan kerja produktif. Provinsi lain seperti Papua Selatan (19,35%), Nusa Tenggara Timur (19,02%), dan Papua (18,09%) juga memiliki tingkat kemiskinan yang masih tinggi akibat ketimpangan pembangunan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, Maluku (15,78%), Gorontalo (13,87%),

Aceh (12,64%), dan Bengkulu (\pm 12,5%) berada pada tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan wilayah Papua, namun tetap tergolong tinggi secara nasional karena keterbatasan kesempatan kerja dan produktivitas ekonomi yang belum optimal. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa kemiskinan di Indonesia bersifat regional dan struktural, sehingga diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih merata dan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi.

Fenomena ini terlihat bahwa tingkat kemiskinan nasional Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 8,57 persen, sehingga secara nasional kemiskinan berada pada kategori sedang karena berada di bawah 10 persen. Namun, pada tingkat provinsi masih terdapat daerah dengan tingkat kemiskinan di atas 10 persen yang tergolong sebagai kemiskinan tinggi, bahkan jauh melampaui angka nasional, seperti Papua Pegunungan dan Papua Tengah yang mencatat persentase kemiskinan di atas 25 persen. Tingginya tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta struktur perekonomian yang masih didominasi sektor berproduktivitas rendah. Kondisi ini diperparah oleh tekanan inflasi yang cenderung lebih tinggi di daerah dengan keterbatasan distribusi barang dan jasa, sehingga harga kebutuhan pokok menjadi lebih mahal dan sulit dijangkau. Keterbatasan sistem distribusi menyebabkan inflasi bersifat tidak merata dan lebih membebani

rumah tangga berpendapatan rendah. Oleh karena itu, meskipun kemiskinan nasional berada pada kategori sedang, permasalahan kemiskinan di tingkat provinsi masih serius dan memerlukan kebijakan pengentasan kemiskinan yang terarah, disertai upaya pengendalian inflasi melalui perbaikan sistem distribusi dan akses pasar. Menurut (Sukirno, 2016) inflasi merupakan salah satu tingkat penting dalam perekonomian yang mencerminkan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode waktu tertentu. Inflasi tidak hanya menunjukkan meningkatnya harga pada satu atau dua komoditas, melainkan mencakup tingkat besar barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, sehingga berdampak pada penurunan daya beli uang

Inflasi di Indonesia merupakan indikator makroekonomi yang penting karena berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, inflasi cenderung didominasi oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, khususnya kelompok bahan pangan seperti beras, minyak goreng, dan komoditas hortikultura. Kondisi ini menjadikan inflasi sangat sensitif terhadap gangguan pasokan, perubahan musim, serta dinamika distribusi barang antarwilayah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi di Indonesia diukur melalui Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencerminkan perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, di mana inflasi dengan tingkat di bawah 10 persen per

tahun tergolong sebagai inflasi ringan dan dalam beberapa tahun terakhir inflasi nasional masih berada pada kategori tersebut.

Meskipun secara nasional inflasi berada pada tingkat yang relatif terkendali, tekanan inflasi tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah. Daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan sistem distribusi cenderung menghadapi biaya logistik yang lebih tinggi, sehingga harga kebutuhan pokok menjadi lebih mahal dan kurang stabil. Kondisi ini memberikan tekanan yang lebih besar bagi rumah tangga berpendapatan rendah karena sebagian besar pengeluaran mereka dialokasikan untuk konsumsi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, pengendalian inflasi melalui stabilisasi pasokan, perbaikan sistem distribusi, serta koordinasi kebijakan pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung upaya pengurangan kemiskinan. Berikut grafik Inflasi di Indonesia Tahun 2015-2024

Gambar 5. 2
Inflasi di Indonesia (Persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia selama periode 2015-2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi namun secara umum berada dalam kondisi yang relatif terkendali. Pada fase awal periode pengamatan, yakni 2015 hingga 2017, tingkat inflasi berada pada kisaran 3,02%-3,61%, yang mencerminkan stabilitas harga yang cukup baik. Kondisi tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok serta mengendalikan harga energi. Memasuki periode berikutnya, laju inflasi menunjukkan kecenderungan menurun hingga mencapai 2,72% pada 2019, seiring dengan terkendalnya harga pangan, stabilitas nilai tukar, serta moderasi permintaan domestik. Tekanan inflasi semakin melemah pada 2020 dan 2021, tercermin dari inflasi yang berada pada level 1,68% dan 1,87%, yang berkaitan erat dengan melemahnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat akibat pandemi covid. Setelah periode tersebut, tekanan inflasi kembali meningkat secara signifikan hingga mencapai 5,51% pada 2022, yang dipicu oleh penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), lonjakan harga energi global, serta gangguan rantai pasok pascapandemi. Seiring dengan berbagai upaya stabilisasi yang dilakukan, inflasi kembali menunjukkan tren penurunan pada 2023 dan 2024, masing-masing menjadi 2,61% dan 1,57%, yang mencerminkan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi, stabilisasi harga pangan, serta pemulihan kondisi ekonomi nasional.

Fenomena ini terlihat bahwa inflasi mengalami fluktuasi yang stabil di tingkat nasional, namun penurunan kemiskinan di tingkat nasional tidak selalu diikuti oleh perbaikan kondisi ekonomi di seluruh daerah, terutama di provinsi-provinsi dengan tekanan inflasi yang relatif tinggi (Frisnoiry, Sitompul, et al., 2024). Inflasi yang lebih tinggi di suatu wilayah berpotensi menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah, sehingga dapat menghambat penurunan kemiskinan di tingkat daerah. Kondisi ini tercermin pada inflasi September 2024, di mana secara nasional inflasi y-on-y tercatat sebesar 1,57 persen, namun beberapa provinsi masih mengalami inflasi yang relatif tinggi. Provinsi Papua Pegunungan mencatat inflasi tertinggi sebesar 4,14 persen, jauh di atas rata-rata nasional, yang mengindikasikan masih kuatnya tekanan harga di wilayah. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya perbedaan kemampuan antarwilayah dalam menghadapi tekanan harga dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Selain dipengaruhi oleh dinamika inflasi, tingkat kemiskinan juga sangat ditentukan oleh kualitas pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia berperan penting dalam memengaruhi tingkat kemiskinan, karena IPM mencerminkan capaian pembangunan pada tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (Badan Pusat Statistik, 2024). Peningkatan kualitas pada ketiga dimensi tersebut dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, serta memperbaiki

kesejahteraan ekonomi, sehingga berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Salah satu komponen utama dalam indeks pembangunan manusia (IPM) adalah dimensi kesehatan yang diukur melalui indikator harapan hidup saat lahir. Indikator harapan hidup digunakan untuk menggambarkan kondisi Kesehatan masyarakat serta kualitas layanan kesehatan yang tersedia di suatu wilayah, karena mencerminkan kemampuan penduduk untuk hidup lebih lama dan sehat (Efendi et al., 2024). Harapan Hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir dengan asumsi bahwa tingkat kematian pada berbagai kelompok umur tetap konstan dalam periode tertentu. Indikator ini menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin baik kualitas sistem kesehatan dan kondisi kehidupan masyarakat di suatu wilayah (Statistik, 2024).

IPM memiliki prinsip-prinsip dasar yang menekankan pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. Menurut (Sari et al., 2020) prinsip produktivitas menekankan pentingnya kemampuan penduduk untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Prinsip pemerataan menegaskan bahwa setiap penduduk harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya ekonomi dan sosial tanpa adanya hambatan struktural. Selanjutnya, prinsip kesinambungan menekankan pentingnya menjaga akses terhadap sumber daya bagi generasi sekarang dan generasi mendatang, sementara prinsip

pemberdayaan menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Keempat prinsip tersebut saling melengkapi dan menjadi landasan dalam memahami IPM sebagai instrumen pembangunan yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan. Berikut grafik Indeks Pembangunan di Indonesia Perseptember dalam rentang waktu 2015-2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS 2024), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia selama periode 2015-2019 menunjukkan peningkatan yang relatif stabil dengan rata-rata IPM sekitar 70,07, yang mencerminkan perbaikan kualitas pembangunan manusia melalui kebijakan pemerintah dalam RPJMN 2015-2019, seperti perluasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan anggaran pendidikan, serta pelaksanaan Program Indonesia Pintar dan Bantuan Operasional Sekolah yang memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan. Pada 2020, IPM tercatat 71,94 dengan laju peningkatan yang relatif lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan pengeluaran riil per kapita, terbatasnya mobilitas penduduk, serta penyesuaian penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan yang berdampak pada capaian dimensi standar hidup dan pendidikan. Selanjutnya, IPM kembali meningkat menjadi 72,29 pada 2021 dan 72,91 pada 2022 seiring dengan pelaksanaan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional dan perluasan program perlindungan sosial. Tren peningkatan tersebut berlanjut pada 2023 sebesar 74,39 dan mencapai 75,02 pada 2024, mencerminkan

keberlanjutan kebijakan pemerintah dalam memperkuat pembangunan manusia.

Gambar 5. 3
Indeks Pembangunan manusia Di Indonesia (Skor)



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Fenomena ini menjelaskan bahwa ipm terus mengalami peningkatan yang cukup stabil, namun terdapat tantangan terutama terhadap aspek pendidikan kualitas pembangunan manusia secara keseluruhan masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek pendidikan. Beberapa daerah, khususnya di kawasan Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), masih mencatat capaian pendidikan yang relatif rendah, baik dari sisi rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah. Menurut (Shobiha & Yuniasih, 2022), keterbatasan akses terhadap sarana

pendidikan, minimnya tenaga pendidik yang berkualitas, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum memadai menjadi faktor utama yang menyebabkan ketimpangan capaian pendidikan antarwilayah. Kondisi tersebut berimplikasi langsung terhadap permasalahan ketenagakerjaan, khususnya tingkat pengangguran. Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja menyebabkan sebagian penduduk usia kerja sulit terserap di pasar tenaga kerja formal. Menurut (Nasirudin & Haviz, 2025) Pengangguran yang tinggi mencerminkan ketidakseimbangan antara ketersediaan tenaga kerja dan kesempatan kerja, terutama bagi tenaga kerja berpendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan yang memadai. Dalam jangka panjang, tingginya tingkat pengangguran dapat menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat karena menurunkan pendapatan rumah tangga dan memperbesar risiko kemiskinan. Oleh karena itu, pengangguran menjadi salah satu indikator penting yang perlu dianalisis dalam menilai keberhasilan pembangunan manusia serta keterkaitannya dengan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Menurut Sukirno (2014:28), pengangguran merupakan bagian dari tenaga kerja dalam suatu perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil memperolehnya, sehingga mencerminkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja oleh lapangan kerja yang tersedia. Di Indonesia sendiri memiliki jenis pengangguran yang dominan yaitu pengangguran struktural dan pengangguran friksional. Pengangguran struktural terjadi akibat

ketidaksesuaian antara keterampilan dan tingkat pendidikan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, terutama di tengah percepatan transformasi teknologi dan digitalisasi ekonomi. Perkembangan teknologi seperti otomatisasi, platform digital, dan kebutuhan keterampilan digital menciptakan tuntutan baru di pasar tenaga kerja yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia, sehingga memperparah ketidaksesuaian keterampilan (*skill mismatch*) dan meningkatkan pengangguran struktural (Rahman, 2024). Sementara itu, pengangguran friksional muncul sebagai konsekuensi dari proses pencarian kerja dan perpindahan tenaga kerja antara sektor atau wilayah yang berbeda, yang sering dipengaruhi oleh keterbatasan informasi pasar kerja, perbedaan upah, serta preferensi terhadap jenis pekerjaan tertentu (Harahap et al., 2025). Menurut BPS pengangguran di Indonesia diukur melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja, yang datanya dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei angkatan kerja nasional (Sakernas). Berikut grafik tingkat pengangguran terbuka di Indonesia Per Agustus dalam rentang waktu 2015-2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia selama periode 2015-2019 menunjukkan kecenderungan menurun, dari 6,18 persen pada tahun 2015 menjadi 5,23 persen pada tahun 2019. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi pasar kerja nasional yang

didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil serta meningkatnya penyerapan tenaga kerja, terutama pada sektor informal dan usaha mikro kecil yang berperan penting dalam menyerap angkatan kerja. Selain itu, berbagai kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan turut mendorong terciptanya kesempatan kerja yang lebih luas. Pada tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 7,07 persen. Kenaikan ini menunjukkan adanya pelemahan pasar tenaga kerja yang dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas ekonomi secara umum. Menurunnya kinerja sektor-sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa mengakibatkan berkurangnya kemampuan dunia usaha dalam menyerap tenaga kerja. Di sisi lain, melemahnya sektor informal dan usaha mikro kecil menyebabkan banyak pekerja mengalami pengurangan jam kerja atau kehilangan pekerjaan, sehingga beralih menjadi pengangguran terbuka. Selanjutnya pada periode 2021-2024, tingkat Pengangguran Terbuka kembali menunjukkan tren penurunan, dari 6,49 persen pada tahun 2021 menjadi 4,91 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan membaiknya kondisi pasar kerja nasional seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor.

Gambar 5. 4
Tingkat Pengangguran di Indonesia (Persen)



Sumber : Badan pusat statistik (2025)

Fenomena penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional belum tentu diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan yang proporsional, karena kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh status bekerja atau tidak bekerja, tetapi juga oleh tingkat pendapatan dan kualitas pekerjaan yang diperoleh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp78,62 juta per tahun atau setara dengan Rp6,55 juta per bulan. Meskipun angka ini menunjukkan peningkatan secara agregat, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pendapatan tersebut belum dinikmati secara merata, terutama oleh tenaga kerja yang terserap di sektor informal dengan upah rendah dan produktivitas yang

terbatas. Menurut (Hasballah, 2021) menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berkontribusi signifikan terhadap variasi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh, yang mengindikasikan tingginya kerentanan rumah tangga terhadap fluktuasi pasar kerja. Temuan ini sejalan dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa pengangguran dan pendapatan per kapita secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia (Muna Muttaqin, 2023) Oleh karena itu, Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi indikator yang relevan dan penting untuk diteliti, karena mampu merefleksikan kondisi pasar tenaga kerja sekaligus menjelaskan mekanisme bagaimana keterbatasan kesempatan kerja dan rendahnya pendapatan berkontribusi terhadap dinamika kemiskinan di Indonesia. Selain itu terdapat indikator Ketimpangan Pendapatan untuk melihat sejauh mana Kemiskinan di Indonesia.

Ketimpangan Pendapatan adalah ketidakseimbangan distribusi pendapatan antarindividu dalam suatu perekonomian yang dipengaruhi oleh struktur pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran, serta perbedaan akses terhadap faktor produksi. (Biewen & Flachaire, 2018) didalam Buku *Econometrics and Income Inequality* menekankan bahwa kondisi pengangguran yang tinggi dapat memperlebar ketimpangan melalui penurunan daya tawar tenaga kerja dan konsentrasi pendapatan pada kelompok tertentu. Menurut (Fathoni, 2023) distribusi pendapatan mencerminkan sejauh mana hasil pembangunan suatu negara terbagi secara merata atau timpang di antara penduduknya. Ketimpangan pendapatan yang tinggi

menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan nasional hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara kelompok lainnya memperoleh bagian yang relatif kecil. Dalam penelitian ini, ketimpangan pendapatan diukur menggunakan gini ratio, yang merupakan indikator umum untuk menggambarkan tingkat pemerataan distribusi pendapatan, di mana nilai yang semakin mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mustika & Naskah, 2022) ketimpangan pendapatan di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh perbedaan kesempatan kerja dan pembangunan antar wilayah, di mana daerah perdesaan mengalami keterbatasan akses terhadap teknologi dan peluang ekonomi yang berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat. Kondisi ini diperkuat oleh temuan lain yang menyatakan bahwa meskipun wilayah perkotaan memiliki tingkat ketimpangan yang relatif tinggi, masyarakat perdesaan lebih merasakan dampak ketimpangan secara langsung dalam bentuk kemiskinan yang persisten akibat minimnya sumber pendapatan alternatif dan rendahnya mobilitas sosial. Berikut grafik Ketimpangan Pendapatan di Indonesia dalam rentang waktu 2015-2024.

Gambar 5. 5
Ketimpangan Pendapatan (Rasio)



Sumber:Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan pendapatan di Indonesia yang diukur melalui gini ratio selama periode 2015-2024 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2015, ini ratio masih relatif tinggi, mencerminkan lebarnya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah. Selama periode 2016-2019, gini ratio mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja, khususnya di sektor informal dan usaha mikro kecil, serta efektivitas program perlindungan sosial yang meningkatkan pendapatan kelompok berpendapatan rendah. Pada tahun 2020, ketimpangan kembali meningkat akibat terganggunya aktivitas ekonomi, di mana penurunan pendapatan lebih besar dialami oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah

dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Selanjutnya, pada periode 2021-2022 ketimpangan kembali menurun seiring membaiknya kondisi ekonomi dan berlanjutnya program pemulihan. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan ketimpangan akibat perbedaan kecepatan pemulihan pendapatan antar sektor dan wilayah, sebelum kembali menurun pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di Indonesia masih rentan terhadap dinamika ekonomi dan kualitas pertumbuhan.

Fenomena ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan yang merata. Ketimpangan distribusi pendapatan menyebabkan sebagian besar manfaat pertumbuhan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, sementara kelompok berpendapatan rendah terutama di wilayah perdesaan dan sektor informal tetap mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan lapangan kerja yang produktif. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian (Mustika & Naskah, 2022) yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, di mana daerah dengan ketimpangan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi pula. Selain itu, penelitian (Rinaldi et al., 2025) juga menemukan bahwa ketimpangan pendapatan memperburuk kerentanan ekonomi rumah tangga terhadap guncangan pendapatan, sehingga memperlambat laju penurunan

kemiskinan meskipun indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan bukan hanya persoalan distribusi, tetapi juga berdampak langsung pada kemampuan masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan, sehingga variabel ketimpangan perlu dianalisis secara komprehensif dalam menjelaskan dinamika kemiskinan di Indonesia.

Pemilihan variabel inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, dan ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro, kualitas sumber daya manusia, kondisi pasar tenaga kerja, serta distribusi pendapatan. Inflasi yang tinggi menyebabkan harga barang dan jasa, termasuk kebutuhan pokok, naik secara umum dan berkelanjutan, sehingga daya beli masyarakat, khususnya rumah tangga berpendapatan rendah, menurun dan mereka semakin sulit memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Penelitian (Frisnoiry, Sitompul, et al., 2024) di Sumatera Utara menemukan bahwa inflasi memiliki dampak nyata terhadap tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipilih karena mencerminkan kualitas hidup masyarakat melalui aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Penelitian oleh (Septiani, 2026) menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti peningkatan kualitas manusia dapat menurunkan kemiskinan. Faktor

Pengangguran sangat berperan terhadap kemiskinan dengan melihat kondisi masyarakat tidak bekerja, menurut (June & Arianto, 2025) Faktor pengangguran juga berpengaruh pada kemiskinan karena keterbatasan pendapatan rumah tangga dengan tingkat pengangguran yang tinggi, sedangkan Ketimpangan pendapatan dipilih sebagai variabel karena mencerminkan seberapa merata distribusi pendapatan di masyarakat. (Rinaldi et al., 2025) menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan (income inequality) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, serta menjadi salah satu hambatan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan karena manfaat pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian mengenai pengaruh inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengangguran, dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian, hasil-hasil penelitian tersebut masih menunjukkan perbedaan, terutama terkait besarnya dan arah pengaruh masing-masing variabel terhadap tingkat kemiskinan. Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa hubungan antara faktor-faktor makroekonomi dan kemiskinan belum sepenuhnya konklusif serta masih memerlukan pengkajian lebih lanjut. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti kembali sejauh mana pengaruh inflasi, IPM, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan

rentang waktu sepuluh tahun, yaitu periode 2015-2024. Penelitian ini menjadi penting mengingat hingga saat ini masih sangat terbatas penelitian yang menguji keempat faktor makroekonomi tersebut secara simultan dalam satu model analisis terhadap kemiskinan di Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (S. N. Putri & Pristiana, 2025) misalnya, mengkaji beberapa determinan kemiskinan di Indonesia dengan fokus pada variabel ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) dan pengangguran. Namun, penelitian tersebut belum memasukkan variabel inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersamaan dalam satu kerangka analisis. Selain itu, periode penelitian yang digunakan masih terbatas hingga tahun 2022, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan dinamika sosial ekonomi terkini, khususnya pada periode pascapandemi Covid-19 dan adanya fluktuasi harga global yang signifikan hingga tahun 2024. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengintegrasikan empat variabel makroekonomi utama, yaitu inflasi, IPM, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan, dalam satu model analisis dengan menggunakan data panel provinsi di Indonesia selama periode 2015–2024. Dengan cakupan variabel dan periode yang lebih luas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif, aktual, dan kontekstual mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan (Meiliza et al., 2025) dalam penelitiannya menemukan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Palembang, dikarenakan umumnya masyarakat di Palembang didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa sehingga masyarakat memiliki kemampuan adaptasi ekonomi yang lebih baik terhadap kenaikan harga terhadap kebutuhan konsumsi. Menurut jurnal (Sandi et al., 2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Mamuju. Hal ini mengindikasikan bahwa fluktuasi inflasi yang terjadi masih berada dalam batas yang terkendali serta tidak memberikan tekanan yang kuat terhadap daya beli masyarakat miskin. Selain itu, keberadaan program bantuan sosial dan dominasi sektor pertanian menyebabkan dampak inflasi terhadap kemiskinan menjadi relatif kecil.

Menurut penelitian yang dilakukan (Afriwan, Adi Putra, 2025) dalam penelitiannya menemukan bahwa Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kemiskinan tidak selalu bersifat linier. Meskipun IPM di Provinsi Jambi meningkat secara konsisten, peningkatan tersebut belum diikuti oleh penurunan kemiskinan yang signifikan. Penelitian serupa oleh (Nurlaili et al., 2023) Berdasarkan hasil analisis penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Adanya pengaruh negatif tersebut

bisa disebabkan karena pada tahun 2020-2021 tingkat kemiskinan mengalami peningkatan akibat dari pandemi covid-19.

Selanjutnya (Silaen & Ginting, 2025) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di 23 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, artinya semakin tinggi pengangguran, semakin banyak penduduk yang miskin. Selanjutnya, penelitian oleh (Nofitiana et al., 2024) Secara spesifik, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di daerah Sumba Timur, Sabu Raijua, Sumba Tengah, dan Sumba Barat pada tahun 2013 hingga 2022. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, semakin besar pula proporsi masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, sehingga kemiskinan cenderung meningkat di wilayah tersebut.

Selanjutnya menurut (Amponsah et al., 2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan, maka semakin besar tingkat kemiskinan yang terjadi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata menyebabkan manfaat pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan secara luas oleh masyarakat, sehingga kemiskinan tetap bertahan. Begitu juga dengan (Astuty et al., 2025) yang menyimpulkan. Ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Yang

artinya, semakin rendah ketimpangan pendapatan, maka tingkat kemiskinan juga semakin menurun.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, terlihat bahwa sebagian besar penelitian masih mengkaji pengaruh variabel makroekonomi dengan cakupan variabel yang terbatas. Berbeda dengan penelitian tersebut, studi ini tidak hanya menganalisis pengaruh masing-masing variabel secara terpisah, tetapi juga menguji pengaruhnya secara bersama-sama untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh. Selain itu, hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan temuan, khususnya terkait pengaruh inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan. Di sisi lain, penelitian yang menguji pengaruh inflasi, IPM, tingkat pengangguran, dan ketimpangan pendapatan secara simultan dengan menggunakan data terbaru masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis keempat variabel secara bersamaan pada periode 2015-2024. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia?
2. Bagaimana Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia?
3. Bagaimana Tingkat Pengangguran berpengaruh terhadap Kemiskinan di Indonesia?
4. Bagaimana Ketimpangan Pendapatan berpengaruh terhadap Kemiskinan di Indonesia?
5. Bagaimana Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Ketimpangan Pendapatan secara simultan berpengaruh terhadap Kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan pada penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan di Indonesia
2. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Indonesia
3. Untuk menganalisis pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia

4. Untuk menganalisis pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan di Indonesia
5. Untuk menganalisis pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dengan memberikan manfaat bagi peneliti maupun pembaca, baik secara Teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat teoritis
Menambah pengetahuan tentang pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Ketimpangan pendapatan terhadap Kemiskinan yang pada umumnya masih terjadi ketimpangan terhadap provinsi-provinsi di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis
Mampu memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. Untuk membantu perekonomian indonesia dengan meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang tertuang dalam Indeks Pembangunan Manusia.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan untuk pemerintah, agar dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk mengurangi terjadinya kesenjangan pendapatan di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan di Indonesia. Membantu masyarakat agar dapat mengetahui

3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah yang mengambil kebijakan untuk memaksimalkan kegiatan perekonomian masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan.

1.5 Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini , berikut disajikan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB 1 Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan latar belakang yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini, rumusan masalah mengenai permasalahan yang timbul dari penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis

Menguraikan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Dari landasan teori dan penelitian terdahulu yang diterapkan di bab I maka didapat kerangka pemikiran konseptual. Di akhir bab ini terdapat hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini merupakan bab yang berisi metode yang dipakai untuk mendapatkan data dalam menjawab permasalahan yang dimulai dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan prosedur pengolahan data serta diakhiri dengan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat mengenai deskripsi data dari hasil penelitian serta analisis dan pembahasan dari data penelitian.

BAB V Penutup

Pada bab penutup diuraikan mengenai kesimpulan atas hasil pembahasan analisis dari data penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kemiskinan

2.1.1 Pengertian Kemsiskinan

Kemiskinan Menurut (Malthus, 2019) akibat dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan sumber daya, khususnya pangan, di mana jumlah penduduk meningkat secara geometris (cepat), sedangkan produksi pangan hanya meningkat secara aritmetis (lambat), sehingga menimbulkan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan menyebabkan sebagian masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kondisi tersebut selanjutnya memicu berbagai masalah sosial seperti pengangguran, kelaparan, dan rendahnya tingkat kesejahteraan. Selain itu, Malthus juga mengemukakan adanya mekanisme penyeimbang pertumbuhan penduduk, yaitu positive checks seperti penyakit, kelaparan, dan kematian, serta preventive checks seperti penundaan pernikahan dan pengendalian kelahiran, yang berfungsi untuk menekan laju pertumbuhan penduduk

Kemiskinan menurut BPS 2024 merupakan ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Kemiskinan jika dilihat dari ketimpangan sosial, karena ada orang yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya akan tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat disekitarnya (lingkungannya).

Semakin besar ketimpangan pendapatan antara golongan atas dan golongan di bawah maka akan semakin banyak jumlah penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk miskin, sehingga kemiskinan akan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan (Nafi'ah, 2021).

Kemiskinan menurut BPS 2024 kemiskinan diukur sebagai kondisi di mana penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan melalui pengeluaran ekonomi. peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan pada lingkungan pendukungnya masih kurang. Sehingga pada dasarnya definisi kemiskinan dilihat dalam dua sisi, diantaranya:

1. Kemiskinan absolut, Kemiskinan yang mengaitkan antara perkiraan Tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok (kebutuhan dasar minimum seseorang yang memungkinkan untuk hidup secara layak). Maka dari itu kemiskinan diukur dari perbandingan antara Tingkat pendapatan seseorang dengan Tingkat pendapatan yang dibutuhkan dalam memperoleh kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal (rumah).
2. Kemiskinan relative, Kemiskinan relatif ini dapat dilihat dari aspek ketimpangan sosial. Dimana ada seseorang atau individu yang sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya yang minimum namun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Masyarakat lingkungan sekitarnya. Karena semakin besar ketimpangan yang terjadi antara golongan atas dan

bawah akan semakin besar juga jumlah penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk miskin. Maka dari itu dapat kemiskinan relatif ini sangat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan (Aris, 2023).

2.1.2 Teori Kemiskinan

Menurut (Todaro & Smith, 2020), kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Kemiskinan dapat bersifat kronis maupun sementara, tergantung pada kondisi ekonomi dan faktor eksternal yang memengaruhinya, seperti fluktuasi ekonomi, perubahan musim, serta kejadian tak terduga seperti bencana. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan situasional.

Teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) dikemukakan oleh (Ragnar, 1953) dalam bukunya *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi secara terus-menerus karena adanya hubungan yang saling memengaruhi antara pendapatan rendah, tabungan rendah, investasi rendah, produktivitas rendah, dan kembali menyebabkan pendapatan rendah. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat miskin sulit keluar dari kemiskinan karena keterbatasan kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitasnya. Menurut

Nurkse, negara berkembang cenderung terjebak dalam suatu siklus kemiskinan sehingga diperlukan intervensi pembangunan ekonomi untuk memutus rantai tersebut. Pendapatan Rendah → Tabungan Rendah → Investasi Rendah → Produktivitas Rendah → Pendapatan Rendah.

Menurut (Dicki Dwi Ferian, 2021) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah kondisi yang menggambarkan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Masalah kemiskinan dalam hal ini merupakan persoalan mendasar yang dihadapi pemerintah, dan upaya penanggulangan kemiskinan adalah salah satu aspek penting dalam mencapai kesejahteraan rakyat.

2.1.3 Jenis-Jenis Kemiskinan

Terjadinya suatu kemiskinan juga dilihat dari adanya hubungan kausalitas yang menerangkan tentang sebab terjadinya muncul suatu masalah. Menurut (Utami, 2020) Kemiskinan juga dapat di bagi dalam 4 bentuk diantaranya:

- 1) Kemiskinan kultural: sikap individu sebagai akibat dari faktor budaya misalnya tidak ingin untuk memperbaikinya malas, orang yang boros, dan tidak adanya kreativitas.
- 2) Kemiskinan struktural: Rendahnya akses terhadap sumber daya adalah akar penyebab kemiskinan struktural, yang terjadi dalam konteks sosial politik dan budaya yang sama sekali tidak adanya dukungan pengentasan kemiskinan.

- 3) kemiskinan absolut: seseorang dikatakan miskin absolut jika tak dapat mencukupi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, edukasi, makanan, dan perawatan Kesehatan
- 4) Kemiskinan Relatif: kondisi di mana adanya kesenjangan pendapatan terjadi sebagai akibat dari adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang tidak menjangkau seluruh masyarakat.

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor. Baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi faktor demografi, seperti pendidikan, usia, dan jenis kelamin. Eksternal meliputi faktor ekonomi, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Berdasarkan data dan informasi, faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor struktural dan faktor kultural

Faktor struktural merupakan faktor-faktor yang berasal dari sistem perekonomian dan sosial masyarakat. Faktor struktural yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia antara lain:

- 1) Ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu faktor yang paling dominan menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Ketimpangan pendapatan yang tinggi menyebabkan sebagian besar masyarakat memiliki pendapatan

yang rendah, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Struktur ekonomi yang tidak merata.

- 2) Struktur ekonomi yang tidak merata menyebabkan sebagian besar masyarakat hanya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, yang memiliki produktivitas yang rendah. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat memiliki pendapatan yang rendah.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan menyebabkan masyarakat tidak memiliki motivasi untuk bekerja keras dan meningkatkan pendapatan mereka.

2.1.5 Indikator Kemiskinan

Terdapat beberapa indikator kemiskinan menurut (Utami, 2020) sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan memenuhi konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
4. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat
5. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan..

2.2 Inflasi

2.2.1 Definisi Inflasi

Inflasi adalah kondisi di mana terjadi peningkatan harga barang dan jasa secara global dan terus-menerus dalam perekonomian. Kenaikan harga pada satu atau dua komoditas saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali jika peningkatan harga tersebut meluas dan mempengaruhi sebagian besar barang atau jasa lainnya. Inflasi terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara program pengadaan barang (seperti produksi, kebijakan harga, dan pencetakan uang) dengan kemampuan daya beli masyarakat. Dengan kata lain, inflasi adalah perekonomian yang pada akhirnya menyebabkan kenaikan harga-harga komoditas secara luas (Kurniawan et al., 2025).

Inflasi adalah suatu keadaan dimana tingkat harga secara umum (*price level*) cenderung meningkat. Penyebab inflasi itu adalah kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan memproduksi yang menyebabkan harga menjadi naik (*demand pull inflation*), inflasi juga dapat terjadi atau datang dari sisi penawaran, yakni kenaikan biaya produksi sehingga harga naik (*cost push inflation*). Pada teori inflasi dijelaskan bahwa inflasi terjadi karena jumlah uang yang beredar tidak seimbang dengan barang tersedia (teori kuantitatif uang) dan masyarakat ingin berada di luar batas kemampuan ekonominya (teori Keynes). (Rudy & Indah, 2020)

Inflasi adalah mencerminkan tidak seimbangnya antara penawaran dan permintaan dalam perekonomian nasional. Meskipun

ada beberapa inflasi yang dianggap wajar dalam ekonomi, kenaikan harga yang terlalu tinggi dapat merusak daya beli konsumen, mengacaukan alokasi sumber daya, dan membuat perencanaan ekonomi menjadi tidak pasti, inflasi yang ringan dapat mendorong konsumsi, inflasi yang tinggi dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Inflasi merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang kompleks, salah satunya adalah perbedaan antara jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa (Simanungkalit, 2020).

2.2.2 Teori Inflasi

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang teori inflasi yaitu:

1. Teori Keynes didalam jurnal (Novaldo Yanescha Putra, 2022) mengatakan bahwa masyarakat yang mempunyai keinginan yang kuat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya merupakan penyebab dari adanya inflasi proses dari inflasi itu sendiri dapat dijabarkan dari proses perebutan yang menargetkan struktur yang lebih besar dari kemampuan masyarakat yang tersedia. Dari proses ini muncul suatu kejadian yang disebut kesenjangan inflasi yang merupakan lebihnya jumlah yang tersedia dari masyarakat terhadap permintaan suatu barang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rencana pembelian suatu permintaan menjadi lebih efektif terhadap dana masyarakat. Apabila hal ini melebihi jumlah output yang tersedia dari banyaknya golongan masyarakat, maka akan

mengakibatkan harga akan naik (*inflationary gap*) akan meningkat.

2. Teori (Mankiw, 2018) mendefinisikan inflasi sebagai peningkatan yang stabil dalam keseluruhan biaya barang dan jasa. Menurut Mankiw, kenaikan harga tersebut tidak bersifat sementara, melainkan suatu proses berkelanjutan yang mempengaruhi seluruh barang dan jasa dalam perekonomian. Ia juga menjelaskan, inflasi dapat disebabkan oleh peningkatan permintaan (*demand-pull Inflation*) atau peningkatan biaya produksi (*cost push inflasi*).
3. Teori Sadono Sukirno ekonom Indonesia didalam jurnal (Silaban & Siagian, 2021) mengatakan inflasi adalah suatu proses dimana biaya umum cenderung meningkat seiring waktu dalam suatu perekonomian. Inflasi bukan sekedar kenaikan harga beberapa barang, namun kenaikan harga sebagian besar barang dan jasa dalam perekonomian, sehingga menurunkan daya beli uang.

2.2.3 Jenis Inflasi

Pada umumnya, inflasi dalam suatu negara dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan tingkat keparahan, penyebab terjadinya, dan asal usul inflasi. Penggolongan ini dikemukakan oleh Boediono dan Sinungan sebagaimana dijelaskan dalam Analisis Perilaku Inflasi Negara Indonesia: Tinjauan Historis Ekonomi dalam Pusaran Ekonomi Kerakyatan (2023).

1. Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya

Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dapat dibagi menjadi inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat dan hiperinflasi. Inflasi ringan ditandai dengan laju kenaikan harga dibawah 10 persen pertahun, inflasi sedang berada pada kisaran 10 persen hingga 30 persen pertahun, inflasi berat berada pada kisaran 30 persen hingga 100 persen pertahun dan hiperinflasi terjadi apabila laju inflasi melebihi 100 persen pertahun.

2. Berdasarkan penyebab awalnya

Inflasi dapat dibedakan menjadi *demand-pull inflation* dan *cost-push inflation*. *Demand-pull inflation* terjadi ketika permintaan barang dan jasa melebihi kapasitas produksi perekonomian, yang dapat disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran masyarakat, pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, maupun meningkatnya permintaan dari luar negeri. Sementara itu, *cost-push inflation* terjadi akibat meningkatnya biaya produksi, seperti kenaikan harga bahan baku, sarana produksi, atau tuntutan kenaikan upah tenaga kerja, yang kemudian mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Dalam praktiknya, kedua jenis inflasi ini jarang terjadi secara terpisah dan umumnya saling berkaitan.

3. Inflasi berdasarkan asal terjadinya

Berdasarkan asal terjadinya, inflasi dapat dibedakan menjadi inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri dapat terjadi akibat defisit anggaran belanja pemerintah yang dibiayai

dengan pencetakan uang baru, kegagalan panen, atau gangguan produksi lainnya yang menyebabkan jumlah barang dan jasa yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah permintaan masyarakat. Sementara itu, inflasi yang berasal dari luar negeri terjadi akibat kenaikan harga barang dan jasa di negara lain, khususnya di negara-negara mitra dagang.

Kenaikan harga barang impor dapat meningkatkan biaya hidup di dalam negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peningkatan biaya produksi dan harga jual barang dan jasa domestik.

2.2.4 Indikator Inflasi

Menurut (Silitonga, 2021) terdapat empat indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama satu periode tertentu yaitu:

1. Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index*)
2. Indeks Harga Perdagangan Besar (*Wholesale Price Index*)
3. Indeks Harga Implisit (GDP Deflator)
4. Alternatif dari Indeks Harga Implisit

Indeks harga konsumen (IHK) adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. Masing-masing harga

barang dan jasa tersebut diberi bobot (*weighed*) berdasarkan tingkat keutamaannya. (Kusumadewi et al., 2023) berpendapat bahwa indeks harga konsumen (IHK) mengukur harga keranjang perwakilan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen rata-rata dan dihitung atas dasar survei periodik harga konsumen. Perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa.

Indeks harga perdagangan besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen. IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi. Indeks Harga Implisit (*GDP Deflator*) dianggap menggambarkan inflasi yang paling mewakili keadaan sebenarnya. Angka deflator didasarkan pada harga yang berlaku dan konstan. Alternatif dari indeks harga Implisit digunakan jika pada saat menghitung inflasi dengan menggunakan Indeks Harga Implisit (IHI) tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data. Karena prinsip dasar perhitungan inflasi berdasarkan deflator PDB (*GDP deflator*) adalah membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan riil maka bisa di atasi dengan menghitung selisih keduanya.

2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.3.1 Definisi Indeks Pembangunan Manusia

Menurut *United Nation Development Programme* (UNDP), pembangunan manusia di titik beratkan pada persoalan perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan

bermartabat. Konsep pembangunan manusia memiliki perbedaan dengan konsep pembangunan klasik yang fokus utamanya adalah pertumbuhan ekonomi. Untuk menjamin tercapainya tujuan konsep pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan. Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan (Aprilianti & Harken, 2021).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah metrik yang banyak digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan manusia secara keseluruhan di berbagai negara. Hal ini memperhitungkan faktor-faktor kunci seperti harapan hidup, tingkat melek huruf, pencapaian pendidikan, dan kondisi kehidupan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai alat untuk menilai klasifikasi suatu negara menjadi maju, berkembang, atau terbelakang. Kualitas sumber daya juga merupakan salah satu faktor penentu tingkat kemiskinan dengan diukur melalui pemanfaatan indikator, seperti indeks kualitas hidup (Permana & Pasaribu, 2023).

2.3.2 Teori Indeks Pembangunan Manusia

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang teori-teori Indeks Pembangunan Manusia yaitu:

1. Teori modal manusia (*human capital theory*) (Becker, 1993) menyatakan bahwa pendidikan adalah salah satu bentuk investasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan individu maupun masyarakat. Pendidikan dapat

memberikan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang berguna bagi individu untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi dalam pembangunan. Teori ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara rata-rata lama sekolah, salah satu komponen IPM, dengan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesehatan.

2. Teori kesenjangan (*gap theory*). Teori ini menyatakan bahwa pendidikan adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi ketimpangan sosial ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat. Pendidikan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi individu untuk mengakses sumber daya, informasi, dan jaringan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan mobilitas sosial. Teori ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara rata-rata lama sekolah dengan tingkat ketimpangan pendapatan, gender, dan wilayah.
3. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*). Teori ini menyatakan bahwa pendidikan adalah salah satu pilihan yang dibuat oleh individu berdasarkan pertimbangan biaya dan manfaat. Individu akan memilih untuk melanjutkan atau menghentikan pendidikan sesuai dengan harapan dan preferensi mereka terhadap hasil pendidikan. Teori ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan individu untuk

bersekolah, seperti tingkat bunga, tingkat pengembalian, tingkat pengangguran, ketersediaan beasiswa, dan kualitas layanan Pendidikan (Meilinna et al., 2023).

2.3.3 Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai pencapaian pembangunan manusia di suatu negara. IPM mengintegrasikan berbagai aspek kesejahteraan manusia dengan tujuan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kualitas hidup masyarakat. Menurut (Efendi et al., 2024) salah satu komponen utama IPM adalah Harapan Hidup saat Lahir. Komponen ini menunjukkan rata-rata usia yang diharapkan akan dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir, dengan asumsi tingkat kematian pada berbagai kelompok umur tetap konstan selama periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai kondisi kesehatan serta kualitas layanan kesehatan di suatu negara. Semakin tinggi harapan hidup, umumnya mencerminkan sistem kesehatan yang lebih baik dan kondisi kehidupan masyarakat yang lebih layak.

1. Pendidikan

a. Harapan Pendidikan

Rata-rata tahun yang diharapkan seorang anak usia sekolah akan bersekolah sepanjang hidupnya. Ini mencerminkan akses dan kesempatan pendidikan di negara tersebut. Hal ini

bertujuan untuk mengukur potensi akses pendidikan di masa depan bagi anak-anak dan remaja.

b. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama tahun pendidikan yang telah diterima oleh penduduk dewasa (usia 25 tahun ke atas). Ini mengukur pencapaian pendidikan nyata di kalangan orang dewasa. Hal ini bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian pendidikan yang sebenarnya di masyarakat dan kualitas sistem pendidikan yang ada.

c. Pendapatan

Diukur menggunakan *Gross National Income* (GNI) perkapita yang disesuaikan dengan kapasitas daya beli, memberikan gambaran tentang rata-rata pendapatan yang diterima oleh individu di negara tersebut. Bertujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran ekonomi dan kapasitas individu untuk mendapatkan barang dan jasa.

2.3.4 Prinsip-Prinsip Indeks Pembangunan Manusia

Empat hal prinsip-prinsip dalam Indeks Pembangunan Manusia menurut (Sari et al., 2020).

1) Produktivitas

Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah.

2) Pemerataan

Penduduk harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3) Kestinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan harus selalu diperbaharui.

4) Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses Pembangunan.

2.3.5 Indikator Indeks Pembangunan Manusia

IPM mengukur keberhasilan pembangunan manusia melalui beberapa indikator yang mencerminkan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Berdasarkan literatur, indikator yang dapat digunakan antara lain:

1. Indikator Moneter

a. Pendapatan

Menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pendapatan per kapita menggambarkan standar hidup dan daya beli penduduk, yang berpengaruh terhadap kemampuan mereka menghadapi inflasi dan risiko kemiskinan

2. Indikator Non-Moneter

a. Kesehatan (Harapan hidup saat lahir)

Harapan hidup menunjukkan rata-rata usia yang diharapkan dicapai bayi yang baru lahir, dengan asumsi tingkat kematian tetap konstan. Indikator ini mencerminkan kualitas sistem kesehatan dan kondisi kehidupan masyarakat.

b. Pendidikan

Pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah dan tingkat melek huruf. Pendidikan menunjukkan kemampuan masyarakat memperoleh pengetahuan dan mendukung produktivitas.

3. Indikator Campuran (Opsional untuk mendukung)

a. Konsumsi per kapita (dari susenas inti)

Menunjukkan pola konsumsi masyarakat dan standar hidup.

b. Fasilitas dasar (air bersih, listrik, sanitasi)

2.4 pengangguran

2.4.1 Teori Pengangguran

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang pengangguran di Indonesia yaitu:

1. Menurut (Keynes, 2018) Teori pengangguran menjelaskan bahwa pengangguran terjadi akibat rendahnya permintaan agregat dalam perekonomian. Rendahnya permintaan menyebabkan perusahaan mengurangi produksi sehingga penyerapan tenaga kerja menurun. Dalam pandangan Keynes, pengangguran bukan disebabkan oleh kekakuan upah, melainkan oleh kurangnya permintaan efektif, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk mendorong permintaan agregat dan meningkatkan kesempatan kerja.
2. Menurut (Sukirno, 2014) pengangguran merupakan bagian dari tenaga kerja dalam suatu perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan namun belum berhasil memperolehnya. Pengangguran menjadi salah satu permasalahan utama dalam perekonomian karena dapat menurunkan produktivitas masyarakat serta mengurangi tingkat pendapatan, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan kemiskinan dan memunculkan berbagai masalah sosial lainnya. Dari tahun ke tahun, tingkat pengangguran cenderung mengalami peningkatan sehingga menjadi tantangan serius bagi pemerintah Indonesia. Salah satu indikator keberhasilan

pembangunan adalah kemampuan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan serta mengurangi tingkat pengangguran secara signifikan (Lutfi Handayani, Sudjiono, 2021).

2.4.2 Jenis-Jenis Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi yang penting untuk dianalisis karena dapat berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya. Menurut Sukirno (2008), didalam jurnal (Kusumadewi et al., 2023) pengangguran dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebab dan ciri-cirinya.

A. Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya:

1. Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional terjadi ketika individu berpindah pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan baru yang lebih sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Pengangguran ini bersifat sementara dan wajar dalam perekonomian karena mencerminkan pergerakan tenaga kerja antar sektor atau perusahaan.

2. Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal muncul akibat fluktuasi dalam kegiatan ekonomi. Ketika ekonomi mengalami resesi atau penurunan aktivitas produksi, perusahaan cenderung mengurangi jumlah pekerja sehingga terjadi peningkatan

pengangguran. Sebaliknya, saat ekonomi membaik, pengangguran jenis ini akan menurun.

3. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural disebabkan oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang menyebabkan ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja. Misalnya, peralihan dari sektor pertanian ke sektor industri atau teknologi yang membutuhkan keterampilan baru sehingga beberapa pekerja menjadi tidak terserap.

4. Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi terjadi ketika tenaga kerja digantikan oleh kemajuan teknologi dan otomatisasi. Mesin atau teknologi baru dapat menggantikan pekerjaan manusia, sehingga beberapa pekerja kehilangan pekerjaan karena kemampuan mereka tidak lagi dibutuhkan.

B. Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya

1. Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman terjadi karena adanya pekerjaan yang hanya tersedia pada waktu tertentu dalam setahun. Contohnya adalah pekerja di sektor pertanian atau pariwisata yang pekerjaannya utamanya tergantung musim.

2. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah keadaan di mana individu tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan secara aktif mencari pekerjaan. Jenis pengangguran ini paling mudah

diidentifikasi dan menjadi indikator penting dalam pengukuran tingkat pengangguran di suatu negara.

3. Pengangguran Tersembunyi (Terselubung)

Pengangguran tersembunyi terjadi ketika tenaga kerja sebenarnya bekerja tetapi tidak produktif sepenuhnya, misalnya bekerja kurang dari jam kerja normal atau bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan kemampuan. Pengangguran ini sulit diukur karena pekerja tetap menerima upah meski produktivitasnya rendah.

4. Pengangguran setengah gangguan

Jenis ketegangan ini terjadi ketika tenaga kerja bekerja kurang dari jam kerja normal dan ingin bekerja lebih banyak. Hal ini biasanya terjadi pada pekerjaan paruh waktu atau pekerjaan dengan jam kerja tidak tetap.

2.4.3 Faktor-faktor penyebab pengangguran

Penyebab pribadi dari pengangguran mencakup kemalasan, faktor disabilitas atau usia, serta rendahnya tingkat pendidikan dan kualifikasi. Namun menurut (Frisnoiry, Sihotang, et al., 2024) Di Indonesia, beberapa faktor yang menyebabkan angka pengangguran yaitu:

- a. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Hal ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara pasokan dan permintaan

tenaga kerja, menyebabkan sulitnya para pencari kerja untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan minat mereka.

- b. Kurangnya keahlian atau keterampilan menjadi penyebab utama meningkatnya pengangguran. Banyak sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- c. Kurangnya informasi tentang perusahaan dan lapangan pekerjaan membuat pencari kerja kesulitan dalam mencari peluang kerja yang sesuai.
- d. Ketidakmerataan lapangan pekerjaan antara kota dan daerah menyebabkan sebagian wilayah mengalami kesulitan dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai.
- e. Kurangnya Pelatihan: Upaya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan soft skill seringkali belum optimal. Budaya malas dan kurangnya motivasi juga dapat menghambat pencari kerja dalam mencari pekerjaan

2.4.4 Indikator Pengangguran

Indikator pengangguran sangat penting dalam menganalisis kemiskinan, karena tingginya tingkat pengangguran biasanya berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Pengangguran mengurangi pendapatan rumah tangga, sehingga kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar menurun yang akan berdampak terhadap jumlah angka kemiskinan. Menurut

BPS tingkat pengangguran dapat dijelaskan melalui 3 indikator utama yaitu:

1. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi secara aktif mencari pekerjaan terhadap total angkatan kerja. TPT menjadi indikator utama untuk menilai tingkat pengangguran di suatu wilayah.

2. TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)

(TPAK) untuk melihat persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau secara aktif mencari pekerjaan terhadap total penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan seberapa besar proporsi penduduk usia produktif yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja maupun mencari kerja.

2.5 Ketimpangan Pendapatan

2.5.1 Pengertian Ketimpangan Pendapatan

Menurut (Biewen & Flachaire, 2018), ketimpangan pendapatan mencerminkan ketidakseimbangan distribusi pendapatan antarindividu dalam suatu perekonomian yang dipengaruhi oleh struktur pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran, serta perbedaan akses terhadap faktor produksi. Buku *Econometrics and Income Inequality* menekankan bahwa kondisi pengangguran yang tinggi dapat memperlebar ketimpangan melalui penurunan daya tawar tenaga kerja dan konsentrasi pendapatan pada kelompok tertentu.

2.5.2 Teori Ketimpangan Pendapatan

Menurut (Kuznets, 1955) mengemukakan hipotesis bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan berbentuk kurva U terbalik. Pada tahap awal pembangunan, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat akibat pergeseran struktur ekonomi dari sektor tradisional ke sektor modern. Namun, seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita dan meluasnya kesempatan kerja, ketimpangan pendapatan akan menurun. Teori ini menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan fenomena transisi dalam proses pembangunan ekonomi, meskipun dalam praktiknya tidak semua wilayah mengikuti pola tersebut secara sempurna.

2.5.3 Indikator Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat (Todaro, 2003). Akibatnya yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Menurut (Fathoni, 2023) distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara dikalangan penduduknya. Terdapat berbagai kriteria atau tolok ukur untuk menilai pemerataan distribusi pendapatan atau indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan diantaranya yaitu:

1. Rasio Gini

Koefisien Gini adalah parameter yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Koefisien yang semakin mendekati 0 berarti distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya koefisien yang semakin mendekati 1 berarti distribusi pendapatan semakin timpang. Jadi koefisien Gini yang rendah mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan semakin merata, sebaliknya semakin besar koefisien Gini mengindikasikan distribusi yang semakin timpang (senjang) antar kelompok penerima pendapatan. Secara ekstrim diartikan bahwa koefisien Gini sebesar 0 berarti terdapat pemerataan sempurna (setiap orang memperoleh pendapatan yang sama persis) dan koefisien Gini sebesar 1 menunjukkan ketidakmerataan sempurna (di mana satu orang memiliki atau menguasai seluruh pendapatan totalnya, sementara lainnya tidak memperoleh pendapatan sama sekali). Adapun kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini menurut (Todaro & Smith, 2020) adalah lebih dari 0,5 adalah tingkat ketimpangan tinggi; antara 0,35 - 0,5 adalah tingkat ketimpangan sedang, kurang dari 0,35 adalah tingkat ketimpangan rendah.

2. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz, adalah kurva yang menggambarkan fungsi distribusi pendapatan kumulatif. Kurva ini terletak disebuah bujur sangkar yang disisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi dasarnya

mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata.

3. Distribusi Pendapatan

Menurut (Kaldor, 1955) ada dua kelompok dalam masyarakat, yaitu kelompok kapitalis dan kelompok buruh. Masing-masing kelompok mempunyai *propensity to save* (s) yang berbeda: s_p untuk kelompok kapitalis dan s_w untuk kelompok buruh, dan kita anggap bahwa $s_p > s_w$ (sebenarnya penentuan kelompok ini tidaklah harus antara golongan kapitalis dan buruh seperti yang dilakukan oleh Kaldor, tetapi bisa berdasarkan ciri-ciri sosio ekonomis yang lain, misalnya, kelompok penduduk perkotaan dan kelompok penduduk pedesaan atau kelompok sektor industri dan kelompok sektor pertanian dan sebagainya).

2.6 Hubungan Antar Variabel

Hubungan antar variabel adalah keterkaitan atau ketergantungan antara dua atau lebih variabel dalam suatu penelitian, di mana perubahan pada satu variabel diharapkan berkaitan secara sistematis dengan perubahan pada variabel lainnya. Dengan kata

lain, memahami hubungan antar variabel membantu peneliti menjawab pertanyaan “apakah dan bagaimana variabel variabel tersebut saling memengaruhi” dalam kerangka hipotesis atau teori yang diuji (Sugiyono, 2022).

2.6.1 Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia

Inflasi, yaitu kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus yang memiliki dampak langsung terhadap daya beli Masyarakat, khususnya kelompok miskin. Ketika harga kebutuhan pokok seperti makanan, energi, dan transportasi meningkat, masyarakat miskin yang sebagian besar pendapatannya digunakan untuk kebutuhan dasar akan merasakan dampaknya secara lebih besar. Hal ini ditegaskan oleh (Todaro & Smith, 2020) yang menyatakan bahwa inflasi yang tinggi tanpa diikuti peningkatan pendapatan riil akan menurunkan taraf hidup masyarakat miskin dan berpotensi memperburuk tingkat kemiskinan.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian (Sari et al., 2020) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan, di mana peningkatan inflasi mendorong kenaikan harga barang dan jasa sehingga menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Namun demikian, hasil penelitian (Qarina, 2022) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, yang mengindikasikan bahwa efek inflasi terhadap kemiskinan bisa dipengaruhi oleh kemampuan rumah tangga dalam menyesuaikan konsumsi serta kebijakan pemerintah. Hasil yang

lebih tegas ditunjukkan oleh penelitian (Padambo et al., 2021) yang menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan karena meningkatnya harga barang dan jasa secara umum menurunkan daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Penelitian (Anwar, 2023) juga menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia sepanjang periode 1991-2021.

2.6.2 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia

Menurut Todaro dan Smith (2009) didalam jurnal (Sri Utami Nurhasanah & Sarah Fitriyani, 2024) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mengukur pencapaian pembangunan sosial dan ekonomi melalui tiga dimensi utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan. IPM dikembangkan sebagai kritik terhadap penggunaan pendapatan per kapita sebagai satu-satunya ukuran kemakmuran, karena kemakmuran masyarakat tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia. Dengan memasukkan aspek pendidikan dan kesehatan, IPM mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam kaitannya dengan kemiskinan, IPM berperan penting karena setiap dimensinya secara langsung memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan IPM berkorelasi negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Kasmiasi et al., 2021). Peningkatan kualitas pendidikan meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja sehingga memperluas peluang kerja dan pendapatan, sementara perbaikan kesehatan meningkatkan daya tahan dan partisipasi ekonomi masyarakat. Selain itu, peningkatan standar hidup yang tercermin dalam daya beli memperkuat kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Temuan empiris di berbagai wilayah Indonesia, seperti provinsi Papua (Indrawati et al., 2020), Pulau Sumatera (Kasih & Yefriza, 2025), dan Provinsi Jawa Timur (A. N. Putri et al., 2023), secara konsisten menunjukkan bahwa peningkatan IPM berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

2.6.3 Hubungan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia

Tingkat pengangguran merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Pengangguran menyebabkan individu tidak memiliki pendapatan atau mengalami penurunan pendapatan, sehingga kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar menjadi terbatas dan meningkatkan risiko jatuh ke dalam kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin besar kemungkinan meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Penjelasan tersebut sejalan dengan penelitian (June & Arianto, 2025) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, karena meningkatnya jumlah pengangguran menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat sehingga kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar menjadi terbatas, terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan pekerja sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil. Temuan ini juga didukung oleh penelitian (Romandhon et al., 2024) yang menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sehingga mencerminkan pentingnya kondisi pasar kerja dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian (Aryanti & Sukardi, 2024) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia karena adanya dukungan pendapatan dari anggota rumah tangga lain serta dominasi pengangguran usia produktif yang masih berada dalam jenjang pendidikan atau baru lulus, sehingga belum secara langsung meningkatkan kemiskinan. Selain itu, penelitian (Septiani, 2026) juga menemukan bahwa pengangguran belum terbukti mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia selama periode 2015–2024 karena fenomena *working poor*, di mana tidak hanya ketiadaan pekerjaan tetapi juga rendahnya kualitas pekerjaan berkontribusi pada kerentanan ekonomi rumah tangga

2.6.4 Hubungan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia

Ketimpangan pendapatan menunjukkan kondisi di mana distribusi pendapatan antarindividu atau antarkelompok masyarakat

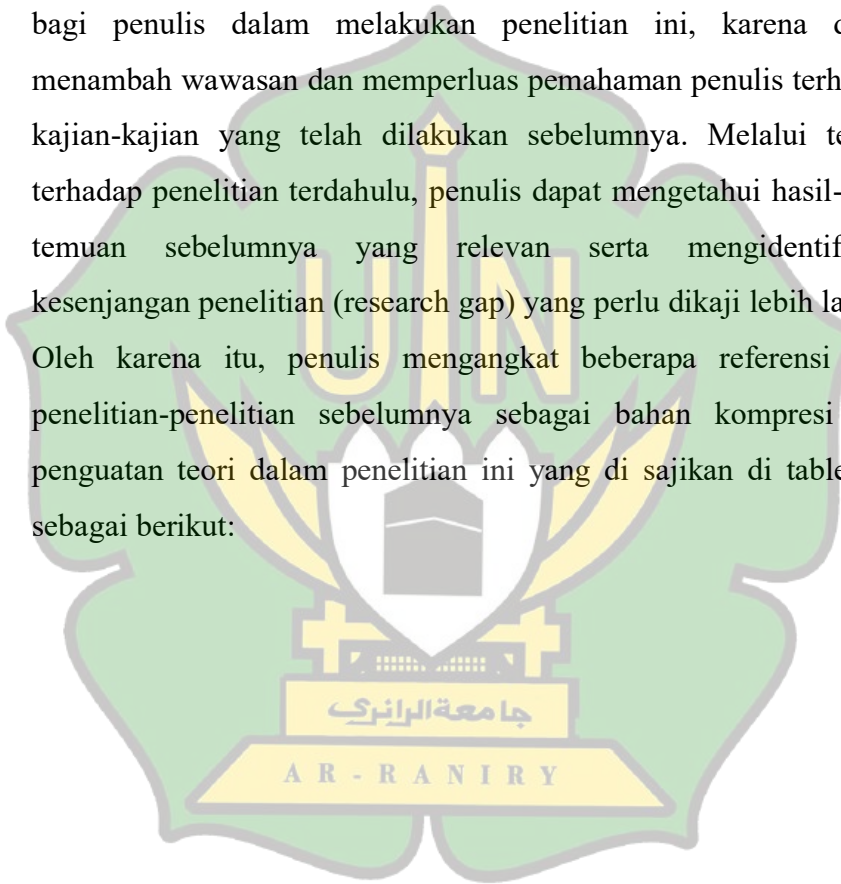
tidak merata. Dalam kondisi ketimpangan yang tinggi, sebagian besar pendapatan dan sumber daya ekonomi cenderung dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, sementara kelompok berpendapatan rendah hanya memperoleh bagian yang sangat terbatas. Ketidakeimbangan distribusi pendapatan tersebut menyebabkan masyarakat miskin mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan kerja yang layak, sehingga menghambat peningkatan kesejahteraan mereka.

Lebih lanjut, ketimpangan pendapatan dapat melemahkan efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan tingkat kemiskinan. (Astuty et al., 2025) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan pemerataan pendapatan cenderung bersifat *non-pro-poor growth*, yaitu pertumbuhan yang manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah dan atas. Akibatnya, peningkatan output ekonomi tidak secara langsung berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan karena kelompok masyarakat miskin tidak memperoleh manfaat yang signifikan dari proses pertumbuhan tersebut. Selain itu, penelitian (Siburian et al., 2024) menemukan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, di mana semakin tinggi ketimpangan mengarah pada meningkatnya jumlah penduduk miskin. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa penurunan ketimpangan pendapatan merupakan faktor penting

dalam upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan di Indonesia

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penting bagi penulis dalam melakukan penelitian ini, karena dapat menambah wawasan dan memperluas pemahaman penulis terhadap kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui telaah terhadap penelitian terdahulu, penulis dapat mengetahui hasil-hasil temuan sebelumnya yang relevan serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis mengangkat beberapa referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan kompresi dan penguatan teori dalam penelitian ini yang di sajikan di table 2.1 sebagai berikut:



Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Sebelumnya

No	Nama, Judul dan Tahun	Metodologi Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	(Septiani, 2026) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan di Indonesia	Menggunakan analisis data panel	IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.	Meneliti variabel Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan ketimpangan pendapatan terhadap Kemiskinan	Meneliti variabel Inflasi.
2.	(Aking & Padmono, 2025) Pengaruh Gini Ratio dan Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan	Menggunakan analisis data panel	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap Kemiskinan	Meneliti variabel Indeks Pembangunan Manusia dan gini ratio terhadap Kemiskinan	Meneliti variabel Inflasi, Tingkat Pengangguran

3.	(Romandhon et al., 2024) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengangguran, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2013 Sampai 2021)	Menggunakan analisis data Panel.	Inflasi Berpengaruh positif terhadap kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2021.	Meneliti variabel Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran. Menggunakan analisis data Panel	Meneliti variabel Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia.
4.	(Aryanti & Sukardi, 2024) Pengangguran, Pendidikan, Kesehatan, dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan di Indonesia	Menggunakan analisis data Panel.	variabel pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. variabel ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan	Meneliti variabel Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan. Menggunakan	Meneliti variabel Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia.

			signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	analisis regresi data panel	
5.	(Fitri Ani Dwi Lusiana et al., 2024) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2014-2023	Menggunakan analisis data <i>Time Series</i>	Inflasi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Tingkat pengangguran menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan	Meneliti variabel Inflasi dan Pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia.	Meneliti variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Ketimpangan Pendapatan . Menggunakan analisis regresi data panel
6.	(Anwar, 2023) Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia	Menggunakan analisis data <i>Time Series</i>	Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia	Meneliti variabel Inflasi terhadap Kemiskinan di Indonesia	Meneliti variabel Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran dan Ketimpangan Pendapatan . Menggunakan analisis data panel

7.	(Feronika, 2023) Pengaruh Pengangguran dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Indonesia.	Menggunakan analisis regresi data <i>Time Series</i>	Variabel Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Variabel pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.	Meneliti variabel Inflasi dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia.	Meneliti variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Ketimpangan Pendapatan. Menggunakan analisis data panel.
8.	(Azriyansyah, 2022) Analisis Pengaruh Ipm, PDRB Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Periode Tahun 2017-2021	Menggunakan analisis regresi data Panel	Variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Kemiskinan di Indonesia periode Tahun 2017-2021. Pengangguran menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan di Indonesia 2017-2021.	Meneliti variabel Ipm dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia.	Meneliti variabel PDRB.

9.	(Qarina, 2022) Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah, pengangguran, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia 2005-2021	Menggunakan analisis regresi data Time Series	Tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Inflasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.	Meneliti variabel Tingkat Pengangguran dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Indonesia.	Meneliti variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Ketimpangan Pendapatan. Menggunakan analisis data panel.
10.	(Padambo et al., 2021) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan indeks pembangunan Manusia terhadap kemiskinan Indonesia di provinsi Sulawesi Selatan.	Menggunakan analisis regresi data Time Series	Variabel Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Indeks Pembangunan manusia berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan.	Meneliti variabel Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan	Meneliti variabel Tingkat Pengangguran dan Ketimpangan Pendapatan. Menggunakan analisis data panel.

2.8 Kerangka Berfikir

Menurut (Sugiyono, 2022) Model kerangka berpikir adalah gambaran berpikir yang disusun oleh peneliti berdasarkan teori-teori

yang relevan dan logika yang masuk akal, untuk menjelaskan bagaimana hubungan antarvariabel dalam suatu penelitian yang akan saling mempengaruhi.

Berdasarkan kajian teori, penelitian ini menelaah pengaruh Inflasi (X1), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X2), Tingkat Pengangguran (X3) dan Ketimpangan Pendapatan (X4) sebagai variabel bebas terhadap Kemiskinan di Indonesia sebagai variabel terikat (Y). Berdasarkan temuan teori dan penelitian sebelumnya, variabel bebas tersebut diduga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, baik secara parsial maupun simultan.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan antar variabel.

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir



2.9 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian yang telah di jelaskan di atas, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. H_{01} : Inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
 H_{a1} : Inflasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
- b. H_{02} : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesia
 H_{a2} : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
- c. H_{03} : Tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
 H_{a3} : Tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
- d. H_{04} : Ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
 H_{a4} : Ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
- e. H_{05} : Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, dan ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

H_{a5}: Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, dan ketimpangan pendapatan secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2022) penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian yang terstruktur serta analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik. Pendekatan ini tidak hanya digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat antarvariabel, tetapi juga untuk mengukur dan menggambarkan fenomena secara objektif, menguji teori dan hipotesis yang telah dirumuskan, serta mengetahui kekuatan dan arah hubungan antarvariabel. Selain itu, pendekatan kuantitatif memungkinkan hasil penelitian digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan terhadap populasi penelitian berdasarkan data empiris yang terukur.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Penelitian kuantitatif asosiatif bertujuan untuk menganalisis hubungan antarvariabel, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengetahui sejauh mana variabel kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh variabel inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel, yaitu gabungan antara data *cross-section* dan data *time series*. Data *cross-section* mencakup 34 provinsi di Indonesia, sedangkan data *time series* meliputi periode pengamatan selama tahun 2015-2024. Dengan periode pengamatan selama 10 tahun, jumlah observasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 340 observasi. Penggunaan data panel memungkinkan peneliti untuk menganalisis perbedaan dari waktu ke waktu. Seluruh data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan perangkat lunak EViews.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai informasi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan telah tersedia sebelumnya, sehingga tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti dari responden atau objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen, literatur, laporan resmi, publikasi ilmiah, serta data statistik yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, seperti instansi pemerintah atau lembaga penelitian. Dalam penelitian ini, seluruh variabel penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga resmi penyedia data statistik nasional. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena secara sistematis dan objektif tanpa melakukan pengumpulan data langsung di lapangan.

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Terikat(Dependen)

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kemiskinan (Y). Menurut (Sugiyono, 2022) variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain (variabel independen). Dengan kata lain, variabel dependen merupakan hasil atau fenomena yang ingin dijelaskan oleh peneliti dalam penelitiannya.

3.3.2 Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas atau yang biasa disebut dengan variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi atau memberi perubahan pada variabel lain. Variabel bebas digunakan untuk melihat bagaimana efeknya terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan yaitu inflasi (X1), indeks pembangunan manusia (X2) tingkat pengangguran (X3) dan ketimpangan pendapatan(X4).

3.4 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1
Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Sumber	Satuan
1.	Kemiskinan (Y)	Kondisi dimana penduduk memiliki pengeluaran dibawah garis kemiskinan nasional yang diukur melalui presentase penduduk miskin	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen (%)
2.	Inflasi (X1)	Inflasi merupakan kenaikan harga kelompok secara umum dan berkelanjutan, yang diukur melalui laju inflasi tahunan kelompok makanan, minuman, dan tembakau berdasarkan Harga Konsumen (IHK).	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen (%)
3.	Indeks Pembangunan Manusia (X2)	IPM adalah indikator komposit yang menggambarkan capaian pembangunan manusia yang diukur melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Skor
4.	Tingkat Pengangguran(X3)	Pengangguran adalah kondisi penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari Pekerjaan, yang diukur melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).	Badan Pusat Statistik (BPS)	Persen (%)

5.	Ketimpangan Pendapatan (X4)	Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi ketidakmerataan distribusi pendapatan antarindividu atau antarkelompok masyarakat yang diukur menggunakan Koefisien (Gini Ratio).	Badan Pusat Statistik (BPS)	Rasio
----	-----------------------------	--	-----------------------------	-------

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel, Dalam analisis regresi data panel, terdapat tiga pendekatan utama yang dapat digunakan untuk mengestimasi model, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik antar unit cross-section serta hubungan antara efek individual dengan variabel independen dalam model penelitian. Pemilihan pendekatan regresi data panel yang tepat sangat penting karena setiap model memiliki asumsi yang berbeda. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ketiga pendekatan tersebut diestimasi dan dibandingkan untuk memperoleh model yang paling sesuai dalam menjelaskan pengaruh inflasi, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2015-2024.

Secara matematis, model regresi data panel dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$KMS_{it} = \alpha + \beta_1 INF_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 GINI_{it} + \varepsilon_{it}$$

KMS_{it} = Tingkat kemiskinan (%)

INF_{it} = Inflasi (%)

IPM_{it} = Indeks Pembangunan Manusia (Skor)

TPT_{it} = Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

$GINI_{it}$ = Rasio Gini (Rasio)

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien regresi

i = Provinsi

t = Tahun

ε_{it} = Error term

Dalam penelitian ini, seluruh variabel ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (Ln) karena memiliki satuan pengukuran yang berbeda-beda, yaitu tingkat kemiskinan, inflasi, dan tingkat pengangguran terbuka yang diukur dalam bentuk persentase, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dalam bentuk skor, serta ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan rasio. Perbedaan satuan pengukuran tersebut

berpotensi menimbulkan perbedaan skala data yang dapat memengaruhi hasil estimasi regresi. Oleh karena itu, transformasi logaritma natural digunakan untuk menyeragamkan skala data, menyederhanakan rentang nilai, mengurangi pengaruh pencilan (outlier), serta membantu data menjadi lebih mendekati distribusi normal sehingga dapat memenuhi asumsi klasik regresi data panel, khususnya asumsi normalitas dan homoskedastisitas. Selain itu, penggunaan model logaritma natural memungkinkan koefisien regresi yang dihasilkan dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas, yaitu persentase perubahan tingkat kemiskinan akibat perubahan persentase pada masing-masing variabel independen dengan asumsi variabel lain bersifat konstan.

Model ini selanjutnya akan diestimasi menggunakan pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier.

$$KMS_{it} = \alpha + \beta_1 INF_{it} + \beta_2 \ln(IPM_{it}) + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 GINI_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- KMS_{it} = Tingkat kemiskinan (%)
- INF_{it} = Inflasi (%)
- $\ln(IPM_{it})$ = logaritma natural Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Skor)

- TPT_{it} = Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
- $GINI_{it}$ = Ketimpangan Pendapatan (Rasio)
- α = konstanta.
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3,$ dan β_4 = Koefisien regresi
- i = Provinsi
- t = Tahun
- ε_{it} = Error term.

3.4.1 Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model atau dikenal juga dengan Pooled Least Square (PLS) merupakan pendekatan yang paling sederhana dalam analisis regresi data panel. Model ini mengasumsikan bahwa tidak ada perbedaan karakteristik antara unit cross-section maupun antar waktu, sehingga seluruh data dianggap homogen dan perilaku tiap individu/unit dianggap sama dalam setiap periode waktu. Oleh karena itu, dalam model ini tidak diperhitungkan adanya efek waktu (*time effect*) maupun efek individu (*individual effect*). Model ini menggabungkan data cross section dan time series dalam satu bentuk kumpulan data (pooling data), dan metode estimasinya dilakukan menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau metode kuadrat terkecil.

3.4.2 Fixed Effect Model (FEM)

Fixed Effect Model merupakan metode regresi data panel yang mengasumsikan adanya perbedaan karakteristik antar individu yang bersifat tetap (time invariant). Perbedaan tersebut diakomodasi melalui perbedaan nilai intersep pada masing-masing unit cross-section. Dalam model ini, setiap individu dianggap memiliki karakteristik khusus yang tidak dapat diamati secara langsung namun memengaruhi variabel dependen.

Estimasi pada Fixed Effect Model dilakukan dengan menggunakan teknik variabel dummy, di mana setiap unit cross-section direpresentasikan oleh parameter yang berbeda. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menangkap efek spesifik dari masing-masing individu secara lebih akurat. Selain digunakan untuk mengestimasi efek spesifik antar individu, Fixed Effect Model juga dapat mengakomodasi pengaruh waktu yang bersifat sistematis (time fixed effect), sehingga model ini mampu menjelaskan variasi data yang dipengaruhi oleh perbedaan individu maupun perubahan dari waktu ke waktu.

3.4.3 Random Effect Model (REM)

Random Effect Model merupakan pendekatan dalam analisis data panel yang mengakomodasi kemungkinan adanya korelasi antar error terms baik dalam dimensi waktu maupun antar individu. Dalam model ini, variasi intersep antar unit analisis diasumsikan sebagai bagian dari komponen error secara acak. Salah satu keunggulan dari

penggunaan REM adalah kemampuannya dalam mengatasi masalah heteroskedastisitas. Maka dari itu, model ini sering juga dikenal sebagai Error Component Model (ECM) atau diestimasi menggunakan metode Generalized Least Square (GLS). (Widarjono, 2018) dalam bukunya menyatakan bahwa dalam menentukan model estimasi yang paling tepat antara ketiga data tersebut, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Uji Likelihood Test Ratio (Chow Test)

Uji chow dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana model yang terbaik antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas (p) untuk Cross-Section F. Jika nilai $p > 0,05$ maka model yang terpilih adalah Common Effect Model. Tetapi jika $p < 0,05$ maka model yang dipilih adalah Fixed Effect Model.

2. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana model yang terbaik antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas (p) untuk Cross-Section Random, Jika nilai $p > 0,05$ maka model yang terpilih adalah Random Effect Model. Tetapi jika $p < 0,05$ maka model yang dipilih adalah Fixed Effect Model.

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk membandingkan atau memilih mana model yang terbaik antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Apabila nilai cross section bagian Breusch-Pagan $\leq 5\%$ (0.05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jika nilai cross section Breusch-Pagan $\geq 0,05$ (5%) maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti apabila cross section Breusch-Pagan $< 0,05$, maka Random Effect Model lebih tepat digunakan dan apabila cross section Breusch-Pagan $> 0,05$ lebih tepat menggunakan Common Effect Model

3.6 Uji Asumsi Klasik

3.6.1 Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk memeriksa korelasi potensial di antara variabel independen dalam model regresi. Agar model regresi valid, model tersebut tidak boleh menunjukkan multikolinearitas di antara prediktornya (Widarjono, 2018)

- a. Multikolinearitas teridentifikasi ketika nilai tolerance kurang dari atau sama dengan 0,10 dan Variance Inflation Factor (VIF) melebihi atau sama dengan 10.
- b. Sebaliknya, multikolinearitas tidak ada jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10.

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas mengevaluasi apakah terdapat ketidakkonsistenan dalam varians residual di seluruh observasi dalam model regresi. Homoskedastisitas, yang menunjukkan varians konstan, merupakan atribut yang diinginkan untuk model regresi yang andal. Penelitian ini menggunakan uji Spearman untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam kondisi berikut:

- a. Terjadi heteroskedastisitas jika nilai sig. (2-tailed) $< 0,05$
- b. Tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai sig.(2-tailed) $> 0,05$

3.7 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam suatu model regresi. Untuk menguji hubungan tersebut, digunakan beberapa metode statistik, yakni uji t (untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial), uji F (untuk menguji pengaruh simultan), dan uji koefisien determinasi R^2 (untuk mengetahui kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen) sebagaimana dikemukakan oleh (Widarjono, 2018).

3.7.1 Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengevaluasi apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5% (0,05). Tujuan uji ini adalah mengukur

signifikansi setiap variabel bebas dalam menjelaskan perubahan pada variabel terikat (Widarjono, 2018).

- a. Jika nilai signifikansi (Sig.) kurang dari 0,05 atau t hitung lebih besar dari t tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau t hitung lebih kecil dari t tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Ini berarti variabel independen tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

3.7.2 Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel dependen. Uji ini digunakan untuk menilai signifikansi model secara keseluruhan (Widarjono, 2018) dan biasanya diterapkan pada tingkat signifikansi sebesar 0,05.

- a. Jika nilai Sig. $< 0,05$ atau F hitung $> F$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa semua variabel bebas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikat.
- b. Jika nilai Sig. $> 0,05$ atau F hitung $< F$ tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, menunjukkan bahwa secara bersama-sama, variabel bebas tidak memberikan pengaruh signifikan.

3.7.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 digunakan untuk menunjukkan sejauh mana variabel- variabel independen dapat menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, semakin besar kemampuan model dalam menjelaskan variabel terikat (Widarjono, 2018). Untuk regresi berganda, Adjusted R^2 lebih sering digunakan karena telah disesuaikan dengan jumlah variabel bebas dalam model. Nilai Adjusted R^2 mendekati 1 menunjukkan model memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variabel dependen, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan sebaliknya.

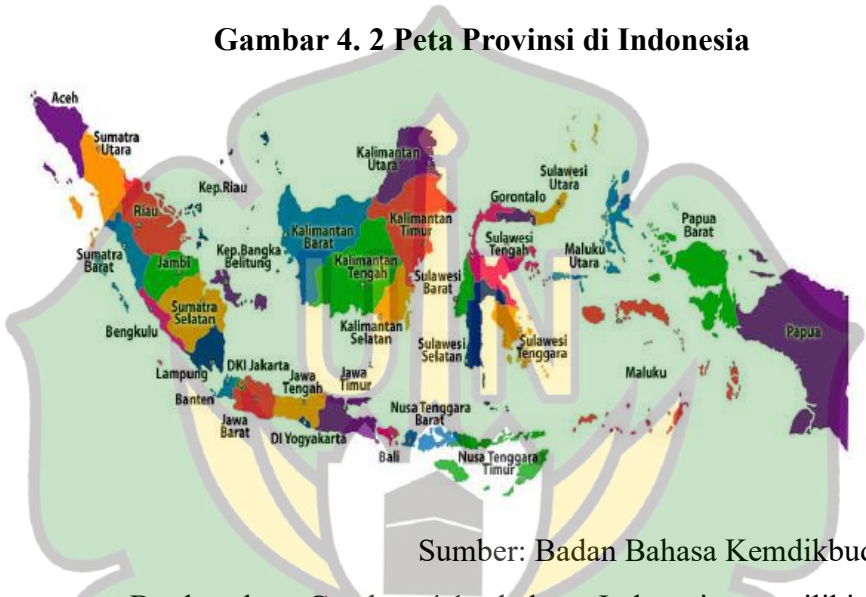


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Peta Provinsi di Indonesia

Gambar 4. 2 Peta Provinsi di Indonesia



Sumber: Badan Bahasa Kemdikbud

Berdasarkan Gambar 4.1 bahwa Indonesia memiliki 34 Provinsi diantaranya: Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kep.Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Dki Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Banten, Bali, Kalimantan Barat, ,Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Riau, Jambi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Gorontalo, Maluku

Utara, Papua Barat, dan Papua (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2024).

4.2 Analisis Deskripsi

4.2.1 Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

	X1	LN_X2	X3	X4	Y
Mean	2.874647	4.260943	5.115853	0.352076	10.69735
Median	2.690000	4.263876	4.725000	0.351000	8.980000
Maximum	7.430000	4.419804	10.95000	0.449000	28.54000
Minimum	-0.790000	4.047428	1.400000	0.236000	3.470000
Std. Dev.	1.524234	0.057974	1.785551	0.041296	5.556830
Skewness	0.670272	-0.254212	0.746555	0.028233	1.089597
Kurtosis	3.209930	4.379222	3.412572	2.620716	3.804371
Jarque-Bera	26.08267	30.61060	33.99421	2.083133	76.44191
Probability	0.000002	0.000000	0.000000	0.352901	0.000000
Sum	977.3800	1448.721	1739.390	119.7060	3637.100
Sum Sq. Dev.	787.5953	1.139369	1080.797	0.578116	10467.77
Observations	340	340	340	340	340

Berdasarkan hasil statistik deskriptif jumlah observasi dalam penelitian ini sebanyak 340 data yang berasal dari data panel 34 provinsi selama 10 tahun penelitian:

1. Inflasi (X1)

Variabel inflasi memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 2,874647.

Nilai maksimum sebesar 7,430000 dan minimum sebesar -

0,790000. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian terdapat daerah yang mengalami deflasi karena nilai minimum berada di bawah nol. Standar deviasi sebesar 1,524234 menunjukkan bahwa penyebaran data inflasi relatif kecil sehingga data cenderung mendekati nilai rata-ratanya.

2. IPM (LN_X2)

Variabel IPM yang telah ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural memiliki nilai rata-rata sebesar 4,260943. Nilai maksimum sebesar 4,419804 dan minimum sebesar 4,047428. Standar deviasi sebesar 0,057974 menunjukkan bahwa variasi data IPM antar provinsi dan tahun relatif rendah atau cenderung stabil.

3. TPT (X3)

Variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki nilai rata-rata sebesar 5,115853. Nilai maksimum sebesar 10,95000 dan minimum sebesar 1,400000. Standar deviasi sebesar 1,785551 menunjukkan adanya variasi tingkat pengangguran antar provinsi selama periode penelitian.

4. Ketimpangan Pendapatan / Gini Ratio (X4)

Variabel ketimpangan pendapatan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,352076. Nilai maksimum sebesar 0,449000 dan minimum sebesar 0,236000. Standar deviasi sebesar 0,041296 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar provinsi relatif tidak terlalu jauh berbeda.

5. Kemiskinan (Y)

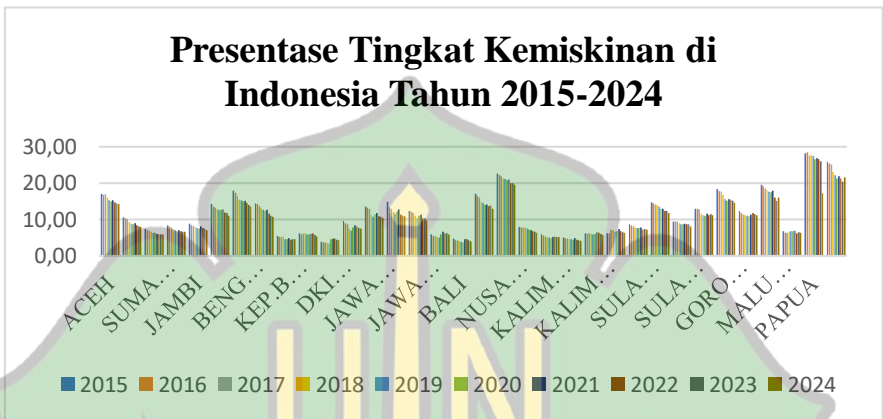
Variabel kemiskinan memiliki nilai rata-rata sebesar 10,69735. Nilai maksimum sebesar 28,54000 dan minimum sebesar 3,470000. Standar deviasi sebesar 5,556830 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan antar provinsi memiliki perbedaan yang cukup besar selama periode penelitian.

4.2.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana masyarakat berada pada taraf hidup yang rendah serta tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi standar kebutuhan pokok serta kebutuhan lainnya dalam periode 2015-2024 yang diukur dalam bentuk persen.

Banyak hal yang menjadi faktor kemiskinan, diantaranya yaitu inflasi, indeks pembangunan manusia, Tingkat Pengangguran serta ketimpangan pendapatan. Data presentase tingkat kemiskinan ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia dari tahun 2015-2024.

Gambar 4. 3
Persentase Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Tahun 2015-2024.



Sumber Badan Pusat Statistik (2024)

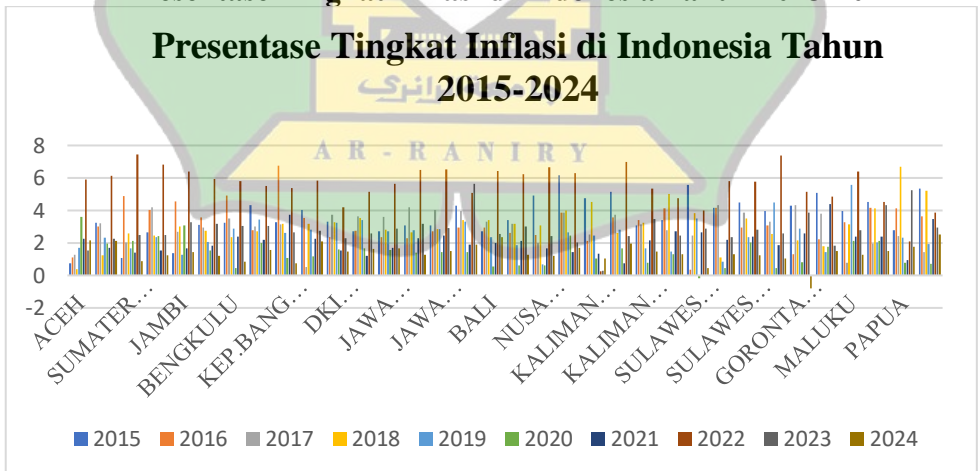
Berdasarkan Gambar 4.2, tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2015–2024. Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Papua, yaitu 28,54% pada tahun 2016 dan menurun menjadi 17,26% pada tahun 2024 namun masih jauh diatas rata-rata tingkat kemiskinan nasional 8,57% . Tingginya angka kemiskinan di wilayah ini dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja. Sementara itu, tingkat kemiskinan paling rendah di Indonesia ditempati oleh Provinsi Bali dengan persentase 4% pada tahun 2024. Selain Bali, provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah juga terdapat di DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan. Rendahnya angka kemiskinan di provinsi tersebut dipengaruhi oleh tingginya aktivitas ekonomi, tersedianya lapangan

pekerjaan, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih memadai.

4.2.3 Inflasi

Inflasi merupakan kondisi terjadinya kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah, karena kenaikan harga kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan perumahan tidak selalu diikuti dengan peningkatan pendapatan yang sebanding. Akibatnya, beban pengeluaran rumah tangga meningkat dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar menjadi menurun. Inflasi menggunakan satuan persen. Berikut data Inflasi di Indonesia tahun 2015-2024.

Gambar 4. 4
Presentase Tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2015-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

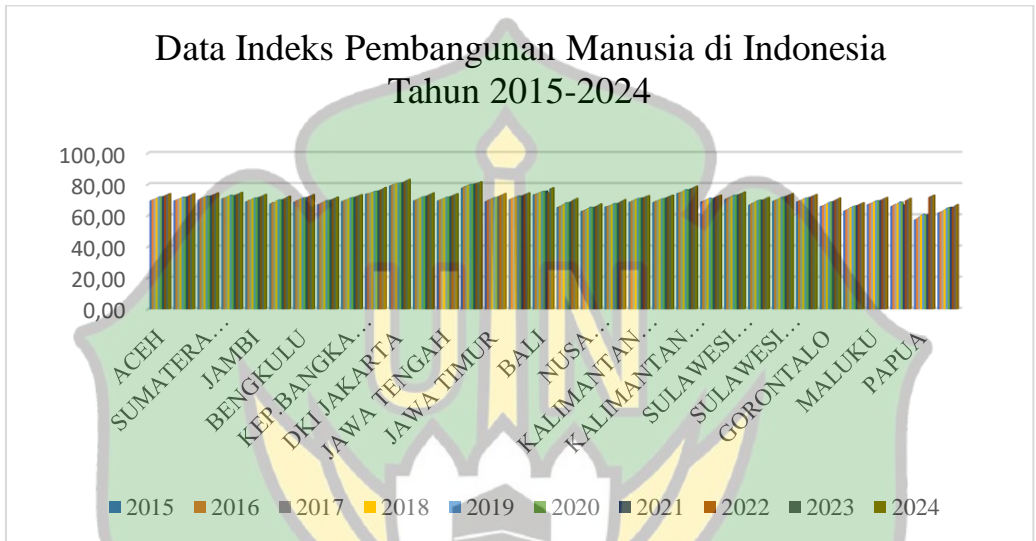
Gambar 4.3, persentase tingkat inflasi di Indonesia selama periode 2015–2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif pada setiap provinsi. Perubahan inflasi tersebut dipengaruhi oleh dinamika harga barang dan jasa, terutama komoditas pangan, energi, transportasi, serta kebijakan pemerintah. Secara umum, tingkat inflasi di sebagian besar provinsi masih berada pada rentang yang terkendali, yaitu sekitar 2% hingga 6% per tahun. Namun, pada beberapa tahun tertentu terjadi peningkatan inflasi yang cukup tinggi akibat tekanan harga dan gangguan distribusi. Provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi pada beberapa periode terlihat terjadi di wilayah Gorontalo, Papua, dan beberapa provinsi di Pulau Sumatera, dengan angka mendekati 7%. Tingginya inflasi di daerah tersebut dapat disebabkan oleh ketergantungan pasokan dari luar daerah, tingginya biaya distribusi, serta kenaikan harga bahan pokok. Sebaliknya, beberapa provinsi seperti Bali, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah cenderung memiliki inflasi lebih stabil karena didukung infrastruktur distribusi yang lebih baik dan aktivitas ekonomi yang lebih kuat.

4.2.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan satuan ukur untuk menjelaskan bagaimana cara agar masyarakat dapat memperoleh tingkat pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak melalui keahlian serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh masyarakat tersebut untuk meningkatkan produktivitas kerja dari masyarakat. Satuan yang digunakan indeks Pembangunan manusia

yaitu skor. Berikut data indeks Pembangunan manusia dari tahun 2015-2024 di Indonesia.

Gambar 4. 5
Persentase Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia
tahun 2015-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

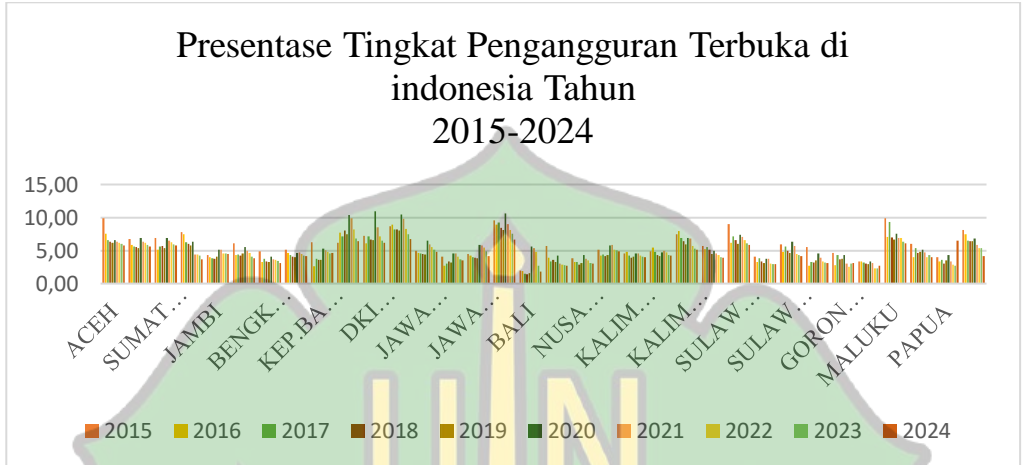
Dari Gambar 4.4 menunjukkan bahwa DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat ipm tertinggi di Indonesia diantara provinsi lainnya yaitu 83,04% pada tahun 2024. Sedangkan provinsi dengan tingkat ipm terendah adalah provinsi Papua Barat yaitu sebesar 67,02%. Rendahnya IPM di Provinsi Papua Barat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, tetapi juga disebabkan oleh kondisi geografis, persebaran penduduk yang terpencar, keterbatasan tenaga pelayanan publik, tingginya tingkat kemiskinan, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah.

4.2.5 Tingkat Pengangguran

Kemiskinan yang di alami oleh suatu daerah atau negara selalu berkaitan dengan tingkat pengangguran. Jumlah pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan masyarakat hidup dalam kondisi miskin. Dalam hal ini negara dengan pengangguran yang tinggi akan mengalami angka kemiskinan yang tinggi pula, sehingga masyarakat juga tidak mengalami hidup yang sejahtera.

Berdasarkan Gambar 4.5 persentase tingkat pengangguran terbuka di Indonesia selama periode 2015–2024. Secara umum, tingkat pengangguran tertinggi berada pada provinsi dengan tingkat urbanisasi tinggi dan jumlah penduduk besar. Provinsi dengan tingkat pengangguran paling tinggi adalah Banten sebesar 10,64% pada tahun 2020, diikuti Jawa Barat sebesar 10,46% pada tahun 2020. Selain itu, tingkat pengangguran relatif tinggi juga terjadi di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Maluku. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya jumlah angkatan kerja serta ketidakseimbangan antara pertumbuhan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja. Sementara itu, provinsi dengan tingkat pengangguran terendah terdapat di Bali sebesar 1,79% pada tahun 2024, diikuti Nusa Tenggara Barat sebesar 2,73% pada tahun 2024. Rendahnya tingkat pengangguran di Bali didukung oleh kuatnya sektor pariwisata yang mendorong penyerapan tenaga kerja pada bidang akomodasi, restoran, transportasi, perdagangan, dan jasa lainnya. Adapun di Nusa Tenggara Barat, penyerapan tenaga kerja banyak ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata.

Gambar 4. 6
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia
tahun 2015-2024

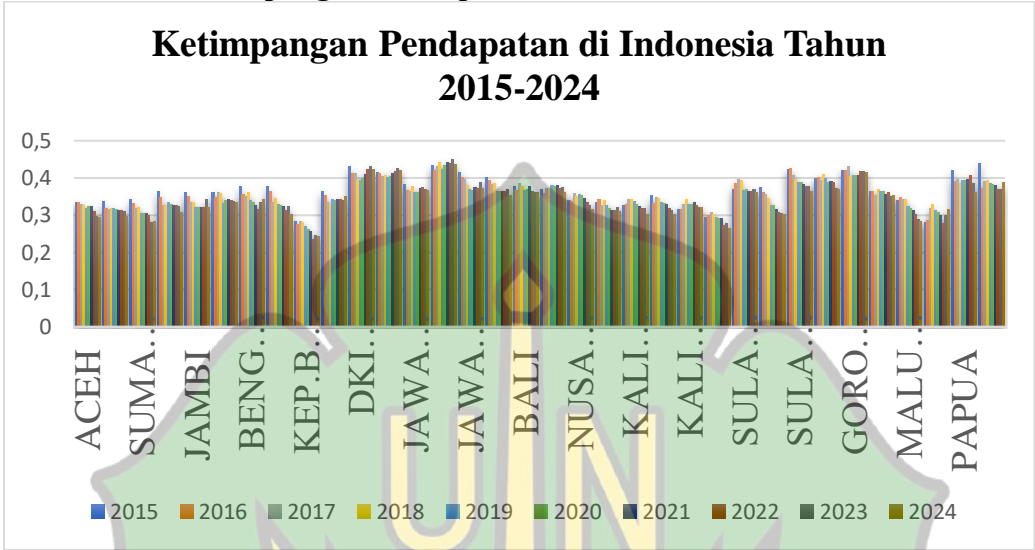


Sumber:Badan Pusat Statistik (2024)

4.2.6 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi ketidakseimbangan distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat, dimana sebagian kelompok memperoleh pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan karena semakin besar kesenjangan yang terjadi, maka semakin banyak masyarakat yang berada pada kelompok berpendapatan rendah dan memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini menyebabkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja menjadi tidak merata, sehingga memperbesar peluang terjadinya kemiskinan.

Gambar 4. 7
Ketimpangan Pendapatan Tahun 2015-2024 di Indonesia



Sumber:Badan Pusat Statistik (2024)

Grafik tersebut menggambarkan ketimpangan pendapatan di berbagai provinsi di Indonesia selama periode 2015–2024, yang umumnya berada pada kisaran 0,25 hingga 0,45. Beberapa provinsi di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Jawa Barat cenderung memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain, yang mencerminkan adanya kesenjangan pendapatan yang lebih besar di daerah dengan aktivitas ekonomi dan urbanisasi tinggi. Sementara itu, sejumlah provinsi di luar Jawa seperti di Kalimantan, Kepulauan Bangka Belitung, dan sebagian wilayah timur Indonesia menunjukkan tingkat ketimpangan yang relatif lebih rendah.

4.3 Estimasi Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini pendekatan estimasi model analisis regresi data panel biasanya dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu: *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random effect Model*. Ketiga jenis model ini di uji untuk penentuan model estimasi terbaik untuk digunakan.

4.3.1 Hasil Uji Chow

Pengujian ini untuk memilih apakah model yang digunakan *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*, maka digunakan uji F Restricted dengan membandingkan nilai probabilitas (p) cross-section F. Jika nilai $p > 0,05$ maka model yang terpilih adalah *Common Effect Model*. Tetapi jika $p < 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*. Dalam penelitian ini dilakukan hipotesisi sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Tabel 4.2 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	310.846371	(33,302)	0.0000
Cross-section Chi-square	1208.494277	33	0.0000

Sumber: Output Olah Data Views (2026)

Dari table 4.4 dapat dilihat bahwa hasil uji chow yang diperoleh nilai probabilitas cross-section F sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah H_0 ditolak

ditolak dan H_1 diterima yang artinya model yang terpilih adalah *fixed effect*.

4.3.2 Hasil Uji Hausman

Hausman test adalah pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan kita dalam memilih apakah menggunakan Fixed Effect Model atau Random Effect Model. Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas (p) untuk cross section random. Jika nilai $p > 0,05$ maka model yang terpilih adalah Random Effect Model. Tetapi jika $p < 0,05$ maka model yang dipilih adalah Fixed Effect Model. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	21.859494	4	0.0002

Sumber: Output Olah Data Eviews(2026)

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa hasil uji hausman yang diperoleh nilai probabilitas cross-section random sebesar 0.0002 atau lebih kecil dari F-tabel yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya model *fixed effect* yang terpilih.

4.4 Pengujian Asumsi Klasik

4.4.1 Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Correlation				
	X1	LN_X2	X3	X4
X1	1.000000	-0.086968	-0.023118	0.031927
LN_X2	-0.086968	1.000000	0.229498	0.058215
X3	-0.023118	0.229498	1.000000	0.032139
X4	0.031927	0.058215	0.032139	1.000000

Sumber: Output Olah Data Eviews(2026)

Berdasarkan hasil pengujian korelasi antar variabel independen, diperoleh bahwa hubungan antara X1 dan LN_X2 sebesar -0,086968, antara X1 dan X3 sebesar -0,023118, serta antara X1 dan X4 sebesar 0,031927. Selain itu, nilai korelasi antara LN_X2 dan X3 adalah sebesar 0,229498, antara LN_X2 dan X4 sebesar 0,058215, dan antara X3 dan X4 sebesar 0,032139. Secara keseluruhan, nilai-nilai tersebut menunjukkan tingkat korelasi yang rendah, di mana nilai tertinggi hanya mencapai 0,229498 dan masih jauh di bawah ambang batas yang umumnya digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas, yaitu $> 0,8$. Oleh karena itu, seluruh variabel independen memiliki nilai korelasi $< 0,8$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas.

4.4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	2.104162	Prob. F(4,335)	0.0800
Obs*R-squared	8.332911	Prob. Chi-Square(4)	0.0801
Scaled explained SS	8.999078	Prob. Chi-Square(4)	0.0611

Sumber: Output Olah Data Eviews (2026)

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan metode Breusch–Pagan–Godfrey menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistic adalah sebesar 0,0800, sedangkan nilai Prob. Chi-Square (Obs*R-squared) sebesar 0,0801 dan Prob. Chi-Square (Scaled explained SS) sebesar 0,0611. Ketiga nilai probabilitas tersebut berada di atas tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ ($0,0800 > 0,05$, $0,0801 > 0,05$, $0,0611 > 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa model tidak mengandung masalah heteroskedastisitas.

4.5. Regresi Data Panel (FEM)

Model terbaik yang telah terpilih pada penelitian ini adalah Fixed Effect Model. Selanjutnya akan dilakukan analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah model hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Tujuan dilakukan regresi linier berganda adalah untuk hubungan antara masing-masing variabel baik itu hubungan positif ataupun negatif. Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel kemiskinan sedangkan yang menjadi variabel independen adalah variabel inflasi, indeks pembangunan manusia, tingkat

pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Persamaan linear berganda pada penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$KM = 111.3217 + 0.002234INF - 24.65296LN_IPM - 0.013661TPT + 12.73593KP$$

Berdasarkan nilai dari regresi linear berganda tersebut maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 111,3217 menunjukkan bahwa apabila variabel independen yaitu inflasi, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan ketimpangan pendapatan dianggap konstan, maka tingkat kemiskinan diperkirakan sebesar 111,3217.
- b. Koefisien inflasi sebesar 0,002234 menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Artinya, setiap kenaikan inflasi sebesar 1 satuan akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,002234 persen, dengan asumsi variabel lain konstan (*ceteris paribus*).
- c. Koefisien LN(IPM) sebesar -24,65296 menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya, setiap kenaikan IPM sebesar 1 satuan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 24,65296%, dengan asumsi variabel lain konstan.
- d. Koefisien TPT sebesar -0,013661 menunjukkan bahwa TPT berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hasil ini

tidak sesuai dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa peningkatan pengangguran akan meningkatkan kemiskinan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya individu yang tergolong pengangguran namun masih memiliki sumber pendapatan dari sektor informal, bantuan sosial, atau pekerjaan tidak tetap, sehingga tidak secara langsung meningkatkan tingkat kemiskinan

- e. Koefisien variabel ketimpangan pendapatan sebesar 12,73593 menunjukkan adanya hubungan positif antara ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan. Artinya, setiap kenaikan ketimpangan pendapatan sebesar 1 satuan akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 12,73593 %, dengan asumsi variabel lain konstan.

Tabel 4.6 Hasil Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Prob
C	111.3217	0.0000
INFLASI	0.002234	0.9305
IPM	-24.65296	0.0000
TPT	-0.013661	0.7654
KP	12.73593	0.0000

Sumber: Output Olah Data Eviews(2026)

Berdasarkan Tabel persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KM = 111.3217 + 0.002234 \text{ INF} - 24.65296 \text{ IPM} - 0.013661 \text{ TPT} + 12.73593 \text{ KP}$$

Keterangan:

KM :Kemiskinan

INF :Inflasi

IPM :Indeks Pembangunan Manusia

TPT :Tingkat Pengangguran Terbuka

KP :Ketimpangan Pendapatan

4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Hasil Uji Parsial

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent secara masing-masing berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil uji parsial menggunakan Eviews

Tabel 4.7 Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Prob
C	111.3217	0.0000
INFLASI	0.002234	0.9305
IPM	-24.65296	0.0000
TPT	-0.013661	0.7654
KP	12.73593	0.0000

Sumber: Output Olah Data Eviews (2026)

Dari Tabel dapat dilihat bahwa variabel inflasi memiliki probabilitas sebesar 0.9305 atau lebih besar dari 0.05 dengan nilai koefisien sebesar 0.002234 yang artinya inflasi berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kemiskinan. Kemudian variabel indeks Pembangunan manusia dengan probabilitas 0.0000 atau lebih dari kecil dari 0.05 dengan nilai koefisien -24.65296 yang artinya indeks Pembangunan manusia berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap kemiskinan. Variabel pengangguran dengan probabilitas 0.7654 atau lebih besar dari 0.05 dengan nilai koefisien -0.013661 yang artinya berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Selanjutnya ketimpangan pendapatan dengan probabilitas 0.0000 atau lebih kecil dari 0.05 dengan nilai koefisien 12.73593 yang artinya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

4.6.2 Hasil Uji Simultan

Uji simultan dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependen secara signifikan. Berikut hasil uji simultan menggunakan Eviews.

Tabel 4.8 Hasil Uji Simultan

F-statistic	583.7017
Prob(F-statistic)	0.0000000

Sumber: Output Olah Data Eviews(2026)

Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa pada Prob(F-statistic) dalam model *fixed effect* ini memiliki nilai sebesar 0.00 dan lebih kecil daripada 0.05 yang artinya dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independent yaitu inflasi, indeks Pembangunan manusia, tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu kemiskinan.

4.6.3 Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan sebuah model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (terikat). Nilai R^2 adalah satu, jika mendekati 0 maka dapat dikatakan bahwa kemampuan sebuah variabel menjelaskan variabel dependen sangatlah terbatas dan kecil. Sedangkan jika nilai sebuah variabel mendekati 1 maka variabel independen tersebut akan memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen. Berikut ini hasil uji parsial menggunakan Eviews.

Tabel 4.9 Hasil Analisis Koefisien Determinasi

R-squared	0.986209
Adjusted R-square	0.984520

Sumber: Output Olah Data Eviews (2026)

Berdasarkan hasil di atas nilai R-squared sebesar 0.986209 atau 98,62%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independent yang terdiri dari inflasi, ipm, tpt dan kp mampu menjelaskan Kemiskinan di Indonesia sebesar 98,62% dan sisanya 1,38% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan didalam model.

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen menggunakan *fixed effect* model didapatkan hasil sebagai berikut:

4.7.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan *Fixed Effect* Model, diperoleh bahwa variabel inflasi memiliki nilai probabilitas sebesar 0.9305 atau lebih besar dari alpha 0.05 (5%) dengan nilai koefisien sebesar 0.002234. Secara parsial, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan inflasi sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0,002 persen. Artinya, inflasi tidak terlalu mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan karena selama periode penelitian tingkat inflasi di Indonesia masih tergolong ringan dan relatif terkendali, sehingga tidak terlalu menekan daya beli masyarakat miskin. Selain itu, adanya bantuan sosial dan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga menyebabkan dampak inflasi terhadap kemiskinan menjadi lemah. Menurut teori Keynes, inflasi terjadi akibat meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang melebihi kapasitas produksi, sehingga menyebabkan kenaikan harga secara umum. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Namun, apabila inflasi masih berada pada tingkat ringan dan terkendali, maka dampaknya terhadap kemiskinan cenderung kecil.

Hal ini juga telah diteliti sebelumnya oleh Fitri Ani Dwi Lusiana (2024) tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi

dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2014-2023, yang diperoleh hasil bahwa variabel inflasi menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2023) dengan judul pengaruh inflasi, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan di Indonesia, yang diperoleh hasil Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu dapat ditarik Kesimpulan bahwa ada banyak faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selain dari inflasi.

4.7.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks Pembangunan manusia dengan nilai probabilitas 0.0000 atau lebih kecil ($<$) dari alpha 0.05 (5%) dengan nilai koefisien -24.65296 artinya secara parsial terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara indeks Pembangunan manusia dengan tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2015-2024. Secara simultan indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia dari tahun 2015-2024. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 24% yang artinya semakin meningkat kualitas sumber daya manusia maka akan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terbukti

berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Semakin baik kualitas pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi masyarakat, maka semakin besar peluang untuk keluar dari kondisi kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori Human Capital yang dikemukakan oleh Gary Becker yang menyatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan keterampilan merupakan bentuk investasi modal manusia yang dapat meningkatkan produktivitas individu. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka kemampuan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan dan pendapatan juga akan meningkat sehingga tingkat kemiskinan dapat menurun.

Peran pemerintah sangat strategis dalam proses ini, khususnya melalui peningkatan mutu pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan, serta penguatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pengembangan keterampilan kerja juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki daya saing yang lebih baik di pasar tenaga kerja.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Azriyansyah (2022) yang membahas mengenai analisis pengaruh indeks Pembangunan manusia, pdrb dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode tahun 2017-2021, dari penelitian tersebut maka diperoleh hasil bahwa variabel ipm ber pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. Penelitian

Romandhon (2024) juga memperoleh hasil yang sama dengan judul penelitian pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah 2013-2021. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian padambo (2021) yaitu analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan Indonesia di provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil penelitian bahwa ipm berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan.

4.7.3 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan di Indonesia

Hasil dalam penelitian ini bahwa Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki nilai koefisien sebesar -0,013661 dengan nilai probabilitas sebesar 0,7654. Nilai probabilitas yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 (5%) menunjukkan bahwa secara parsial TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Namun secara simultan, variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bersama dengan variabel lain seperti inflasi, IPM, dan ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, hal ini disebabkan karena pada TPT dapat dijelaskan oleh kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia yang masih didominasi oleh sektor informal, sehingga sebagian individu yang tergolong pengangguran secara statistik tetap memiliki sumber pendapatan

dari pekerjaan tidak tetap atau usaha mandiri, sehingga tidak langsung masuk dalam kategori miskin. Selain itu, keberadaan program perlindungan sosial dari pemerintah, seperti bantuan langsung tunai, subsidi, dan jaminan sosial, turut menahan dampak pengangguran terhadap kemiskinan. Perbedaan karakteristik antar daerah juga mempengaruhi hubungan ini, di mana wilayah dengan tingkat pengangguran yang relatif tinggi belum tentu memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.

Penelitian ini sejalan dengan (Rahman & Hanifa, 2023) pengaruh pengeluaran pemerintah, ipm dan pengangguran terhadap kemiskinan di pulau jawa, dengan hasil menyatakan bahwa tingkat pengangguran tidak mempengaruhi kemiskinan. Penelitian (Hasibuan, 2023) juga mengalami hal yang serupa, bahwa hasil menunjukkan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

4.7.4 Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia

Berdasarkan hasil estimasi, variabel ketimpangan pendapatan memiliki koefisien sebesar 12,73593 dengan nilai probabilitas 0,0000. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (5%) menunjukkan bahwa secara parsial ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Koefisien positif tersebut mengindikasikan bahwa setiap peningkatan ketimpangan pendapatan sebesar 1 satuan akan diikuti oleh kenaikan tingkat

kemiskinan sebesar 12,73593%, dengan asumsi variabel lain dalam model dianggap tetap (*ceteris paribus*). Temuan ini konsisten dengan pandangan teori pembangunan yang menyatakan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata dapat memperburuk kondisi kemiskinan. Ketika sebagian besar pendapatan terkonsentrasi pada kelompok tertentu, maka kelompok berpendapatan rendah tidak memperoleh manfaat yang proporsional dari pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, kesenjangan yang semakin lebar berpotensi meningkatkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.. Penelitian ini sejalan dengan teori Kuznet, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan sebelum akhirnya menurun pada tahap yang lebih matang. Namun, apabila ketimpangan tersebut tidak dikelola dengan baik, maka proses penurunan kemiskinan dapat terhambat. Ketimpangan yang tinggi juga berimplikasi pada terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta peluang kerja yang layak, sehingga mengurangi kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan demikian, ketimpangan pendapatan tidak hanya mencerminkan adanya perbedaan distribusi ekonomi, tetapi juga menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia.

Penelitian ini sejalan dengan Aryanti & Sukardi (2024) pengaruh pengangguran, Pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia yang mendapatkan hasil ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan

terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian Septiani (2026) pengaruh indeks Pembangunan manusia, pengangguran dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia juga mendapatkan hasil bahwa variabel ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Namun penelitian Syadiah & Samsuddin (2025) dengan judul analisis kausalitas pertumbuhan penduduk, ketimpangan pendapatan, upah minimum dan tingkat kemiskinan di Indonesia dengan hasil variabel ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh inflasi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2015–2024 dengan menggunakan metode regresi data panel melalui pendekatan *Fixed Effect Model*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Inflasi secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara parsial berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia
4. Ketimpangan Pendapatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.
5. Inflasi, Indeks R Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran dan Ketimpangan Pendapatan secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

pemerataan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja guna menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan pengendalian ketimpangan pendapatan melalui kebijakan distribusi pendapatan yang lebih merata, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah. Pemerintah juga diharapkan mampu menjaga stabilitas inflasi agar daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan, tetap terjaga.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, serta pengembangan keterampilan agar mampu meningkatkan produktivitas dan taraf hidup. Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih aktif memanfaatkan peluang usaha, lapangan kerja, maupun program pemberdayaan ekonomi yang disediakan pemerintah guna mengurangi risiko kemiskinan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi kemiskinan seperti pertumbuhan ekonomi, upah minimum, belanja pemerintah, investasi, atau jumlah penduduk agar hasil penelitian lebih komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode penelitian yang lebih panjang serta

metode analisis yang berbeda agar diperoleh hasil yang lebih mendalam dan akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Afriwan, Adi Putra, A. F. (2025). Analyzing The Impact Of Human Development Index, Inflation, And Unemployment on Poverty Levels in Jambi Province. *Jurnal Prajaiswara*, 6. <https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v6i2.220>
- Amponsah, M., Agbola, F. W., & Mahmood, A. (2023). The relationship between poverty, income inequality and inclusive growth in Sub-Saharan Africa. *Economic Modelling*, 126(June), 106415. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106415>
- Anwar, M. M. dan K. (2023). Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Aplikasi Ilmu Ekonomi*, 2(2), 83–95.
- Aprilianti, V. A., & Harken, A. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jambi. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 5(2), 1142–1160. <https://doi.org/10.37250/newkiki.v5i2.111>
- Aris, S. (2023). *Macroeconometric Model Kemiskinan, Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Kebijakan Macroprudential Di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Aryanti, E. D., & Sukardi, A. S. (2024). Pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 4(2), 117–133.
- Astuty, P., Priadana, S., & Bakti, I. T. (2025). *The Relationship between Income Inequality and Poverty in Indonesia: A Sustainable Macroeconomic Analysis (Empirical Study of Java Island 2018– 2022)*. 453–462.
- Bank, W. (2024). *Macro Poverty Outlook: Country-by-Country Analysis and Projections for the Developing World*. World Bank.

- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. University of Chicago Press.
- Biewen, M., & Flachaire, E. (2018). *Econometrics and Income Inequality*.
- Dicki Dwi Ferian, E. Y. A. G. (2021). Analisis Faktor Penyebab Kemiskinan dan Bagaimana Penanggulangannya: Studi Empiris Pada 29 Kabupaten di Jawa Tengah 2014-2020. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 172–193. <https://media.neliti.com/media/publications/455468-none-8a1a4a8a.pdf>
- Efendi, B., Nasution, P. D., & Rusiadi, P. D. (2024). *No Title*. Tahta Media Group.
- Fathoni, M. (2023). Hubungan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Of Student Development Informatics Management (JoSDIM)*, 3, 435–440.
- Frisnoiry, S., Sihotang, H. M. W., Indri, N., & Munthe, T. (2024). Analisis Permasalahan Pengangguran Di Indonesia. *Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(1).
- Frisnoiry, S., Sitompul, M. E., & Manik, S. (2024). Impact of inflation on poverty levels in north sumatera. *Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis*, 27(01), 14–21.
- Harahap, L. M., Pasaribu, R., Rahma, Z., & Chintia, A. (2025). Perkembangan Ekonomi Digital dan Dampaknya Terhadap Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 51–70.
- Hasibuan, L. S. (2023). Analisis Pengaruh Ipm, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 8(1), 53–62. <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/2075/126>

- Indrawati, I., Sarfiah, S. N., & Destiningsih, R. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2014-2019. *Directory Journal Of Economic*, 2(4), 13. <http://jom.untidar.ac.id/index.php/dinamic/article/view/1446>
- June, N., & Arianto, E. (2025). The Effect Of Human Development Index And Unemployment On Povety In Indonesia 2018-2023. *International Journal Of Management Finance*, 2(4), 59–64.
- Kaldor, N. (1955). Alternative theories of distribution. *The Review of Economic Studies*.
- Kasih, V. D. A., & Yefriza, Y. (2025). Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Sumatera. *Jesya*, 8(1), 276–286. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1858>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. (2024). *Peta Indonesia*.
- Keynes, J. M. (2018). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Palgrave Macmillan.
- Kurniawan, M. R., Ghafur, A., Kartikawati, Y., Syari'ah, M. K., Dan, E., Islam, B., Islam, U., & Hasan, Z. (2025). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Kurs Terhadap Return On Asset Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 10(01), 200–215. <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i01.2428>
- Kusumadewi, D. R., Haryani, T. N., & Utomo, I. H. (2023). *Faktor Keberhasilan Implementasi Program Skill Development Center dalam Menekan Pengangguran di Kota Surakarta*. 3, 455–466.
- Kuznets, S. (1955). *Economic Growth and Income Inequality*.
- Lutfi Handayani, Sudjiono, N. (2021). Pengaruh jumlah penduduk,

- pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 1990-2019. *Jurnal Riset Bisnis Dan Ekonomi*, 2.
- Malthus, T. R. (2019). *An Essay on the Principle of Population*. Oxford University Press.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of economics*. Cengage Learning.
- Meilina, T. Z., Alfunnuria, V. S., Safira, Y. E., & Kholid, M. K. A. (2023). Pengaruh usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita terhadap IPM. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (Ebismen)*, 3(1), 12–29. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i1.1613>
- Meiliza, G., Munawar, S. Al, Melati, R., Yulita, N., & Kiat, E. (2025). Pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kota Palembang. *Jurnal Ekonomi Kiat*, 43–54. <https://doi.org/10.25299/kiat.2025.20277>
- Muna Muttaqin, K. A. (2023). *Pengaruh tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap kemiskinan di Indonesia*. 2(2), 83–95.
- Mustika, C., & Naskah, I. (2022). *The Relationship Between Absolute Poverty Income Inequality in Rural and Urban Areas in Indonesia : The Granger Causality Approach*. 107–118.
- Nafi'ah, B. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016- 2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 953–960. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2206>
- Nasirudin, A., & Haviz, M. (2025). Pengaruh Tingkat Pendidikan , Pengangguran Terbuka , dan PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis (JRIB)*, 21–28.
- Nofitiana, S., Huda, S., & Perdana, P. (2024). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis*

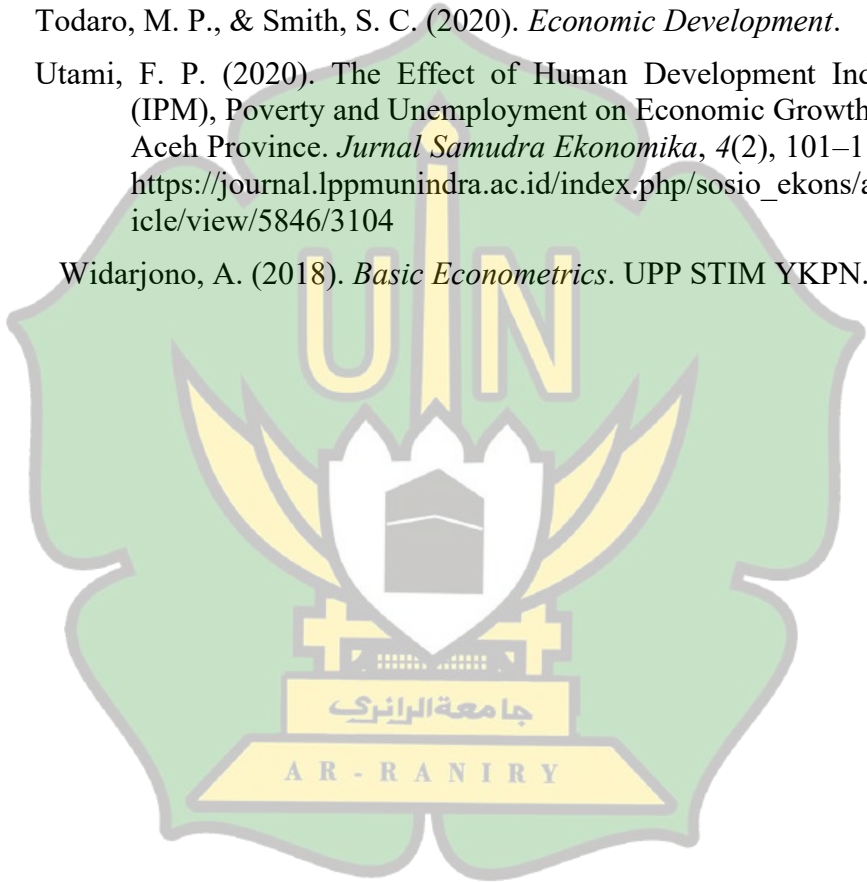
Syariah, 6, 7991–8003. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i12.4647>

- Novaldo Yanescha Putra. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia Tahun 2015-2020. *TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(5), 195–212. <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika>
- Nurlaili, A., Wardani, K., & Pasya, D. J. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (ipm) Terhadap Tingkat kemiskinan Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen, Jurnal Ilmiah Multi Science*, 6–11.
- Padambo, M. R., Kawung, G. M. V, & Rompas, W. F. I. (2021). Analisis Pengaruh Petumbuhan Ekonomi Inflasi Dan Indeks Pebangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(5), 15–27. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/36628>
- Permana, H., & Pasaribu, E. (2023). Pengaruh Inflasi, Ipm, Ump Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Pulau Sumatera. *Jurnal Ilmiah MEAM (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*., 7(3), 1113–1132. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3516>
- Putri, A. N., Primadani, A. G., Wardani, E. P., & ... (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1192, 275–285.
- Putri, S. N., & Pristiana, U. (2025). Pengaruh Financial Technology, Fee-Based Income, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Era Digital*, 2(3), 180–195. <https://doi.org/10.61132/jumabedi.v2i3.718>
- Qarina. (2022). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di

- Indonesia 2005-2021. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 19(4), 816–826.
- Ragnar, N. (1953). *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Oxford University Press.
- Rahman. (2024). Transformasi Pengangguran Struktural di Era Digital: Perspektif Pelaku Pasar Tenaga Kerja. *Media Ekonomi*, 24(1), 17–26.
- Rahman, A. G. D., & Hanifa, N. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, IPM, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Pulau Jawa. *II92*, 246–254.
- Rinaldi, M., Pakpahan, G., Sihombing, L. V. F., & Pranatalia, R. (2025). Pengaruh Ketimpangan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Sharia Economics Scholar*, 3(2).
- Romandhon, R., Jannata, R., & Maulidi, R. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengangguran, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2013 Sampai 2021). *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 63–71. <https://doi.org/10.32699/jamasy.v4i1.6763>
- Rudy, S., & Indah, P. (2020). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, Vol. 7 N0.(271–278), 271–278.
- Sandi, F., Halim, A., & Furqon. (2023). Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akutansi*, 25(4), 659–666.
- Sari, Y., Nasrun, A., & Putri, A. K. (2020). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2017. *Jurnal Ekonomi*, 8(1), 4–6.

- Septiani, A. F. dan R. (2026). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2015-2024. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2(1), 813–833.
- Shobiha, S. M., & Yuniasih, A. F. (2022). Pengidentifikasian Determinan Pembangunan Kesehatan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2018. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 13(1). <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v13i1.2404>
- Siburian, R., Anggraini, A., Tamba, K., Christina, A., & Hasibuan, A. S. (2024). The Effect of Population Growth and Income Inequality on Poverty: Indonesian Case Study in the Development Context. *Outline Journal of Economic Studies*, 3(2), 89–100.
- Silaban, P. S. M. J., & Siagian, S. J. (2021). Pengaruh Inflasi Dan Investasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Tahun 2002-2019. *Niagawan*, 10(2).
- Silaen, N. R., & Ginting, E. A. (2025). Impact of Unemployment , Social Protection Spending , and SMEs on the Underprivileged Population Number. *Unemployment, Social Protection and SMEs*, 13(3), 1839–1848. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i3.3324>
- Silitonga, D. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Pada Periode Tahun 2010-2020. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 24(1).
- Simanungkalit, E. A. F. B. R. (2020). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 13(3), 327–340. <https://doi.org/10.35508/jom.v13i3.3311>
- Sri Utami Nurhasanah, & Sarah Fitriyani. (2024). Menganalisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Inflasi, Serta Pengangguran Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Indonesia. *MASMAN: Master Manajemen*, 2(1), 206–215. <https://doi.org/10.59603/masman.v2i1.375>
- Statistik, B. P. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia*. BPS.

- Sugiyono. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. <http://penerbitzaini.com>
- Sukirno, S. (2014). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Rajawali Pers.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi Teori Pengantar* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*.
- Utami, F. P. (2020). The Effect of Human Development Index (IPM), Poverty and Unemployment on Economic Growth in Aceh Province. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 4(2), 101–113. https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons/article/view/5846/3104
- Widarjono, A. (2018). *Basic Econometrics*. UPP STIM YKPN.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Inflasi Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Ketimpangan Pendapatan Tahun 2015-2024.

PROVINSI	Tahun	X1	X2	X3	X4	Y
ACEH	2015	0,76	69,45	9,93	0,334	17,08
ACEH	2016	1,12	70,00	7,57	0,333	16,73
ACEH	2017	1,26	70,60	6,57	0,329	16,89
ACEH	2018	0,38	71,19	6,34	0,325	15,97
ACEH	2019	1,69	71,90	6,17	0,319	15,32
ACEH	2020	3,59	71,99	6,59	0,323	14,99
ACEH	2021	2,24	72,18	6,30	0,324	15,33
ACEH	2022	5,89	72,80	6,17	0,311	14,64
ACEH	2023	1,53	73,40	6,03	0,296	14,45
ACEH	2024	2,17	74,03	5,75	0,294	14,23
SUMATERA UTARA	2015	3,24	69,51	6,71	0,336	10,53
SUMATERA UTARA	2016	3,02	70,00	5,84	0,319	10,35
SUMATERA UTARA	2017	3,20	70,57	5,60	0,315	10,22
SUMATERA UTARA	2018	1,23	71,18	5,55	0,318	9,22
SUMATERA UTARA	2019	2,33	71,74	5,39	0,317	8,83
SUMATERA UTARA	2020	1,96	71,77	6,91	0,316	8,75
SUMATERA UTARA	2021	1,71	72,00	6,33	0,314	9,01
SUMATERA UTARA	2022	6,12	72,71	6,16	0,312	8,42
SUMATERA UTARA	2023	2,25	73,37	5,89	0,309	8,15
SUMATERA UTARA	2024	2,12	74,02	5,60	0,297	7,99
SUMATERA BARAT	2015	1,08	69,98	6,89	0,342	7,31
SUMATERA BARAT	2016	4,89	70,73	5,09	0,331	7,09
SUMATERA BARAT	2017	2,02	71,24	5,58	0,318	6,87
SUMATERA BARAT	2018	2,60	71,73	5,66	0,321	6,65
SUMATERA BARAT	2019	1,66	72,39	5,38	0,306	6,42
SUMATERA BARAT	2020	2,11	72,38	6,88	0,305	6,28
SUMATERA BARAT	2021	1,40	72,65	6,52	0,306	6,00

SUMATERA BARAT	2022	7,43	73,26	6,28	0,3	5,92
SUMATERA BARAT	2023	2,47	73,75	5,94	0,28	5,95
SUMATERA BARAT	2024	0,89	74,49	5,75	0,283	5,97
RIAU	2015	2,65	70,84	7,83	0,364	8,42
RIAU	2016	4,04	71,20	7,43	0,347	7,98
RIAU	2017	4,20	71,79	6,22	0,325	7,78
RIAU	2018	2,45	72,44	5,98	0,327	7,39
RIAU	2019	2,36	73,00	5,76	0,334	7,08
RIAU	2020	2,42	72,71	6,32	0,329	6,82
RIAU	2021	1,54	72,94	4,42	0,326	7,12
RIAU	2022	6,81	73,52	4,37	0,326	6,78
RIAU	2023	2,50	74,04	4,23	0,324	6,68
RIAU	2024	1,25	74,79	3,70	0,307	6,67
JAMBI	2015	1,37	68,89	4,34	0,361	8,86
JAMBI	2016	4,54	69,62	4,00	0,349	8,41
JAMBI	2017	2,68	69,95	3,87	0,335	8,19
JAMBI	2018	3,02	70,65	3,73	0,334	7,92
JAMBI	2019	1,27	71,26	4,06	0,321	7,60
JAMBI	2020	3,09	71,29	5,13	0,32	7,58
JAMBI	2021	1,67	71,63	5,09	0,321	8,09
JAMBI	2022	6,39	72,14	4,59	0,32	7,62
JAMBI	2023	3,27	72,77	4,53	0,343	7,58
JAMBI	2024	1,43	73,43	4,48	0,321	7,10
SUMATERA SELATAN	2015	3,10	67,46	6,07	0,36	14,25
SUMATERA SELATAN	2016	3,58	68,24	4,31	0,348	13,54
SUMATERA SELATAN	2017	2,96	68,25	4,39	0,361	13,19
SUMATERA SELATAN	2018	2,74	69,39	4,27	0,358	12,80
SUMATERA SELATAN	2019	2,06	70,02	4,53	0,331	12,71
SUMATERA SELATAN	2020	1,55	70,01	5,51	0,339	12,66
SUMATERA SELATAN	2021	1,82	70,24	4,98	0,341	12,84
SUMATERA SELATAN	2022	5,94	70,90	4,63	0,339	11,90
SUMATERA SELATAN	2023	3,17	71,62	4,11	0,338	11,78
SUMATERA SELATAN	2024	1,20	72,30	3,86	0,333	10,97

BENGKULU	2015	3,24	68,59	4,91	0,376	17,88
BENGKULU	2016	4,91	69,33	3,30	0,357	17,32
BENGKULU	2017	3,51	69,95	3,74	0,351	16,45
BENGKULU	2018	2,36	70,64	3,35	0,362	15,43
BENGKULU	2019	2,88	71,21	3,26	0,34	15,23
BENGKULU	2020	0,45	71,40	4,07	0,334	15,03
BENGKULU	2021	2,38	71,64	3,65	0,326	15,22
BENGKULU	2022	5,79	72,16	3,59	0,315	14,62
BENGKULU	2023	3,04	72,78	3,42	0,333	14,04
BENGKULU	2024	0,84	73,39	3,11	0,342	13,56
LAMPUNG	2015	4,34	66,95	5,14	0,376	14,35
LAMPUNG	2016	2,78	67,65	4,62	0,364	14,29
LAMPUNG	2017	3,02	68,25	4,33	0,334	13,69
LAMPUNG	2018	2,73	69,02	4,04	0,346	13,14
LAMPUNG	2019	3,44	69,57	4,03	0,329	12,62
LAMPUNG	2020	2,00	69,69	4,67	0,327	12,34
LAMPUNG	2021	2,19	69,90	4,69	0,323	12,62
LAMPUNG	2022	5,51	70,45	4,52	0,314	11,57
LAMPUNG	2023	3,06	71,15	4,23	0,324	11,11
LAMPUNG	2024	1,57	71,81	4,19	0,302	10,69
KEPULAUAN BANGKABELITUNG	2015	3,27	69,05	6,29	0,283	5,40
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2016	6,75	69,55	2,60	0,275	5,22
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2017	3,13	69,99	3,78	0,282	5,20
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2018	3,18	70,67	3,61	0,281	5,25
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2019	2,62	71,30	3,58	0,269	4,62
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2020	1,08	71,47	5,25	0,262	4,53
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2021	3,75	71,69	5,03	0,256	4,90
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2022	5,38	72,24	4,77	0,236	4,45
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2023	2,65	72,85	4,56	0,245	4,52

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2024	0,75	73,33	4,63	0,244	4,55
KEPULAUAN RIAU	2015	4,04	73,75	6,20	0,364	6,24
KEPULAUAN RIAU	2016	3,53	73,99	7,69	0,354	5,98
KEPULAUAN RIAU	2017	0,50	74,45	7,16	0,334	6,06
KEPULAUAN RIAU	2018	3,18	74,84	8,04	0,33	6,20
KEPULAUAN RIAU	2019	2,82	75,48	7,50	0,341	5,90
KEPULAUAN RIAU	2020	1,18	75,59	10,34	0,339	5,92
KEPULAUAN RIAU	2021	2,26	75,79	9,91	0,343	6,12
KEPULAUAN RIAU	2022	5,83	76,46	8,23	0,342	6,24
KEPULAUAN RIAU	2023	2,76	77,11	6,80	0,34	5,69
KEPULAUAN RIAU	2024	2,09	77,97	6,39	0,349	5,37
DKI JAKARTA	2015	3,30	78,99	7,23	0,431	3,93
DKI JAKARTA	2016	2,37	79,60	6,12	0,411	3,75
DKI JAKARTA	2017	3,72	80,06	7,14	0,413	3,77
DKI JAKARTA	2018	3,27	80,47	6,65	0,394	3,57
DKI JAKARTA	2019	3,23	80,76	6,54	0,394	3,47
DKI JAKARTA	2020	1,59	80,77	10,95	0,399	4,53
DKI JAKARTA	2021	1,53	81,11	8,50	0,409	4,72
DKI JAKARTA	2022	4,21	81,65	7,18	0,423	4,69
DKI JAKARTA	2023	2,28	82,46	6,53	0,431	4,44
DKI JAKARTA	2024	1,48	83,08	6,21	0,423	4,30
JAWA BARAT	2015	2,73	69,50	8,72	0,415	9,53
JAWA BARAT	2016	2,75	70,05	8,89	0,413	8,95
JAWA BARAT	2017	3,63	70,69	8,22	0,403	8,71
JAWA BARAT	2018	3,54	71,30	8,23	0,407	7,45
JAWA BARAT	2019	3,41	72,03	8,04	0,402	6,91
JAWA BARAT	2020	1,66	72,09	10,46	0,403	7,88
JAWA BARAT	2021	1,22	72,45	9,82	0,412	8,40
JAWA BARAT	2022	5,16	73,12	8,31	0,417	8,06
JAWA BARAT	2023	2,58	73,74	7,44	0,425	7,62
JAWA BARAT	2024	1,64	74,43	6,75	0,421	7,46
JAWA TENGAH	2015	2,73	69,49	4,99	0,382	13,58
JAWA TENGAH	2016	2,36	69,98	4,63	0,366	13,27

JAWA TENGAH	2017	3,61	70,52	4,57	0,365	13,01
JAWA TENGAH	2018	2,82	71,12	4,47	0,378	11,32
JAWA TENGAH	2019	2,72	71,73	4,44	0,361	10,8
JAWA TENGAH	2020	1,56	71,87	6,48	0,362	11,41
JAWA TENGAH	2021	1,70	72,16	5,95	0,372	11,79
JAWA TENGAH	2022	5,63	72,79	5,57	0,374	10,93
JAWA TENGAH	2023	2,89	73,39	5,13	0,369	10,77
JAWA TENGAH	2024	1,67	73,88	4,78	0,367	10,47
DI YOGYAKARTA	2015	3,09	77,59	4,07	0,433	14,91
DI YOGYAKARTA	2016	2,29	78,38	2,72	0,42	13,34
DI YOGYAKARTA	2017	4,2	78,89	3,02	0,432	13,02
DI YOGYAKARTA	2018	2,66	79,53	3,37	0,441	12,13
DI YOGYAKARTA	2019	2,77	79,99	3,18	0,423	11,7
DI YOGYAKARTA	2020	1,40	79,97	4,57	0,434	12,28
DI YOGYAKARTA	2021	2,29	80,22	4,56	0,441	12,8
DI YOGYAKARTA	2022	6,49	80,64	4,06	0,439	11,34
DI YOGYAKARTA	2023	3,17	81,07	3,69	0,449	11,04
DI YOGYAKARTA	2024	1,28	81,55	3,48	0,435	10,83
JAWA TIMUR	2015	3,08	68,95	4,47	0,415	12,34
JAWA TIMUR	2016	2,72	69,74	4,21	0,402	12,05
JAWA TIMUR	2017	4,04	70,27	4,00	0,396	11,77
JAWA TIMUR	2018	2,86	70,77	3,91	0,379	10,98
JAWA TIMUR	2019	2,86	71,50	3,82	0,37	10,37
JAWA TIMUR	2020	1,44	71,71	5,84	0,366	11,09
JAWA TIMUR	2021	2,45	72,14	5,74	0,374	11,4
JAWA TIMUR	2022	6,52	72,75	5,49	0,371	10,38
JAWA TIMUR	2023	2,92	73,38	4,88	0,387	10,35
JAWA TIMUR	2024	1,51	74,09	4,19	0,372	9,79
BANTEN	2015	4,29	70,27	9,55	0,401	5,90
BANTEN	2016	2,94	70,96	8,92	0,394	5,42
BANTEN	2017	3,98	71,42	9,28	0,382	5,45
BANTEN	2018	3,42	71,95	8,47	0,385	5,24
BANTEN	2019	3,30	72,44	8,11	0,365	5,09

BANTEN	2020	1,43	72,45	10,64	0,363	5,92
BANTEN	2021	1,91	72,72	8,98	0,365	6,66
BANTEN	2022	5,08	73,32	8,09	0,363	6,16
BANTEN	2023	5,64	73,87	7,52	0,368	6,17
BANTEN	2024	1,88	74,48	6,68	0,353	5,84
BALI	2015	2,70	73,27	1,99	0,377	4,74
BALI	2016	2,94	73,65	1,89	0,366	4,25
BALI	2017	3,31	74,30	1,48	0,384	4,25
BALI	2018	3,40	74,77	1,40	0,377	4,01
BALI	2019	2,37	75,38	1,57	0,366	3,79
BALI	2020	0,55	75,50	5,63	0,369	3,78
BALI	2021	2,01	75,69	5,37	0,378	4,53
BALI	2022	6,44	74,44	4,80	0,363	4,57
BALI	2023	2,54	77,10	2,69	0,362	4,25
BALI	2024	2,34	77,76	1,79	0,361	4,00
NTB	2015	3,41	65,19	5,69	0,368	17,1
NTB	2016	2,61	65,81	3,94	0,359	16,48
NTB	2017	3,17	66,58	3,32	0,371	16,07
NTB	2018	3,16	67,30	3,58	0,372	14,75
NTB	2019	1,87	68,14	3,28	0,379	14,56
NTB	2020	0,6	68,25	4,22	0,376	13,97
NTB	2021	2,12	68,65	3,01	0,381	14,14
NTB	2022	6,23	69,46	2,89	0,373	13,68
NTB	2023	3,02	70,20	2,80	0,375	13,85
NTB	2024	1,28	70,93	2,73	0,361	12,91
NTT	2015	4,92	62,67	3,83	0,339	22,61
NTT	2016	2,48	63,13	3,25	0,336	22,19
NTT	2017	2,00	63,73	3,27	0,359	21,85
NTT	2018	3,07	64,39	2,85	0,351	21,35
NTT	2019	0,67	65,23	3,14	0,356	21,09
NTT	2020	0,61	65,19	4,28	0,354	20,9
NTT	2021	1,67	65,28	3,77	0,346	20,99
NTT	2022	6,65	65,90	3,54	0,334	20,05

NTT	2023	2,42	66,68	3,14	0,325	19,96
NTT	2024	1,19	67,39	3,02	0,316	19,48
KALIMANTAN BARAT	2015	6,17	65,59	5,15	0,334	8,03
KALIMANTAN BARAT	2016	3,88	65,88	4,23	0,341	7,87
KALIMANTAN BARAT	2017	3,86	66,26	4,36	0,327	7,88
KALIMANTAN BARAT	2018	3,99	66,98	4,18	0,339	7,77
KALIMANTAN BARAT	2019	2,64	67,65	4,35	0,327	7,49
KALIMANTAN BARAT	2020	2,46	67,66	5,81	0,317	7,17
KALIMANTAN BARAT	2021	1,45	67,90	5,82	0,313	7,15
KALIMANTAN BARAT	2022	6,30	68,63	5,11	0,314	6,73
KALIMANTAN BARAT	2023	2,02	69,41	5,05	0,321	6,71
KALIMANTAN BARAT	2024	1,71	70,13	4,86	0,31	6,32
KALIMANTAN TENGAH	2015	4,74	68,53	4,54	0,326	5,94
KALIMANTAN TENGAH	2016	2,11	69,13	4,82	0,33	5,66
KALIMANTAN TENGAH	2017	2,51	69,79	4,23	0,343	5,37
KALIMANTAN TENGAH	2018	4,52	70,42	3,91	0,342	5,17
KALIMANTAN TENGAH	2019	2,45	70,91	4,04	0,336	4,98
KALIMANTAN TENGAH	2020	1,03	71,05	4,58	0,329	4,82
KALIMANTAN TENGAH	2021	1,33	71,25	4,53	0,323	5,16
KALIMANTAN TENGAH	2022	0,24	71,63	4,26	0,319	5,28
KALIMANTAN TENGAH	2023	0,30	72,20	4,10	0,317	5,11
KALIMANTAN TENGAH	2024	1,03	72,73	4,01	0,301	5,17
KALIMANTAN SELATAN	2015	5,14	68,38	4,92	0,353	4,99
KALIMANTAN SELATAN	2016	3,57	69,05	5,45	0,332	4,85
KALIMANTAN SELATAN	2017	3,73	69,65	4,77	0,347	4,73
KALIMANTAN SELATAN	2018	2,63	70,17	4,35	0,344	4,54
KALIMANTAN SELATAN	2019	2,81	70,72	4,18	0,334	4,55
KALIMANTAN SELATAN	2020	1,68	70,91	4,74	0,332	4,38
KALIMANTAN SELATAN	2021	0,76	71,28	4,95	0,33	4,83
KALIMANTAN SELATAN	2022	6,99	71,84	4,74	0,317	4,49
KALIMANTAN SELATAN	2023	2,43	72,50	4,31	0,313	4,29
KALIMANTAN SELATAN	2024	1,95	73,03	4,20	0,302	4,11
KALIMANTAN TIMUR	2015	3,07	74,17	7,50	0,316	6,23

KALIMANTAN TIMUR	2016	3,39	74,59	7,95	0,315	6,11
KALIMANTAN TIMUR	2017	3,15	75,12	6,91	0,33	6,19
KALIMANTAN TIMUR	2018	3,24	75,83	6,41	0,342	6,03
KALIMANTAN TIMUR	2019	1,66	76,61	5,94	0,33	5,94
KALIMANTAN TIMUR	2020	0,78	76,24	6,87	0,328	6,10
KALIMANTAN TIMUR	2021	2,15	76,88	6,83	0,334	6,54
KALIMANTAN TIMUR	2022	5,35	77,44	5,71	0,327	6,31
KALIMANTAN TIMUR	2023	3,46	78,20	5,31	0,322	6,11
KALIMANTAN TIMUR	2024	1,47	78,83	5,14	0,321	5,78
KALIMANTAN UTARA	2015	3,42	68,76	5,68	0,294	6,24
KALIMANTAN UTARA	2016	4,13	69,20	5,23	0,30	6,23
KALIMANTAN UTARA	2017	2,77	69,84	5,54	0,308	7,22
KALIMANTAN UTARA	2018	5,00	70,56	5,11	0,303	7,09
KALIMANTAN UTARA	2019	1,47	71,15	4,49	0,295	6,63
KALIMANTAN UTARA	2020	1,32	70,63	4,97	0,292	6,8
KALIMANTAN UTARA	2021	2,73	71,19	4,58	0,292	7,36
KALIMANTAN UTARA	2022	4,74	71,83	4,33	0,272	6,77
KALIMANTAN UTARA	2023	2,44	72,49	4,01	0,277	6,45
KALIMANTAN UTARA	2024	1,29	73,02	3,90	0,264	6,32
SULAWESI UTARA	2015	5,58	70,39	9,03	0,368	8,65
SULAWESI UTARA	2016	0,35	71,05	6,18	0,386	8,34
SULAWESI UTARA	2017	2,44	71,66	7,18	0,396	8,10
SULAWESI UTARA	2018	3,83	72,20	6,61	0,394	7,80
SULAWESI UTARA	2019	3,52	72,99	6,01	0,367	7,66
SULAWESI UTARA	2020	-0,18	72,93	7,37	0,37	7,62
SULAWESI UTARA	2021	2,65	73,30	7,06	0,365	7,77
SULAWESI UTARA	2022	4,00	73,81	6,61	0,365	7,28
SULAWESI UTARA	2023	2,87	74,36	6,10	0,37	7,38
SULAWESI UTARA	2024	0,44	75,03	5,85	0,36	7,25
SULAWESI TENGAH	2015	4,17	66,76	4,10	0,374	14,66
SULAWESI TENGAH	2016	4,17	67,47	3,29	0,362	14,45
SULAWESI TENGAH	2017	4,33	68,11	3,81	0,355	14,14
SULAWESI TENGAH	2018	1,10	68,88	3,37	0,346	14,01

SULAWESI TENGAH	2019	0,83	69,50	3,11	0,327	13,48
SULAWESI TENGAH	2020	0,46	69,95	3,77	0,326	12,92
SULAWESI TENGAH	2021	2,20	69,79	3,75	0,316	13
SULAWESI TENGAH	2022	5,81	70,28	3,00	0,308	12,33
SULAWESI TENGAH	2023	2,35	70,95	2,95	0,304	12,41
SULAWESI TENGAH	2024	1,29	71,56	2,94	0,301	11,77
SULAWESI SELATAN	2015	4,48	69,15	5,95	0,424	9,39
SULAWESI SELATAN	2016	2,94	69,76	4,80	0,426	9,40
SULAWESI SELATAN	2017	3,85	70,34	5,61	0,407	9,38
SULAWESI SELATAN	2018	3,50	70,90	4,94	0,397	9,06
SULAWESI SELATAN	2019	2,35	71,66	4,62	0,389	8,69
SULAWESI SELATAN	2020	2,04	71,93	6,31	0,389	8,72
SULAWESI SELATAN	2021	2,40	72,24	5,72	0,382	8,78
SULAWESI SELATAN	2022	5,77	72,82	4,51	0,377	8,63
SULAWESI SELATAN	2023	2,81	73,46	4,33	0,377	8,70
SULAWESI SELATAN	2024	1,23	74,05	4,19	0,363	8,06
SULAWESI TENGGARA	2015	3,95	68,75	5,55	0,399	12,9
SULAWESI TENGGARA	2016	3,07	69,31	2,72	0,402	12,88
SULAWESI TENGGARA	2017	3,32	69,86	3,30	0,394	12,81
SULAWESI TENGGARA	2018	2,55	70,61	3,19	0,409	11,63
SULAWESI TENGGARA	2019	4,49	71,20	3,52	0,399	11,24
SULAWESI TENGGARA	2020	0,45	71,45	4,58	0,389	11,00
SULAWESI TENGGARA	2021	1,87	71,65	3,92	0,39	11,66
SULAWESI TENGGARA	2022	7,39	72,23	3,36	0,387	11,17
SULAWESI TENGGARA	2023	2,58	72,79	3,15	0,371	11,43
SULAWESI TENGGARA	2024	1,05	73,48	3,09	0,37	11,21
GORONTALO	2015	4,30	65,86	4,65	0,42	18,32
GORONTALO	2016	1,30	66,29	2,76	0,419	17,72
GORONTALO	2017	4,34	67,01	4,28	0,43	17,65
GORONTALO	2018	2,15	67,71	3,70	0,403	16,81
GORONTALO	2019	2,87	68,49	3,76	0,407	15,52
GORONTALO	2020	0,81	68,68	4,28	0,408	15,22
GORONTALO	2021	2,59	69,00	3,01	0,408	15,61

GORONTALO	2022	5,15	69,81	2,58	0,418	15,42
GORONTALO	2023	3,88	70,45	3,06	0,417	15,15
GORONTALO	2024	-0,79	71,23	3,13	0,414	14,57
SULAWESI BARAT	2015	5,07	62,96	3,35	0,363	12,4
SULAWESI BARAT	2016	2,23	63,60	3,33	0,364	11,74
SULAWESI BARAT	2017	3,79	64,30	3,21	0,354	11,3
SULAWESI BARAT	2018	1,80	65,10	3,01	0,37	11,25
SULAWESI BARAT	2019	1,43	65,73	2,98	0,365	11,02
SULAWESI BARAT	2020	1,78	66,11	3,32	0,364	10,87
SULAWESI BARAT	2021	4,39	66,36	3,13	0,356	11,29
SULAWESI BARAT	2022	4,85	66,92	2,34	0,362	11,75
SULAWESI BARAT	2023	1,82	67,55	2,27	0,351	11,49
SULAWESI BARAT	2024	1,49	68,20	2,68	0,354	11,21
MALUKU	2015	3,95	67,05	9,93	0,34	19,51
MALUKU	2016	3,28	67,60	7,05	0,348	19,18
MALUKU	2017	0,78	68,19	9,29	0,343	18,45
MALUKU	2018	3,13	68,87	6,95	0,343	18,12
MALUKU	2019	5,57	69,45	6,69	0,324	17,69
MALUKU	2020	2,13	69,49	7,57	0,318	17,44
MALUKU	2021	2,38	69,71	6,93	0,314	17,87
MALUKU	2022	6,39	70,22	6,88	0,301	15,97
MALUKU	2023	2,77	70,94	6,31	0,288	15,15
MALUKU	2024	1,28	71,57	6,11	0,282	16,05
MALUKU UTARA	2015	4,52	65,91	6,05	0,28	6,84
MALUKU UTARA	2016	4,15	66,63	4,01	0,286	6,33
MALUKU UTARA	2017	1,97	67,20	5,33	0,317	6,35
MALUKU UTARA	2018	4,12	67,76	4,63	0,328	6,64
MALUKU UTARA	2019	2,02	68,70	4,81	0,312	6,77
MALUKU UTARA	2020	2,13	68,49	5,15	0,308	6,78
MALUKU UTARA	2021	2,38	66,76	4,71	0,3	6,89
MALUKU UTARA	2022	4,52	69,47	3,98	0,279	6,23
MALUKU UTARA	2023	4,33	70,21	4,31	0,3	6,46
MALUKU UTARA	2024	1,5	71,03	4,03	0,316	6,32

PAPUA	2015	2,79	57,25	3,99	0,421	28,17
PAPUA	2016	4,13	58,05	3,35	0,39	28,54
PAPUA	2017	2,41	59,09	3,62	0,397	27,62
PAPUA	2018	6,70	60,06	3,00	0,384	27,74
PAPUA	2019	2,31	60,84	3,51	0,394	27,53
PAPUA	2020	0,79	60,44	4,28	0,392	26,64
PAPUA	2021	0,93	60,62	3,33	0,397	26,86
PAPUA	2022	2,10	71,76	2,83	0,406	26,56
PAPUA	2023	5,23	72,41	2,67	0,386	26,03
PAPUA	2024	1,75	73,00	6,48	0,362	17,26
PAPUA BARAT	2015	5,34	61,73	8,08	0,44	25,82
PAPUA BARAT	2016	3,62	62,21	7,46	0,373	25,43
PAPUA BARAT	2017	1,44	62,99	6,49	0,39	25,10
PAPUA BARAT	2018	5,21	63,74	6,45	0,394	23,01
PAPUA BARAT	2019	1,93	64,70	6,43	0,386	22,17
PAPUA BARAT	2020	0,71	65,09	6,80	0,382	21,37
PAPUA BARAT	2021	3,47	65,26	5,84	0,38	21,84
PAPUA BARAT	2022	3,87	65,16	5,37	0,37	21,33
PAPUA BARAT	2023	2,94	66,16	5,38	0,37	20,49
PAPUA BARAT	2024	2,53	67,02	4,13	0,389	21,66



Lampiran 2 : Data Kemiskinan Inflasi Indeks Pembangunan Manusia (Yang Sudah Di Ln) Tingkat Pembangunan Terbuka Dan Ketimpangan Pendapatan .

PROVINSI	Tahun	X1	X2	X3	X4	Y	LN_X2
ACEH	2015	0,76	69,45	9,93	0,334	17,08	4,240607
ACEH	2016	1,12	70,00	7,57	0,333	16,73	4,248495
ACEH	2017	1,26	70,60	6,57	0,329	16,89	4,25703
ACEH	2018	0,38	71,19	6,34	0,325	15,97	4,265352
ACEH	2019	1,69	71,90	6,17	0,319	15,32	4,275276
ACEH	2020	3,59	71,99	6,59	0,323	14,99	4,276527
ACEH	2021	2,24	72,18	6,30	0,324	15,33	4,279163
ACEH	2022	5,89	72,80	6,17	0,311	14,64	4,287716
ACEH	2023	1,53	73,40	6,03	0,296	14,45	4,295924
ACEH	2024	2,17	74,03	5,75	0,294	14,23	4,30447
SUMATERA UTARA	2015	3,24	69,51	6,71	0,336	10,53	4,241471
SUMATERA UTARA	2016	3,02	70,00	5,84	0,319	10,35	4,248495
SUMATERA UTARA	2017	3,20	70,57	5,60	0,315	10,22	4,256605
SUMATERA UTARA	2018	1,23	71,18	5,55	0,318	9,22	4,265212
SUMATERA UTARA	2019	2,33	71,74	5,39	0,317	8,83	4,273048
SUMATERA UTARA	2020	1,96	71,77	6,91	0,316	8,75	4,273467
SUMATERA UTARA	2021	1,71	72,00	6,33	0,314	9,01	4,276666
SUMATERA UTARA	2022	6,12	72,71	6,16	0,312	8,42	4,286479
SUMATERA UTARA	2023	2,25	73,37	5,89	0,309	8,15	4,295515
SUMATERA UTARA	2024	2,12	74,02	5,60	0,297	7,99	4,304335
SUMATERA BARAT	2015	1,08	69,98	6,89	0,342	7,31	4,248209
SUMATERA BARAT	2016	4,89	70,73	5,09	0,331	7,09	4,25887
SUMATERA BARAT	2017	2,02	71,24	5,58	0,318	6,87	4,266054
SUMATERA BARAT	2018	2,60	71,73	5,66	0,321	6,65	4,272909
SUMATERA BARAT	2019	1,66	72,39	5,38	0,306	6,42	4,282068
SUMATERA BARAT	2020	2,11	72,38	6,88	0,305	6,28	4,28193
SUMATERA BARAT	2021	1,40	72,65	6,52	0,306	6,00	4,285653
SUMATERA BARAT	2022	7,43	73,26	6,28	0,3	5,92	4,294015

SUMATERA BARAT	2023	2,47	73,75	5,94	0,28	5,95	4,300681
SUMATERA BARAT	2024	0,89	74,49	5,75	0,283	5,97	4,310665
RIAU	2015	2,65	70,84	7,83	0,364	8,42	4,260424
RIAU	2016	4,04	71,20	7,43	0,347	7,98	4,265493
RIAU	2017	4,20	71,79	6,22	0,325	7,78	4,273745
RIAU	2018	2,45	72,44	5,98	0,327	7,39	4,282759
RIAU	2019	2,36	73,00	5,76	0,334	7,08	4,290459
RIAU	2020	2,42	72,71	6,32	0,329	6,82	4,286479
RIAU	2021	1,54	72,94	4,42	0,326	7,12	4,289637
RIAU	2022	6,81	73,52	4,37	0,326	6,78	4,297557
RIAU	2023	2,50	74,04	4,23	0,324	6,68	4,304605
RIAU	2024	1,25	74,79	3,70	0,307	6,67	4,314684
JAMBI	2015	1,37	68,89	4,34	0,361	8,86	4,232511
JAMBI	2016	4,54	69,62	4,00	0,349	8,41	4,243052
JAMBI	2017	2,68	69,95	3,87	0,335	8,19	4,247781
JAMBI	2018	3,02	70,65	3,73	0,334	7,92	4,257738
JAMBI	2019	1,27	71,26	4,06	0,321	7,60	4,266335
JAMBI	2020	3,09	71,29	5,13	0,32	7,58	4,266756
JAMBI	2021	1,67	71,63	5,09	0,321	8,09	4,271514
JAMBI	2022	6,39	72,14	4,59	0,32	7,62	4,278609
JAMBI	2023	3,27	72,77	4,53	0,343	7,58	4,287304
JAMBI	2024	1,43	73,43	4,48	0,321	7,10	4,296333
SUMATERA SELATAN	2015	3,10	67,46	6,07	0,36	14,25	4,211535
SUMATERA SELATAN	2016	3,58	68,24	4,31	0,348	13,54	4,223031
SUMATERA SELATAN	2017	2,96	68,25	4,39	0,361	13,19	4,223177
SUMATERA SELATAN	2018	2,74	69,39	4,27	0,358	12,80	4,239743
SUMATERA SELATAN	2019	2,06	70,02	4,53	0,331	12,71	4,248781
SUMATERA SELATAN	2020	1,55	70,01	5,51	0,339	12,66	4,248638
SUMATERA SELATAN	2021	1,82	70,24	4,98	0,341	12,84	4,251918
SUMATERA SELATAN	2022	5,94	70,90	4,63	0,339	11,90	4,26127
SUMATERA SELATAN	2023	3,17	71,62	4,11	0,338	11,78	4,271374
SUMATERA SELATAN	2024	1,20	72,30	3,86	0,333	10,97	4,280824
BENGKULU	2015	3,24	68,59	4,91	0,376	17,88	4,228147

BENGKULU	2016	4,91	69,33	3,30	0,357	17,32	4,238878
BENGKULU	2017	3,51	69,95	3,74	0,351	16,45	4,247781
BENGKULU	2018	2,36	70,64	3,35	0,362	15,43	4,257597
BENGKULU	2019	2,88	71,21	3,26	0,34	15,23	4,265633
BENGKULU	2020	0,45	71,40	4,07	0,334	15,03	4,268298
BENGKULU	2021	2,38	71,64	3,65	0,326	15,22	4,271654
BENGKULU	2022	5,79	72,16	3,59	0,315	14,62	4,278886
BENGKULU	2023	3,04	72,78	3,42	0,333	14,04	4,287441
BENGKULU	2024	0,84	73,39	3,11	0,342	13,56	4,295788
LAMPUNG	2015	4,34	66,95	5,14	0,376	14,35	4,203946
LAMPUNG	2016	2,78	67,65	4,62	0,364	14,29	4,214347
LAMPUNG	2017	3,02	68,25	4,33	0,334	13,69	4,223177
LAMPUNG	2018	2,73	69,02	4,04	0,346	13,14	4,234396
LAMPUNG	2019	3,44	69,57	4,03	0,329	12,62	4,242333
LAMPUNG	2020	2,00	69,69	4,67	0,327	12,34	4,244057
LAMPUNG	2021	2,19	69,90	4,69	0,323	12,62	4,247066
LAMPUNG	2022	5,51	70,45	4,52	0,314	11,57	4,254903
LAMPUNG	2023	3,06	71,15	4,23	0,324	11,11	4,26479
LAMPUNG	2024	1,57	71,81	4,19	0,302	10,69	4,274024
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2015	3,27	69,05	6,29	0,283	5,40	4,234831
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2016	6,75	69,55	2,60	0,275	5,22	4,242046
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2017	3,13	69,99	3,78	0,282	5,20	4,248352
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2018	3,18	70,67	3,61	0,281	5,25	4,258021
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2019	2,62	71,30	3,58	0,269	4,62	4,266896
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2020	1,08	71,47	5,25	0,262	4,53	4,269278
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2021	3,75	71,69	5,03	0,256	4,90	4,272351
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2022	5,38	72,24	4,77	0,236	4,45	4,279994
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2023	2,65	72,85	4,56	0,245	4,52	4,288403

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2024	0,75	73,33	4,63	0,244	4,55	4,29497
KEPULAUAN RIAU	2015	4,04	73,75	6,20	0,364	6,24	4,300681
KEPULAUAN RIAU	2016	3,53	73,99	7,69	0,354	5,98	4,30393
KEPULAUAN RIAU	2017	0,50	74,45	7,16	0,334	6,06	4,310128
KEPULAUAN RIAU	2018	3,18	74,84	8,04	0,33	6,20	4,315353
KEPULAUAN RIAU	2019	2,82	75,48	7,50	0,341	5,90	4,323868
KEPULAUAN RIAU	2020	1,18	75,59	10,34	0,339	5,92	4,325324
KEPULAUAN RIAU	2021	2,26	75,79	9,91	0,343	6,12	4,327966
KEPULAUAN RIAU	2022	5,83	76,46	8,23	0,342	6,24	4,336768
KEPULAUAN RIAU	2023	2,76	77,11	6,80	0,34	5,69	4,345233
KEPULAUAN RIAU	2024	2,09	77,97	6,39	0,349	5,37	4,356324
DKI JAKARTA	2015	3,30	78,99	7,23	0,431	3,93	4,369321
DKI JAKARTA	2016	2,37	79,60	6,12	0,411	3,75	4,377014
DKI JAKARTA	2017	3,72	80,06	7,14	0,413	3,77	4,382776
DKI JAKARTA	2018	3,27	80,47	6,65	0,394	3,57	4,387884
DKI JAKARTA	2019	3,23	80,76	6,54	0,394	3,47	4,391482
DKI JAKARTA	2020	1,59	80,77	10,95	0,399	4,53	4,391606
DKI JAKARTA	2021	1,53	81,11	8,50	0,409	4,72	4,395806
DKI JAKARTA	2022	4,21	81,65	7,18	0,423	4,69	4,402442
DKI JAKARTA	2023	2,28	82,46	6,53	0,431	4,44	4,412313
DKI JAKARTA	2024	1,48	83,08	6,21	0,423	4,30	4,419804
JAWA BARAT	2015	2,73	69,50	8,72	0,415	9,53	4,241327
JAWA BARAT	2016	2,75	70,05	8,89	0,413	8,95	4,249209
JAWA BARAT	2017	3,63	70,69	8,22	0,403	8,71	4,258304
JAWA BARAT	2018	3,54	71,30	8,23	0,407	7,45	4,266896
JAWA BARAT	2019	3,41	72,03	8,04	0,402	6,91	4,277083
JAWA BARAT	2020	1,66	72,09	10,46	0,403	7,88	4,277915
JAWA BARAT	2021	1,22	72,45	9,82	0,412	8,40	4,282897
JAWA BARAT	2022	5,16	73,12	8,31	0,417	8,06	4,292102
JAWA BARAT	2023	2,58	73,74	7,44	0,425	7,62	4,300545
JAWA BARAT	2024	1,64	74,43	6,75	0,421	7,46	4,309859
JAWA TENGAH	2015	2,73	69,49	4,99	0,382	13,58	4,241183
JAWA TENGAH	2016	2,36	69,98	4,63	0,366	13,27	4,248209

JAWA TENGAH	2017	3,61	70,52	4,57	0,365	13,01	4,255896
JAWA TENGAH	2018	2,82	71,12	4,47	0,378	11,32	4,264369
JAWA TENGAH	2019	2,72	71,73	4,44	0,361	10,8	4,272909
JAWA TENGAH	2020	1,56	71,87	6,48	0,362	11,41	4,274859
JAWA TENGAH	2021	1,70	72,16	5,95	0,372	11,79	4,278886
JAWA TENGAH	2022	5,63	72,79	5,57	0,374	10,93	4,287579
JAWA TENGAH	2023	2,89	73,39	5,13	0,369	10,77	4,295788
JAWA TENGAH	2024	1,67	73,88	4,78	0,367	10,47	4,302442
DI YOGYAKARTA	2015	3,09	77,59	4,07	0,433	14,91	4,351439
DI YOGYAKARTA	2016	2,29	78,38	2,72	0,42	13,34	4,361569
DI YOGYAKARTA	2017	4,2	78,89	3,02	0,432	13,02	4,368054
DI YOGYAKARTA	2018	2,66	79,53	3,37	0,441	12,13	4,376134
DI YOGYAKARTA	2019	2,77	79,99	3,18	0,423	11,7	4,381902
DI YOGYAKARTA	2020	1,40	79,97	4,57	0,434	12,28	4,381652
DI YOGYAKARTA	2021	2,29	80,22	4,56	0,441	12,8	4,384773
DI YOGYAKARTA	2022	6,49	80,64	4,06	0,439	11,34	4,389995
DI YOGYAKARTA	2023	3,17	81,07	3,69	0,449	11,04	4,395313
DI YOGYAKARTA	2024	1,28	81,55	3,48	0,435	10,83	4,401216
JAWA TIMUR	2015	3,08	68,95	4,47	0,415	12,34	4,233382
JAWA TIMUR	2016	2,72	69,74	4,21	0,402	12,05	4,244774
JAWA TIMUR	2017	4,04	70,27	4,00	0,396	11,77	4,252345
JAWA TIMUR	2018	2,86	70,77	3,91	0,379	10,98	4,259435
JAWA TIMUR	2019	2,86	71,50	3,82	0,37	10,37	4,269697
JAWA TIMUR	2020	1,44	71,71	5,84	0,366	11,09	4,27263
JAWA TIMUR	2021	2,45	72,14	5,74	0,374	11,4	4,278609
JAWA TIMUR	2022	6,52	72,75	5,49	0,371	10,38	4,287029
JAWA TIMUR	2023	2,92	73,38	4,88	0,387	10,35	4,295651
JAWA TIMUR	2024	1,51	74,09	4,19	0,372	9,79	4,305281
BANTEN	2015	4,29	70,27	9,55	0,401	5,90	4,252345
BANTEN	2016	2,94	70,96	8,92	0,394	5,42	4,262116
BANTEN	2017	3,98	71,42	9,28	0,382	5,45	4,268578
BANTEN	2018	3,42	71,95	8,47	0,385	5,24	4,275971
BANTEN	2019	3,30	72,44	8,11	0,365	5,09	4,282759

BANTEN	2020	1,43	72,45	10,64	0,363	5,92	4,282897
BANTEN	2021	1,91	72,72	8,98	0,365	6,66	4,286616
BANTEN	2022	5,08	73,32	8,09	0,363	6,16	4,294833
BANTEN	2023	5,64	73,87	7,52	0,368	6,17	4,302307
BANTEN	2024	1,88	74,48	6,68	0,353	5,84	4,310531
BALI	2015	2,70	73,27	1,99	0,377	4,74	4,294151
BALI	2016	2,94	73,65	1,89	0,366	4,25	4,299324
BALI	2017	3,31	74,30	1,48	0,384	4,25	4,308111
BALI	2018	3,40	74,77	1,40	0,377	4,01	4,314417
BALI	2019	2,37	75,38	1,57	0,366	3,79	4,322542
BALI	2020	0,55	75,50	5,63	0,369	3,78	4,324133
BALI	2021	2,01	75,69	5,37	0,378	4,53	4,326646
BALI	2022	6,44	74,44	4,80	0,363	4,57	4,309993
BALI	2023	2,54	77,10	2,69	0,362	4,25	4,345103
BALI	2024	2,34	77,76	1,79	0,361	4,00	4,353627
NTB	2015	3,41	65,19	5,69	0,368	17,1	4,177306
NTB	2016	2,61	65,81	3,94	0,359	16,48	4,186772
NTB	2017	3,17	66,58	3,32	0,371	16,07	4,198404
NTB	2018	3,16	67,30	3,58	0,372	14,75	4,20916
NTB	2019	1,87	68,14	3,28	0,379	14,56	4,221564
NTB	2020	0,6	68,25	4,22	0,376	13,97	4,223177
NTB	2021	2,12	68,65	3,01	0,381	14,14	4,229021
NTB	2022	6,23	69,46	2,89	0,373	13,68	4,240751
NTB	2023	3,02	70,20	2,80	0,375	13,85	4,251348
NTB	2024	1,28	70,93	2,73	0,361	12,91	4,261693
NTT	2015	4,92	62,67	3,83	0,339	22,61	4,137883
NTT	2016	2,48	63,13	3,25	0,336	22,19	4,145196
NTT	2017	2,00	63,73	3,27	0,359	21,85	4,154655
NTT	2018	3,07	64,39	2,85	0,351	21,35	4,164958
NTT	2019	0,67	65,23	3,14	0,356	21,09	4,177919
NTT	2020	0,61	65,19	4,28	0,354	20,9	4,177306
NTT	2021	1,67	65,28	3,77	0,346	20,99	4,178686
NTT	2022	6,65	65,90	3,54	0,334	20,05	4,188138

NTT	2023	2,42	66,68	3,14	0,325	19,96	4,199905
NTT	2024	1,19	67,39	3,02	0,316	19,48	4,210497
KALIMANTAN BARAT	2015	6,17	65,59	5,15	0,334	8,03	4,183423
KALIMANTAN BARAT	2016	3,88	65,88	4,23	0,341	7,87	4,187835
KALIMANTAN BARAT	2017	3,86	66,26	4,36	0,327	7,88	4,193586
KALIMANTAN BARAT	2018	3,99	66,98	4,18	0,339	7,77	4,204394
KALIMANTAN BARAT	2019	2,64	67,65	4,35	0,327	7,49	4,214347
KALIMANTAN BARAT	2020	2,46	67,66	5,81	0,317	7,17	4,214495
KALIMANTAN BARAT	2021	1,45	67,90	5,82	0,313	7,15	4,218036
KALIMANTAN BARAT	2022	6,30	68,63	5,11	0,314	6,73	4,22873
KALIMANTAN BARAT	2023	2,02	69,41	5,05	0,321	6,71	4,240031
KALIMANTAN BARAT	2024	1,71	70,13	4,86	0,31	6,32	4,250351
KALIMANTAN TENGAH	2015	4,74	68,53	4,54	0,326	5,94	4,227272
KALIMANTAN TENGAH	2016	2,11	69,13	4,82	0,33	5,66	4,235989
KALIMANTAN TENGAH	2017	2,51	69,79	4,23	0,343	5,37	4,245491
KALIMANTAN TENGAH	2018	4,52	70,42	3,91	0,342	5,17	4,254477
KALIMANTAN TENGAH	2019	2,45	70,91	4,04	0,336	4,98	4,261411
KALIMANTAN TENGAH	2020	1,03	71,05	4,58	0,329	4,82	4,263384
KALIMANTAN TENGAH	2021	1,33	71,25	4,53	0,323	5,16	4,266195
KALIMANTAN TENGAH	2022	0,24	71,63	4,26	0,319	5,28	4,271514
KALIMANTAN TENGAH	2023	0,30	72,20	4,10	0,317	5,11	4,27944
KALIMANTAN TENGAH	2024	1,03	72,73	4,01	0,301	5,17	4,286754
KALIMANTAN SELATAN	2015	5,14	68,38	4,92	0,353	4,99	4,22508
KALIMANTAN SELATAN	2016	3,57	69,05	5,45	0,332	4,85	4,234831
KALIMANTAN SELATAN	2017	3,73	69,65	4,77	0,347	4,73	4,243483
KALIMANTAN SELATAN	2018	2,63	70,17	4,35	0,344	4,54	4,250921
KALIMANTAN SELATAN	2019	2,81	70,72	4,18	0,334	4,55	4,258728
KALIMANTAN SELATAN	2020	1,68	70,91	4,74	0,332	4,38	4,261411
KALIMANTAN SELATAN	2021	0,76	71,28	4,95	0,33	4,83	4,266616

KALIMANTAN SELATAN	2022	6,99	71,84	4,74	0,317	4,49	4,274441
KALIMANTAN SELATAN	2023	2,43	72,50	4,31	0,313	4,29	4,283587
KALIMANTAN SELATAN	2024	1,95	73,03	4,20	0,302	4,11	4,29087
KALIMANTAN TIMUR	2015	3,07	74,17	7,50	0,316	6,23	4,30636
KALIMANTAN TIMUR	2016	3,39	74,59	7,95	0,315	6,11	4,312006
KALIMANTAN TIMUR	2017	3,15	75,12	6,91	0,33	6,19	4,319087
KALIMANTAN TIMUR	2018	3,24	75,83	6,41	0,342	6,03	4,328494
KALIMANTAN TIMUR	2019	1,66	76,61	5,94	0,33	5,94	4,338728
KALIMANTAN TIMUR	2020	0,78	76,24	6,87	0,328	6,10	4,333886
KALIMANTAN TIMUR	2021	2,15	76,88	6,83	0,334	6,54	4,342246
KALIMANTAN TIMUR	2022	5,35	77,44	5,71	0,327	6,31	4,349503
KALIMANTAN TIMUR	2023	3,46	78,20	5,31	0,322	6,11	4,35927
KALIMANTAN TIMUR	2024	1,47	78,83	5,14	0,321	5,78	4,367294
KALIMANTAN UTARA	2015	3,42	68,76	5,68	0,294	6,24	4,230622
KALIMANTAN UTARA	2016	4,13	69,20	5,23	0,30	6,23	4,237001
KALIMANTAN UTARA	2017	2,77	69,84	5,54	0,308	7,22	4,246207
KALIMANTAN UTARA	2018	5,00	70,56	5,11	0,303	7,09	4,256463
KALIMANTAN UTARA	2019	1,47	71,15	4,49	0,295	6,63	4,26479
KALIMANTAN UTARA	2020	1,32	70,63	4,97	0,292	6,8	4,257455
KALIMANTAN UTARA	2021	2,73	71,19	4,58	0,292	7,36	4,265352
KALIMANTAN UTARA	2022	4,74	71,83	4,33	0,272	6,77	4,274302
KALIMANTAN UTARA	2023	2,44	72,49	4,01	0,277	6,45	4,283449
KALIMANTAN UTARA	2024	1,29	73,02	3,90	0,264	6,32	4,290733
SULAWESI UTARA	2015	5,58	70,39	9,03	0,368	8,65	4,254051
SULAWESI UTARA	2016	0,35	71,05	6,18	0,386	8,34	4,263384
SULAWESI UTARA	2017	2,44	71,66	7,18	0,396	8,10	4,271933
SULAWESI UTARA	2018	3,83	72,20	6,61	0,394	7,80	4,27944
SULAWESI UTARA	2019	3,52	72,99	6,01	0,367	7,66	4,290322
SULAWESI UTARA	2020	-0,18	72,93	7,37	0,37	7,62	4,2895
SULAWESI UTARA	2021	2,65	73,30	7,06	0,365	7,77	4,294561
SULAWESI UTARA	2022	4,00	73,81	6,61	0,365	7,28	4,301494
SULAWESI UTARA	2023	2,87	74,36	6,10	0,37	7,38	4,308918

SULAWESI UTARA	2024	0,44	75,03	5,85	0,36	7,25	4,317888
SULAWESI TENGAH	2015	4,17	66,76	4,10	0,374	14,66	4,201104
SULAWESI TENGAH	2016	4,17	67,47	3,29	0,362	14,45	4,211683
SULAWESI TENGAH	2017	4,33	68,11	3,81	0,355	14,14	4,221124
SULAWESI TENGAH	2018	1,10	68,88	3,37	0,346	14,01	4,232366
SULAWESI TENGAH	2019	0,83	69,50	3,11	0,327	13,48	4,241327
SULAWESI TENGAH	2020	0,46	69,95	3,77	0,326	12,92	4,247781
SULAWESI TENGAH	2021	2,20	69,79	3,75	0,316	13	4,245491
SULAWESI TENGAH	2022	5,81	70,28	3,00	0,308	12,33	4,252487
SULAWESI TENGAH	2023	2,35	70,95	2,95	0,304	12,41	4,261975
SULAWESI TENGAH	2024	1,29	71,56	2,94	0,301	11,77	4,270536
SULAWESI SELATAN	2015	4,48	69,15	5,95	0,424	9,39	4,236278
SULAWESI SELATAN	2016	2,94	69,76	4,80	0,426	9,40	4,245061
SULAWESI SELATAN	2017	3,85	70,34	5,61	0,407	9,38	4,253341
SULAWESI SELATAN	2018	3,50	70,90	4,94	0,397	9,06	4,26127
SULAWESI SELATAN	2019	2,35	71,66	4,62	0,389	8,69	4,271933
SULAWESI SELATAN	2020	2,04	71,93	6,31	0,389	8,72	4,275693
SULAWESI SELATAN	2021	2,40	72,24	5,72	0,382	8,78	4,279994
SULAWESI SELATAN	2022	5,77	72,82	4,51	0,377	8,63	4,287991
SULAWESI SELATAN	2023	2,81	73,46	4,33	0,377	8,70	4,296741
SULAWESI SELATAN	2024	1,23	74,05	4,19	0,363	8,06	4,304741
SULAWESI TENGGARA	2015	3,95	68,75	5,55	0,399	12,9	4,230477
SULAWESI TENGGARA	2016	3,07	69,31	2,72	0,402	12,88	4,238589
SULAWESI TENGGARA	2017	3,32	69,86	3,30	0,394	12,81	4,246493
SULAWESI TENGGARA	2018	2,55	70,61	3,19	0,409	11,63	4,257172
SULAWESI TENGGARA	2019	4,49	71,20	3,52	0,399	11,24	4,265493
SULAWESI TENGGARA	2020	0,45	71,45	4,58	0,389	11,00	4,268998
SULAWESI TENGGARA	2021	1,87	71,65	3,92	0,39	11,66	4,271793
SULAWESI TENGGARA	2022	7,39	72,23	3,36	0,387	11,17	4,279855
SULAWESI TENGGARA	2023	2,58	72,79	3,15	0,371	11,43	4,287579
SULAWESI TENGGARA	2024	1,05	73,48	3,09	0,37	11,21	4,297013
GORONTALO	2015	4,30	65,86	4,65	0,42	18,32	4,187531
GORONTALO	2016	1,30	66,29	2,76	0,419	17,72	4,194039

GORONTALO	2017	4,34	67,01	4,28	0,43	17,65	4,204842
GORONTALO	2018	2,15	67,71	3,70	0,403	16,81	4,215234
GORONTALO	2019	2,87	68,49	3,76	0,407	15,52	4,226688
GORONTALO	2020	0,81	68,68	4,28	0,408	15,22	4,229458
GORONTALO	2021	2,59	69,00	3,01	0,408	15,61	4,234107
GORONTALO	2022	5,15	69,81	2,58	0,418	15,42	4,245777
GORONTALO	2023	3,88	70,45	3,06	0,417	15,15	4,254903
GORONTALO	2024	-0,79	71,23	3,13	0,414	14,57	4,265914
SULAWESI BARAT	2015	5,07	62,96	3,35	0,363	12,4	4,1425
SULAWESI BARAT	2016	2,23	63,60	3,33	0,364	11,74	4,152613
SULAWESI BARAT	2017	3,79	64,30	3,21	0,354	11,3	4,16356
SULAWESI BARAT	2018	1,80	65,10	3,01	0,37	11,25	4,175925
SULAWESI BARAT	2019	1,43	65,73	2,98	0,365	11,02	4,185555
SULAWESI BARAT	2020	1,78	66,11	3,32	0,364	10,87	4,19132
SULAWESI BARAT	2021	4,39	66,36	3,13	0,356	11,29	4,195094
SULAWESI BARAT	2022	4,85	66,92	2,34	0,362	11,75	4,203498
SULAWESI BARAT	2023	1,82	67,55	2,27	0,351	11,49	4,212868
SULAWESI BARAT	2024	1,49	68,20	2,68	0,354	11,21	4,222445
MALUKU	2015	3,95	67,05	9,93	0,34	19,51	4,205439
MALUKU	2016	3,28	67,60	7,05	0,348	19,18	4,213608
MALUKU	2017	0,78	68,19	9,29	0,343	18,45	4,222298
MALUKU	2018	3,13	68,87	6,95	0,343	18,12	4,232221
MALUKU	2019	5,57	69,45	6,69	0,324	17,69	4,240607
MALUKU	2020	2,13	69,49	7,57	0,318	17,44	4,241183
MALUKU	2021	2,38	69,71	6,93	0,314	17,87	4,244344
MALUKU	2022	6,39	70,22	6,88	0,301	15,97	4,251633
MALUKU	2023	2,77	70,94	6,31	0,288	15,15	4,261834
MALUKU	2024	1,28	71,57	6,11	0,282	16,05	4,270676
MALUKU UTARA	2015	4,52	65,91	6,05	0,28	6,84	4,18829
MALUKU UTARA	2016	4,15	66,63	4,01	0,286	6,33	4,199155
MALUKU UTARA	2017	1,97	67,20	5,33	0,317	6,35	4,207673
MALUKU UTARA	2018	4,12	67,76	4,63	0,328	6,64	4,215972
MALUKU UTARA	2019	2,02	68,70	4,81	0,312	6,77	4,229749

MALUKU UTARA	2020	2,13	68,49	5,15	0,308	6,78	4,226688
MALUKU UTARA	2021	2,38	66,76	4,71	0,3	6,89	4,201104
MALUKU UTARA	2022	4,52	69,47	3,98	0,279	6,23	4,240895
MALUKU UTARA	2023	4,33	70,21	4,31	0,3	6,46	4,251491
MALUKU UTARA	2024	1,5	71,03	4,03	0,316	6,32	4,263102
PAPUA	2015	2,79	57,25	3,99	0,421	28,17	4,047428
PAPUA	2016	4,13	58,05	3,35	0,39	28,54	4,061305
PAPUA	2017	2,41	59,09	3,62	0,397	27,62	4,079062
PAPUA	2018	6,70	60,06	3,00	0,384	27,74	4,095344
PAPUA	2019	2,31	60,84	3,51	0,394	27,53	4,108247
PAPUA	2020	0,79	60,44	4,28	0,392	26,64	4,101651
PAPUA	2021	0,93	60,62	3,33	0,397	26,86	4,104625
PAPUA	2022	2,10	71,76	2,83	0,406	26,56	4,273327
PAPUA	2023	5,23	72,41	2,67	0,386	26,03	4,282344
PAPUA	2024	1,75	73,00	6,48	0,362	17,26	4,290459
PAPUA BARAT	2015	5,34	61,73	8,08	0,44	25,82	4,12277
PAPUA BARAT	2016	3,62	62,21	7,46	0,373	25,43	4,130516
PAPUA BARAT	2017	1,44	62,99	6,49	0,39	25,10	4,142976
PAPUA BARAT	2018	5,21	63,74	6,45	0,394	23,01	4,154812
PAPUA BARAT	2019	1,93	64,70	6,43	0,386	22,17	4,169761
PAPUA BARAT	2020	0,71	65,09	6,80	0,382	21,37	4,175771
PAPUA BARAT	2021	3,47	65,26	5,84	0,38	21,84	4,178379
PAPUA BARAT	2022	3,87	65,16	5,37	0,37	21,33	4,176846
PAPUA BARAT	2023	2,94	66,16	5,38	0,37	20,49	4,192076
PAPUA BARAT	2024	2,53	67,02	4,13	0,389	21,66	4,204991

Lampiran 3: Output Hasil Uji Common Effect Model

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 04/29/26 Time: 01:29

Sample: 2015 2024

Periods included: 10

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 340

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	258.7021	15.91142	16.25889	0.0000
X1	-0.236125	0.138939	-1.699485	0.0902
LN_X2	-61.42813	3.755246	-16.35795	0.0000
X3	-0.241513	0.121335	-1.990469	0.0474
X4	44.45434	5.118419	8.685169	0.0000
R-squared	0.517789	Mean dependent var		10.69735
Adjusted R-squared	0.512031	S.D. dependent var		5.556830
S.E. of regression	3.881712	Akaike info criterion		5.565026
Sum squared resid	5047.676	Schwarz criterion		5.621334
Log likelihood	-941.0545	Hannan-Quinn criter.		5.587463
F-statistic	89.92900	Durbin-Watson stat		0.078429
Prob(F-statistic)	0.000000			

جامعة الرانري

AR - RANIRY

Lampiran 4: Output Hasil Uji Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 04/29/26 Time: 01:30

Sample: 2015 2024

Periods included: 10

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 340

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	111.3217	8.175536	13.61644	0.0000
X1	0.002234	0.025600	0.087258	0.9305
LN_X2	-24.65296	1.770214	-13.92654	0.0000
X3	-0.013661	0.045743	-0.298655	0.7654
X4	12.73593	3.075484	4.141113	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.986209	Mean dependent var	10.69735
Adjusted R-squared	0.984520	S.D. dependent var	5.556830
S.E. of regression	0.691377	Akaike info criterion	2.204749
Sum squared resid	144.3568	Schwarz criterion	2.632690
Log likelihood	-336.8073	Hannan-Quinn criter.	2.375265
F-statistic	583.7017	Durbin-Watson stat	1.048976
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 5: Output Hasil Uji Random Effect Model

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 04/29/26 Time: 01:32

Sample: 2015 2024

Periods included: 10

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 340

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	114.2175	8.042688	14.20140	0.0000
X1	-0.000701	0.025589	-0.027384	0.9782
LN_X2	-25.34373	1.739463	-14.56986	0.0000
X3	-0.026948	0.045379	-0.593854	0.5530
X4	13.08796	3.010916	4.346838	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			3.714080	0.9665
Idiosyncratic random			0.691377	0.0335
Weighted Statistics				
R-squared	0.531243	Mean dependent var		0.628621
Adjusted R-squared	0.525646	S.D. dependent var		1.030250
S.E. of regression	0.709567	Sum squared resid		168.6678
F-statistic	94.91416	Durbin-Watson stat		0.898816
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.317535	Mean dependent var		10.69735
Sum squared resid	7143.881	Durbin-Watson stat		0.021221

Lampiran 6: Output Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	310.846371	(33,302)	0.0000
Cross-section Chi-square	1208.494277	33	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 04/29/26 Time: 01:34

Sample: 2015 2024

Periods included: 10

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 340

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	258.7021	15.91142	16.25889	0.0000
X1	-0.236125	0.138939	-1.699485	0.0902
LN_X2	-61.42813	3.755246	-16.35795	0.0000
X3	-0.241513	0.121335	-1.990469	0.0474
X4	44.45434	5.118419	8.685169	0.0000
R-squared	0.517789	Mean dependent var		10.69735
Adjusted R-squared	0.512031	S.D. dependent var		5.556830
S.E. of regression	3.881712	Akaike info criterion		5.565026
Sum squared resid	5047.676	Schwarz criterion		5.621334
Log likelihood	-941.0545	Hannan-Quinn criter.		5.587463
F-statistic	89.92900	Durbin-Watson stat		0.078429
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 7: Output Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	21.859494	4	0.0002

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.002234	-0.000701	0.000001	0.0001
LN_X2	-24.652961	-25.343732	0.107927	0.0355
X3	-0.013661	-0.026948	0.000033	0.0210
X4	12.735927	13.087963	0.392985	0.5744

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 04/29/26 Time: 01:37

Sample: 2015 2024

Periods included: 10

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 340

Variable	Δ Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	111.3217	8.175536	13.61644	0.0000
X1	0.002234	0.025600	0.087258	0.9305
LN_X2	-24.65296	1.770214	-13.92654	0.0000
X3	-0.013661	0.045743	-0.298655	0.7654
X4	12.73593	3.075484	4.141113	0.0000

Effects Specification

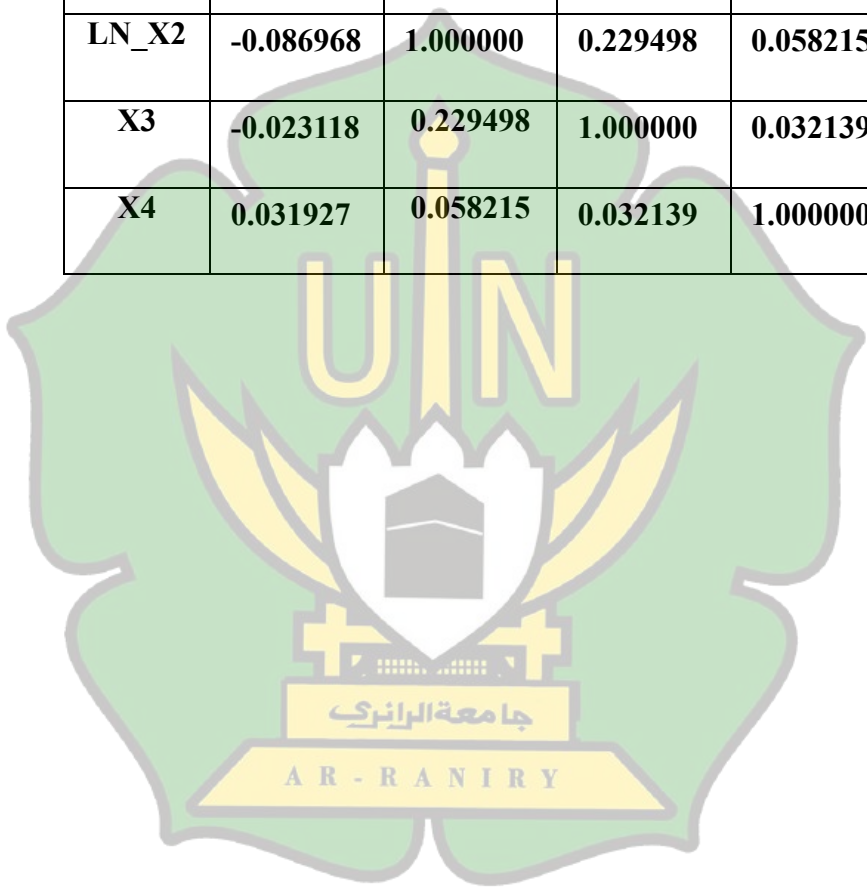
Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.986209	Mean dependent var	10.69735
Adjusted R-squared	0.984520	S.D. dependent var	5.556830
S.E. of regression	0.691377	Akaike info criterion	2.204749
Sum squared resid	144.3568	Schwarz criterion	2.632690
Log likelihood	-336.8073	Hannan-Quinn criter.	2.375265
F-statistic	583.7017	Durbin-Watson stat	1.048976
Prob(F-statistic)	0.000000		



Lampiran 8: Output Hasil Uji Multikolinearitas

Correlation				
	X1	LN_X2	X3	X4
X1	1.000000	-0.086968	-0.023118	0.031927
LN_X2	-0.086968	1.000000	0.229498	0.058215
X3	-0.023118	0.229498	1.000000	0.032139
X4	0.031927	0.058215	0.032139	1.000000



Lampiran 9: Output Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	2.104162	Prob. F(4,335)	0.0800
Obs*R-squared	8.332911	Prob. Chi-Square(4)	0.0801
Scaled explained SS	8.999078	Prob. Chi-Square(4)	0.0611

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 04/29/26 Time: 01:48

Sample: 1 340

Included observations: 340

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	242.3784	90.31850	2.683597	0.0076
X1	0.845839	0.788664	1.072495	0.2843
LN_X2	-54.07241	21.31602	-2.536703	0.0116
X3	0.053225	0.688736	0.077280	0.9384
X4	0.463965	29.05384	0.015969	0.9873
R-squared	0.024509	Mean dependent var		14.84611
Adjusted R-squared	0.012861	S.D. dependent var		22.17695
S.E. of regression	22.03388	Akaike info criterion		9.037637
Sum squared resid	162639.8	Schwarz criterion		9.093945
Log likelihood	-1531.398	Hannan-Quinn criter.		9.060073
F-statistic	2.104162	Durbin-Watson stat		0.595659
Prob(F-statistic)	0.079973			

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Nurhaliza
Tempat/Tgl.Lahir : Johar, 23 Agustus 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nim : 220604082
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia(WNI)
Alamat : Simpang Tiga, Tamiang Hulu,
Aceh Tamiang, Aceh
Telp/HP : 089529061816
Email : 220604082@student.ar-raniry.ac.id

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri 1 Pulau Tiga
2. SMP/MTs : SMP Negeri 1 Tamiang Hulu
3. SMA/MAN : SMA Unggul Aceh Timur
4. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

C. Data Orangtua

Nama Ayah : Alm.Sulaiman
Nama Ibu : Latifah
Pekerjaan :
a. Ayah : -
b. Ibu : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Simpang Tiga, Tamiang
Hulu, Aceh Tamiang, Aceh